

**KAJIAN POLA RUANG PKL DAN KARAKTERISTIK
AKTIFITASNYA DI KAWASAN PANBIL KOTA BATAM**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota

oleh :

Yanivirzal Dwiyantri
L4D 003123



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	4681/T/MT/CJ
Tgl.	09-06-06

**KAJIAN POLA RUANG PKL DAN KARAKTERISTIK
AKTIFITASNYA DI KAWASAN PANBIL KOTA BATAM**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

oleh :

Yanivirzal Dwiyanti
L4D 003123

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Pada September 2005

Dinyatakan Lulus/Tidak Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelas Magister Teknik

Semarang, September 2005

Pembimbing Pendamping



Ir. Mardwi Rahdriawan, MT

Pembimbing Utama



Ir. Ragil Haryanto, MSP

Mengetahui
Ketuan Program Studi
Magister Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Y. Sugiono Soetomo, DEA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak Terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam Naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka

Semarang, September 2005

Yanivirzal Dwiyantri

NIM : L4D003123

HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto

Awali harimu dengan berfikir

Mulailah menjadikan hari yang lebih baik

Jalanilah hari-harimu dengan senyuman yang optimis

*Yang kusayangi dan selalu kucintai :
Papa, Mama, Suami,
Abang, Kakak dan adik-adikku*

ABSTRAK

Daya tarik Kota Batam sebagai kota yang memiliki kemampuan aktual untuk berkembang dengan cepat melalui tumbuhnya berbagai kegiatan industri menarik pencari kerja yang berasal dari luar Pulau Batam. Kedatangan pencari kerja tersebut akhirnya tidak dapat lagi ditampung pada sektor formal sehingga berpindah ke sektor informal yaitu PKL dengan penempatan lokasinya berada disekitar kawasan Industri Muka Kuning dan Panbil Kota Batam.

Permasalahan kemudian timbul ketika tiada ruang yang disediakan untuk PKL beraktivitas, sehingga mereka cenderung menempati ruang publik yang mengganggu aktivitas orang dan kendaraan. Keberadaan PKL tersebut sebenarnya berpotensi dalam membentuk perekonomian kota namun dengan perkembangannya yang tidak terkendali, menyebabkan terjadinya lingkungan yang kumuh dan merusak wajah kota, sehingga diperlukan identifikasi pola ruang PKL berdasarkan karakteristik aktivitasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pola ruang tempat aktivitas usaha PKL di Kawasan Panbil berdasarkan karakteristiknya. Berdasarkan tujuan tersebut maka penelitian ini menggunakan analisis tabulasi silang yang dilakukan terhadap hasil penyebaran kuesioner dengan menggunakan metode sampling sehingga diperoleh 22 responden yang dianggap dapat mewakili.

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap responden didapatkan bahwa karakteristik sosial ekonomi PKL berasal dari luar Batam dengan tingkat pendidikan SMA dan telah lama bekerja sebagai PKL, sedangkan berdasarkan karakteristik aktivitasnya, konsumen pengguna jasa adalah pekerja industri dengan sifat pelayanan menetap. Sedangkan pola ruangnya menyebar dengan ruang trotoar dan bahu jalan sebagai ruang yang paling diminati. Penggunaan sarana fisik terbanyak adalah gerobak dengan barang dagangan bukan makanan. Untuk pengaturannya, PKL menyatakan bahwa lokasi yang paling mereka inginkan berada di pintu masuk.

Rekomendasi yang diusulkan dari penelitian ini adalah bahwa keberadaan PKL sebaiknya diakomodasikan dalam rencana tata ruang yang tepat, yaitu dapat berupa kebijakan-kebijakan yang memberikan insentif sehingga akan menarik pengelola dan PKL dapat juga dengan membuat jembatan penyeberangan yang dapat dimasukkan unsur PKL.

Kata kunci: pola ruang, karakteristik PKL, aktivitas PKL

ABSTRACT

The attraction of Batam city as a city that have ability to growth fast with many kind of industrial activities that attract workers from outside of Batam island. The arrival of the outside worker is overload in formal sector and make them turn to the informal sector that called hawkers with it location around Muka Kuning industrial area and Batam City Panbil.

The problems appear when no more rooms for hawkers activities, so they used the public places that disturb street activities. The existence of hawkers can help the economic growth of the city but because of the unrestrained growth that cause vile neighborhood and depraved the city's structure and it necessary to identified to hawkers characteristics and the location of hawkers activities in Panbil.

Brelated to that matters, thus this reason purposes to examine the space pattern of hawkers business activity place at Panbil area based on its characteristic. Based on the purpose above, this research uses cross tabulation analysis which is conducted on a spreaded questionnaire results and sampling method so that obtained 22 respondents that considered to representative.

Based on the analysis to the responden shows that the socio-economical characteristic of hawkers which is from outside Batam with its senior high school and has been worked as hawkers to long, where based on its activity characteristic, the consumer or service user is industrial worker with its permanent service characteristic. While its space pattern spreads out to pedestrian space and the road edge as the most desirabel space. The most phisical structur use is a chart., however with is merchant stuff, not food. Stuff. As it arrangement, hawkers states that the most desirabel spce is in the entrance gate.

Recommendatin that is supposed to this reaserch is that the existence of hawkers better to be accomodated in appropiate layout plan, kind of insentif policys attracting hawkers management and hawkers, also to make a bridge that it can accommodate hawkers.

Keywords : space pattern, hawkers characteristic, hawkers activity.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayahnya. Sehingga penulis dapat merampungkan tesis ini yang diberi judul *“Kajian Pola Ruang PKL dan Karakteristik Aktifitasnya di Kawasan Panbil Kota Batam”*.

Penulisan ini merupakan salah satu persyaratan dalam rangka menyusun tugas akhir pada Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang. Selesaiannya penyusunan tesis ini adalah berkat bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk data yang berupa buku kepustakaan maupun petunjuk didalam penulisan. Maka dalam kesempatan ini, penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof . Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA, selaku Ketua Program Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro.
2. Bapak Ir. Ragil Haryanto, MSP, selaku Pembimbing Utama.
3. Bapak Ir. Mardwi Rahdriawan, MT, selaku Pembimbing Pendamping.
4. Ibu Dra. Bitta Pigawati, MT dan Ibu Ir. Retno Widjajanti, MT selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat berguna bagi penyusunan tesis ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar dan staf di Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro.
5. Kedua orang tuaku tersayang, yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dan doa untuk penyelesaian tesis ini.
6. Suamiku “Mohamad Hendi, ST” tercinta, yang senantiasa mendoakan dan mengharapkan keberhasilanku.
7. Abang, Kakak dan Adik-adikku, untuk supportnya
8. Teman-teman seperjuangan di kelas (P’ Anwar, Ria, P’ Supri, P’ Ratno, P’ Edi, B’ Pudji, P’ Seno, P’ Ponco, P’ Abu, P’ Iman, P’ Yus) beserta teman-teman di kantor KIMPRAS Kota Batam atas semua bantuan dan pengertiannya.
9. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang dengan sukarela telah membantu dan memberikan dorongan sehingga tesis ini terselesaikan, terima kasih.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan yang membutuhkan banyak koreksi, sehingga saran dan kritik membangun yang diberikan akan sangat besar artinya bagi penyusun. Dan semoga penulisan Tesis ini memiliki manfaat terutama untuk penyusun dan kita semua.

Semarang, September 2005

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Sasaran	8
1.4 Ruang Lingkup	8
1.4.1 Ruang Lingkup Materi	8
1.4.2 Ruang Lingkup Spasial	9
1.4.3 Posisi Penelitian	11
1.5 Kerangka Pemikiran	13
1.6 Metodologi Penelitian	15
1.6.1 Pendekatan Studi	15
1.6.2 Metode Penelitian	16
1.6.2.1 Kebutuhan Data	16
1.6.2.2 Teknik Pengumpulan Data	17
1.6.2.3 Teknik Pengolahan dan Penyajian Data	18
1.6.2.4 Teknik Sampling	19
1.6.2.5 Teknik Analisis Data	21
1.7 Sistematika Penulisan	27
BAB II KAJIAN KARAKTERISTIK AKTIVITAS DAN RUANG USAHA PEDAGANG KAKI LIMA PADA PERKOTAAN	29
2.1 Karakteristik Pedagang Kaki Lima	29
2.1.1 Pedagang Kaki Lima Sebagai Bagian Dari Sektor Informal	29

2.1.2	Pengertian Pedagang Kaki Lima	33
2.1.3	Perilaku Pedagang Kaki Lima	34
	2.1.3.1 Karakteristik Aktivitas PKL	38
	2.1.3.2 Karakteristik Ruang	43
2.2	Tata Ruang Kota	46
	2.2.1 Ruang	46
	2.2.2 Tata Ruang	47
	2.2.3 Perencanaan Ruang	48
2.3	Pedagang Kaki Lima dan Ruang	50
	2.3.1 Unsur-Unsur Yang Terlibat Dalam Pemilihan Lokasi Aktivitas Kegiatan PKL	50
	2.3.2 Penentuan Rencana Penataan Lokasi Aktivitas Kegiatan PKL	54

BAB III	TINJAUAN KEBERADAAN PKL DI KAWASAN PANBIL KOTA BATAM	57
3.1	Gambaran Umum	57
	3.1.1 Letak Geografis	57
	3.1.2 Keadaan Kependudukan	57
	3.1.3 Sejarah Perkembangan Batam	59
3.2	Gambaran Kawasan Panbil Kota Batam	60
	3.2.1 Sejarah Perkembangan Kawasan Panbil Kota Batam	60
	3.2.2 Sejarah Perkembangan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Panbil Kota Batam	61
	3.2.3 Kondisi Eksisting Pedagang Kaki Lima di Kawasan Panbil Kota Batam	63
3.3	Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima	68
	3.3.1 Waktu Berdagang	68
	3.3.2 Jenis Dagangan	68
	3.3.3 Sarana Fisik Dagangan	68
	3.3.4 Golongan Pengguna Jasa	69
	3.3.5 Skala Pelayanan	70
	3.3.6 Sifat Pelayanan	70
3.4	Karakteristik Ruang Pedagang Kaki Lima	71
	3.4.1 Lokasi Pedagang Kaki Lima	71
	3.4.2 Pola Penyebaran Pedagang Kaki Lima	72
3.5	Aspek Normatif	73
	3.5.1 Kebijakan Tata Ruang Pengembangan Perdagangan Kota Batam	73
	3.5.2 Kebijakan Program Pengembangan Pedagang Kaki Lima Di Kota Batam	74

BAB IV	ANALISIS KARAKTERISTIK DAN PERILAKU PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN PANBIL KOTA BATAM	76
4.1	Karakteristik Pedagang Kaki Lima	76
4.1.1	Karakteristik Sosial Ekonomi	76
4.1.1.1	Daerah Asal	76
4.1.1.2	Tingkat Pendidikan	78
4.1.1.3	Status Pekerjaan	80
4.1.1.4	Lama Bekerja	82
4.1.2	Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima	83
4.1.2.1	Analisis Golongan Pengguna Jasa	83
4.1.2.2	Analisis Sifat Pelayanan	85
4.1.2.3	Analisis Jenis Dagangan	87
4.1.2.4	Analisis Sarana Fisik	89
4.2	Pola Ruang Pedagang Kaki Lima	93
4.2.1	Analisis Pola Penyebaran	93
4.2.1	Analisis Ruang Yang Digunakan	94
4.3	Analisis Pola Ruang Berdasarkan Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima	96
4.3.1	Analisis Ruang Berdasarkan Konsumen	96
4.3.2	Analisis Ruang Berdasarkan Sarana Fisik	98
4.3.3	Analisis Ruang Berdasarkan Sifat Pelayanan	98
4.3.4	Analisis Ruang Berdasarkan Jenis Dagangan	99
4.4	Analisis Penunjang Lokasi Tempat Aktivitas Pedagang Kaki Lima	101
4.5	Aspek Normatif	102
4.5.1	Analisis Persepsi Konsumen	103
4.5.2	Analisis Persepsi Pengelola Kawasan	104
4.5.3	Analisis Persepsi Instansi/Dinas	105
4.5.4	Analisis Perencanaan Ruang	106
4.6	Pola Ruang Aktivitas Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Karakteristik dan Aspek Normatif	108
4.7	Temuan-Temuan Studi	110
BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	113
5.1	Kesimpulan	113
5.2	Rekomendasi	114

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Posisi Penelitian	11
Tabel I.2	Data Yang Dianalisis	24
Tabel II.1	Perbedaan Sektor Formal dan Sektor Informal	30
Tabel III.1	Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2000 – 2002	57
Tabel IV.1	Analisis Daerah Asal PKL	76
Tabel IV.2	Analisis Tingkat Pendidikan	78
Tabel IV.3	Analisis Status Pekerjaan	81
Tabel IV.4	Analisis Lama Bekerja	82
Tabel IV.5	Analisis Golongan Pengguna Jasa	84
Tabel IV.6	Analisis Sifat Pelayanan	86
Tabel IV.7	Analisis Jenis Dagangan	87
Tabel IV.8	Analisis Sarana Fisik	90
Tabel IV.9	Analisis Ruang Aktivitas	94
Tabel IV.10	Tabulasi Silang Ruang yang Digunakan PKL dengan Konsumen ..	97
Tabel IV.11	Tabulasi Silang Ruang yang Digunakan PKL dengan Sarana Fisik	98
Tabel IV.12	Tabulasi Silang Ruang yang Digunakan PKL dengan Sifat Pelayanan	99
Tabel IV.13	Tabulasi Silang Ruang yang Digunakan PKL dengan Jenis Barang Dagangannya	100
Tabel IV.14	Analisis Lokasi Menurut Persepsi Konsumen	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Penggunaan Lahan	10
Gambar 1.2	Kerangka Pikir	14
Gambar 1.3	Kerangka Analisis	26
Gambar 2.1	Pola Penyebaran Mengelompok (Focus Agglomeration)	45
Gambar 2.2	Pola Penyebaran Memanjang (Linier Concentration)	46
Gambar 3.1	Jumlah dan Sebaran PKL	58
Gambar 3.2	Jenis Dagangan Berupa Makanan	65
Gambar 3.3	Jenis Dagangan Berupa Non Makanan	65
Gambar 3.4	Jenis Dagangan Berupa Jasa	65
Gambar 3.5	Sarana yang ditinggalkan PKL	66
Gambar 3.6	Sarana Dagang Berupa Kendaraan Roda 4 yang Diparkir	66
Gambar 3.7	Sarana Dagang Berupa Warung Semi Permanen	66
Gambar 3.8	Lokasi PKL di Trotoar Jalan	67
Gambar 3.9	Lokasi PKL di Pintu Masuk Muka Kuning	67
Gambar 3.10	Lokasi PKL di Bahun Jalan	67
Gambar 4.1	Golongan Pengguna Jasa	84
Gambar 4.2	Diagram Jenis Dagangan	87
Gambar 4.3	Diagram Sarana Fisik	90
Gambar 4.4	Lokasi Menurut Persepsi Konsumen	102

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbedaan pertumbuhan yang terjadi antara kota dan desa menjadi penarik (*pull factor*) bagi penduduk desa untuk berurbanisasi ke kota. Keadaan tersebut kemudian didukung dengan keberadaan sektor pertanian di perdesaan yang tidak lagi dapat menampung angkatan kerja yang terus meningkat. Sehingga berurbanisasi menjadi pilihan bagi mereka. Keterbatasan yang dimiliki Kota dalam menampung jumlah tenaga kerja migran dan kemudian terjadinya krisis ekonomi yang melanda dunia umumnya dan Indonesia khususnya telah menyebabkan tidak tertampungnya angkatan kerja migran dipertanian.

Berkepanjangannya krisis tersebut menyebabkan banyaknya perusahaan-perusahaan yang bangkrut dan gulung tikar, sehingga mengakibatkan mereka harus mengambil kebijaksanaan melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya. Menurut laporan Bank Dunia (*World Bank*) angka pengangguran Indonesia yang sebesar 20 % pada tahun 1997 dari seluruh angkatan kerja kemudian bertambah menjadi 45 % pada pertengahan tahun 1999. Akibat dari semakin banyaknya angka pengangguran tersebut adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin yang pada tahun 1997 berjumlah 20 juta penduduk meningkat menjadi 40 juta penduduk pada pertengahan tahun 1999.

Sulitnya mencari pekerjaan terutama pada sektor formal mengakibatkan sebagian dari mereka mulai berwiraswasta dengan menciptakan pekerjaan untuk diri sendiri pada sektor informal (Hidayat, 1985:4). Perbedaan yang amat

mendasar antara sektor formal dan informal dalam menciptakan lapangan pekerjaan menjadikan sektor informal dapat berkembang dengan lebih cepat, khususnya diperkotaan. Terbukanya kesempatan bekerja disektor informal dikarenakan permintaan tenaga kerja tidak terbatas, sehingga setiap orang dimungkinkan dapat memanfaatkan kegiatan ini. Sedangkan disektor formal kesempatan kerja tercipta karena adanya kenaikan permintaan barang dan jasa, yang besar dan kecilnya tergantung pada elatisitas pemakaian teknologi (Todaro, 1980:1-2).

Sedangkan PKL menurut Ramli (1992:31), adalah pekerjaan yang paling nyata dan paling penting dikebanyakan kota di negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya, begitu pentingnya dan khas dalam sektor informal menyebabkan istilah sektor informal sering diidentikkan dengan pekerjaan yang dilakukan PKL. Kegiatan tersebut dipilih karena merupakan kegiatan ekonomi yang mudah dimasuki, tidak memerlukan ketrampilan dan pendidikan tertentu, sangat fleksibel dalam waktu dan tempat serta tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. Sektor informal terutama PKL menyeruak ke permukaan karena sektor formal tidak memberikan ruang lingkup yang cukup sehingga ekonomi berlangsung di luar sektor yang terorganisir.

PKL diperkotaan dapat berkembang dengan lebih cepat dikarenakan keragaman yang terdapat diperkotaan. Keragaman tersebut dapat dilihat dari tingkat pendidikan, tingkat keterampilan dan lain-lain yang pada akhirnya akan menyebabkan keragaman pula pada tingkat penghasilan diperkotaan. Dalam memenuhi kebutuhannya juga memerlukan ragam pasar mulai dari tingkat atas,

menengah dan bawah. Sehingga keberagaman tingkat pasar tersebut memiliki pelanggan tersendiri. Hal tersebut menurut Djojodipura (1992:41), disebutkan bahwa luas pasar dapat ditentukan oleh tiga unsur yaitu : *pertama* jumlah penduduk, *kedua* pendapatan perkapita, dan *ketiga* distribusi pendapatan.

Keberadaan PKL dalam perkembangannya dirasakan menjadi dilema bagi ruang perkotaan yaitu sebagai salah satu pencetus ketidakteraturan, ketidaktertiban, dan ketidakindahan kota. Pelaku sektor informal terutama PKL sering dianggap melanggar aturan oleh pemerintah, karena sifatnya yang ilegal. Sementara pemerintah menginginkan kota segalanya berbentuk formal, serba tercatat, seperti yang ditulis Kostof (dalam Widodo, 2000:4) *cities are places that rely written record.*

Keberadaan PKL bagi pemerintah merupakan suatu kondisi yang dilematis, ada dua sisi yang saling berseberangan dalam mengkaji fenomena sektor informal ini. Disatu sisi keberadaan PKL sangat dibutuhkan oleh masyarakat ekonomi lemah dan ikut membantu masyarakat ekonomi menengah. Disisi lain keberadaan PKL tersebut mengakibatkan timbulnya lingkungan-lingkungan yang secara visual menjadi berkesan buruk, tidak teratur, tidak tertib dan tidak indah yang mana kesan ini ditunjukkan dari adanya penempatan sarana perdagangan yang tidak teratur. Kesan tersebut akhirnya dapat menurunkan fungsi ruang kota baik yang bersifat umum seperti taman-taman, trotoar jalan, maupun yang bersifat pribadi seperti kantor dan rumah. Menurunnya fungsi ini ditunjukkan dengan adanya pergeseran fungsi ruang yang semula bersifat sebagai ruang publik berubah menjadi fungsi PKL. Tata ruang kota yang telah

direncanakan pada akhirnya sama sekali tidak dapat ditampilkan. Hal ini terjadi karena memang PKL belum mendapatkan tempat pada kebijakan tata ruang kota.

Pihak pemerintah selaku pengelola kota hingga saat ini belum menemukan pemecahan yang tepat bagi permasalahan PKL tersebut. Berbagai produk perencanaan tata ruang belum mempertimbangkan keberadaan dan kebutuhan ruang untuk mengantisipasi dan menyediakan lokasi dan tempat aktivitas usaha yang tepat dan memadai untuk kegiatannya. Dengan perencanaan tata ruang yang hanya menyediakan lokasi dan tempat aktivitas usaha pada sektor formal berakibat pada PKL yang selalu berusaha merebut ruang-ruang publik untuk menjalankan kegiatannya.

Permasalahan diatas juga terjadi di Kota Batam. Kota yang perkembangan awalnya sangat dipengaruhi oleh kedekatan geografisnya dengan Singapura dan Malaysia, sehingga memiliki potensi dan kemampuan aktual untuk berkembang dengan cepat. Dalam perkembangannya permasalahan PKL telah mengganggu rona Kota Batam karena kehadiran PKL mau atau tidak mau merupakan bagian dari elemen pembentuk ruang kota. PKL saat ini telah menempati ruang-ruang di Kota Batam, misalnya saja di sekitar Kawasan Jodoh, sekitar Kawasan Panbil, sekitar Kawasan Nagoya dan kawasan-kawasan lainnya. Perkembangan PKL disekitar Kawasan Panbil telah berkembang dengan pesatnya, dengan konsentrasi kegiatan pada bidang perindustrian, perdagangan, jasa dan perumahan memunculkan kegiatan PKL yang terdapat pada sepanjang jalan.

Dipilihnya Kawasan Panbil dalam studi ini, didasarkan atas beberapa alasan, yaitu :

1. Merupakan kawasan yang dijadikan prioritas dalam penataan/perbaikan lingkungan kota oleh Pemerintah Kota Batam.
2. Merupakan lokasi terkonsentrasinya sebagian besar dari PKL di Kota Batam.
3. Menampung beberapa aktivitas kota yaitu kegiatan perdagangan, industri, jasa dan perumahan.
4. Keberadaan PKL yang terintegrasi dengan kegiatan masyarakat telah menunjukkan gejala gangguan baik secara fungsional maupun visual.

Alasan keberadaan tersebut pada awalnya dipengaruhi oleh tumbuhnya berbagai industri yang ada dikawasan Muka Kuning. Dalam memenuhi kebutuhannya maka dibangunlah tempat tinggal untuk karyawan yang disebut dengan dormitori, namun dikarenakan penambahan dormitori tidak sebanding dengan pertambahan tenaga kerja dan tidak semua perusahaan industri memiliki dormitori sendiri berakibat pada mahalnya sewa dormitori, sedangkan untuk menyewa pada perumahan yang berada disekitar kawasan tersebut tidaklah mungkin dikarenakan harga sewanya lebih mahal dari dormitori dan akhirnya sebagian pekerja pindah ke lokasi yang berada disekitar Muka Kuning. Perkembangan tenaga kerja kemudian memerlukan berbagai pemenuhan kebutuhannya. Dengan adanya kesempatan tersebut digunakan oleh pedagang, terutama PKL untuk melakukan usahanya. Perkembangannya kemudian lebih cenderung menempati ruang-ruang publik yang tidak sesuai bagi mereka yang dapat dilihat dari pemilihan ruang yang berdekatan dengan keramaian yaitu menempati seperti trotoar sebagai tempat pejalan kaki, bahu jalan sebagai tempat parkir dan median jalan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kemacetan lalu

lintas di ruas jalan tersebut, karena trotoar jalan dan bahu jalan telah dipenuhi dengan kios dan tenda yang tidak teratur dan tidak bersih. Keadaan tersebut diperparah lagi dengan keberadaan pembeli dan pejalan kaki yang bercampur sehingga mengakibatkan terjadinya kemacetan lalu lintas dari dan menuju jalan tersebut.

Perkembangan PKL semakin tumbuh pesat seiring dengan banyaknya pengunjung yang singgah dan berada di kawasan tersebut. Penempatan kios-kios PKL selain menempati ruang publik dan pribadi juga menurunkan kualitas lingkungan fisik kawasan sekitarnya. Karena penampilan kios dan tenda yang cenderung kumuh dengan kondisi yang relatif sederhana berupa dinding-dinding tempat menyandarkan kios, telah mengganggu keindahan dan keunikan penampilan kawasan secara menyeluruh.

Pemerintah Kota Batam telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengambil berbagai tindakan seperti memindahkan kegiatan PKL ke lokasi lain. Kegiatan pemindahan PKL dirasakan oleh para pedagang tidak sesuai dengan karakter dan tuntutan ruang pedagang. Padahal berdasarkan hasil penelitian terhadap keberadaan PKL di kota-kota besar di Asia Tenggara (Jakarta, Bandung, Kuala Lumpur, Manila), terdapat perbedaan kebutuhan lokasi antara kelompok pedagang dengan jenis komoditas yang berbeda (Mc.Gee and Yeung, 1977). Sedangkan lokasi baru tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai lokasi bagi aktivitas PKL.

Akhirnya PKL yang diberi lokasi pemindahan kembali pindah ke lokasi yang lama (Kompas, 5 Juni 2001) dengan mengambil ruang-ruang publik.

Terlepas dari sisi negatif yang ditimbulkan PKL, dengan adanya perkembangan sosial ekonomi Kota Batam yang diiringi oleh perkembangan sektor informal maka sudah selayaknya perencana kota memberikan porsi yang lebih bagi PKL dalam perencanaan tata ruang kota. Perencanaan tata ruang kota perlu memikirkan dan membuat kebijakan untuk mengelola PKL menjadi salah satu elemen dalam ruang kota. Sehingga dapat menghindari adanya konflik antara pemerintah, PKL dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut diatas peneliti tertarik untuk mengkaji ruang tempat aktivitas usaha PKL sehingga kajian ini nantinya diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Batam dalam mengambil kebijakan dalam mengatasi sektor informal khususnya PKL di Kawasan Panbil Kota Batam.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, terdapat permasalahan yang perlu dikaji dalam penempatan aktivitas usaha PKL terhadap ruang kota yang terdapat di Kawasan Panbil Kota Batam. Pertumbuhan PKL yang tidak terkendali dan menempati ruang-ruang publik secara illegal menyebabkan ketidaknyamanan para pengguna jalan namun di sisi lain ruang publik tersebut merupakan ruang yang dirasa paling representatif (bagi penjual maupun pembeli) untuk melakukan aktivitas jual beli. Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka pertanyaan penelitian ini adalah *“Bagaimana hubungan antara pola ruang aktivitas berdasarkan karakteristik PKL dan aspek normatif di Kawasan Panbil Kota Batam?”*

1.3 Tujuan dan Sasaran Studi

Tujuan penelitian adalah mengkaji hubungan antara pola ruang aktivitas PKL di Kawasan Panbil Kota Batam berdasarkan karakteristiknya dan aspek normatif. Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi karakteristik PKL di Kawasan Panbil.
2. Mengidentifikasi pola ruang aktivitas PKL di Kawasan Panbil.
3. Mengidentifikasi fungsi ruang berdasarkan aspek normatif berupa kebijakan dan persepsi konsumen, instansi, dan pengelola kawasan.
4. Menganalisis pola ruang aktivitas berdasarkan karakteristik PKL dan pertimbangan aspek normatif
5. Membuat kesimpulan dan rekomendasi pola ruang aktivitas PKL di Kawasan Panbil

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Ruang Lingkup Materi

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka dalam studi ini akan menelaah hal-hal sebagai berikut :

a. Karakteristik aktivitas PKL

Menelaah pola pelayanan PKL yang terdiri dari golongan pengguna jasa, skala pelayanan dan sifat pelayanan.

Menelaah waktu berdagang, jenis dagangan dan sarana fisik.

b. Karakteristik pola ruang PKL

Menelaah pola penyebaran dan ruang yang digunakan PKL untuk beraktivitas.

c. Aspek normatif PKL

Menelaah persepsi konsumen, instansi/dinas dan pengelola kawasan terhadap aktivitas PKL dan pola ruang PKL.


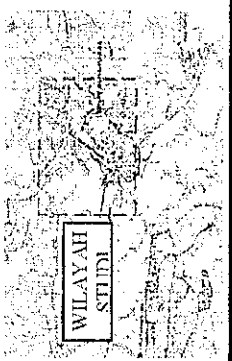




Menelaah produk hukum di Kota Batam yang berupa kebijakan tata ruang, peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya.

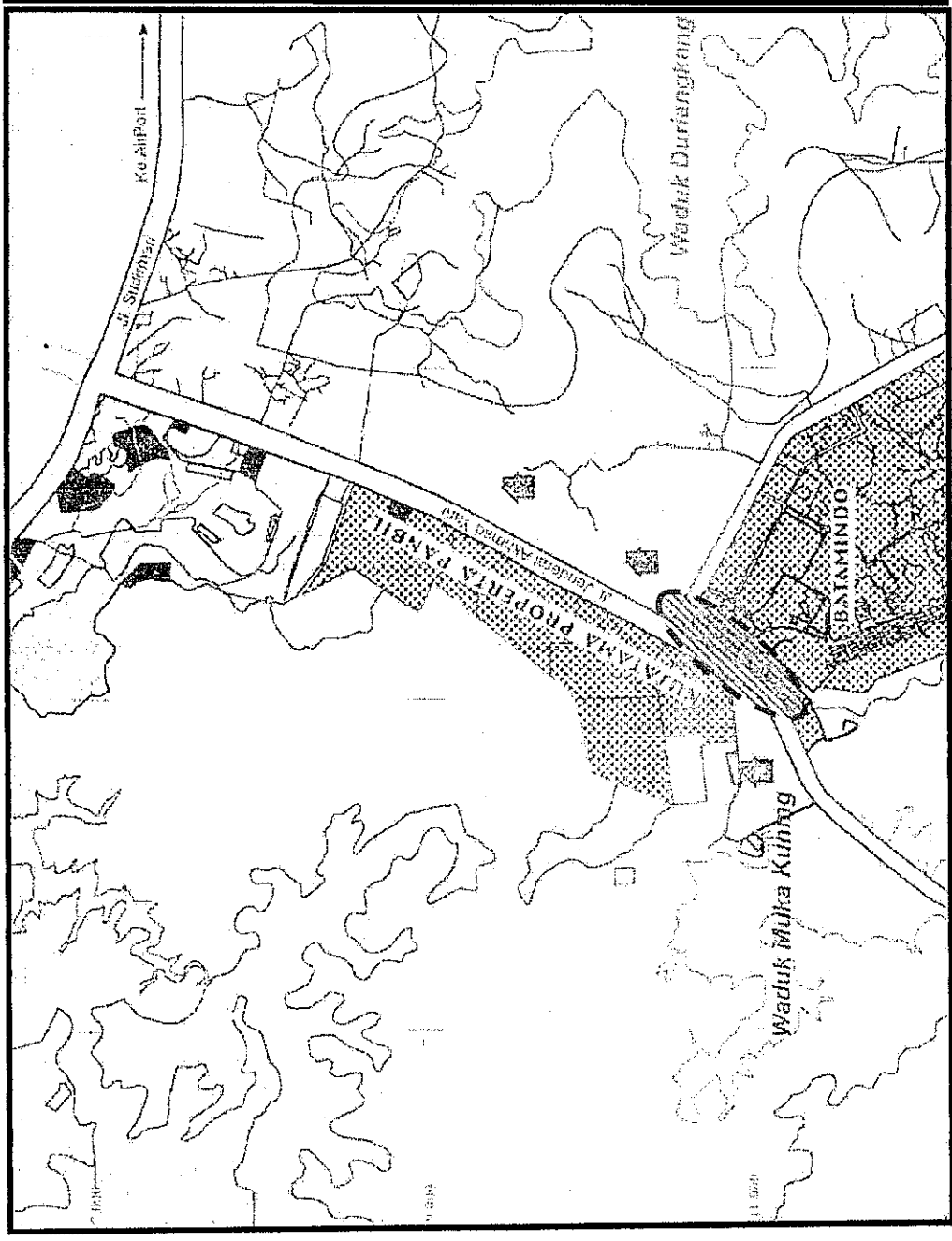
1.4.2 Ruang Lingkup Spasial

Secara spasial ruang lingkup studi ini difokuskan kepada PKL yang berada di Kecamatan Sei Beduk, Kelurahan Muka Kuning yaitu berada di antara kegiatan Kawasan Perdagangan Panbil dan di depan Kawasan Industri Muka Kuning, selanjutnya disebut dengan Kawasan Panbil. PKL yang dipilih tersebut merupakan pedagang yang berjualan di trotoar jalan, badan jalan dan median jalan, dengan objek studi sebagai berikut :

1. Kawasan Perdagangan Panbil yaitu berada di sepanjang depan Kawasan Perdagangan Panbil yaitu berada di sepanjang jalan Jendral Ahmad Yani menuju ke Batam Center.
2. Kawasan Industri Muka Kuning yaitu berada di sepanjang Gedung Kawasan Industri Muka Kuning (Batamindo) yaitu berada di sepanjang jalan Jendral Ahmad Yani yang menuju ke Batu Aji.
3. Median jalan jendral Jendral Ahmad Yani

Untuk lebih jelasnya wilayah studi dapat dilihat pada gambar 1.1

MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO	
KAJIAN POLA RUANG BERDASARKAN KARAKTERISTIK AKTIVITAS PKL DI KAWASAN PANBIL KOTA BATAM	
PETA FUNGSI LAHAN	
FUNGSI KAWASAN :	
 : INDUSTRI	
 : JASA	
 : WADUKSUNGAI	
 : KAWASAN STUDI	
	0 4000 8000
GAMBAR 1.1	SUMBER: LAPORAN AMDAL KAWASAN INDUSTRI PANBIL DAN OBSERVASI LAPANGAN, 2003



1.4.3 Posisi Penelitian

Untuk menghindari terjadinya penjiplakan dalam penulisan tesis maka dibuatkan posisi penelitian studi terhadap kajian lainnya yang sejenis. Untuk lebih jelasnya posisi tersebut dapat dilihat pada tabel I.1

TABEL I.1
POSISI PENELITIAN

NO	JUDUL	METODE	HASIL
1.	Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi usaha PKL (studi kasus : Kota Semarang), Ahmad Widodo, 2000	Analisis deskriptif dan korelasi bivariat	Faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi PKL terdiri dari hubungan pemilihan lokasi yang dekat keramaian akan signifikan dengan karakteristik PKL. sedangkan hubungan pemilihan kemudahan angkutan sangat signifikan dengan modal
2.	Pengaruh keberadaan PKL terhadap kualitas lingkungan fisik kawasan Monumen Perjuangan 45 Surakarta, Sudewa, 2001	Analisis kualitatif	Keberadaan PKL terhadap lingkungan fisik kawasan yang difokuskan kepada tata guna lahan dan bangunan, infrastruktur dan transportasi telah menyebabkan konflik kepentingan dengan sektor formal sehingga diberikan rekomendasi menentukan standar umum (plaza) untuk menampung kegiatan PKL
3.	Kajian kebijakan penataan aktivitas PKL di pusat Kota Manado, Joksen Thomas Tontey, 2003	Deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan distribusi frekwensi	Kebijakan penatan PKL memerlukan produk hukum yang dapat mengakomodir keberadaan PKL sehingga dapat diatur mengenai perizinannya, pemungutan retribusi serta sangkinya

Lanjutan Tabel

NO	JUDUL	METODE	HASIL
4.	Evaluasi kinerja kebijakan pengelolaan PKL di Kota Magelang, Kuku Sari Pamungkas, 2003	Proses hierarki analitik dan metode deskriptif	Kebijakan yang dilakukan pemerintah tentang PKL tidak sesuai dengan harapan pemerintah, sehingga diperlukan evaluasi untuk menganalisa kebijakan tersebut. Didapatkan kesimpulan bahwa harus dibuatkan kebijakan secara terpadu dengan proses perencanaan yang aspiratif dan partisipatif serta penyusunan peraturan baru yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini
5.	Kajian arahan pengembangan ruang publik oleh aktivitas PKL di Kawasan Stadion Manahan Kota Surakarta, Doddy Chamdany, 2004	Proses hierarki analitik dan metode deskriptif	Perkembangan PKL di ruang publik dengan penampilan yang sederhana menimbulkan kesan kumuh kepada lingkungan, sehingga diperlukan pedoman/arahan guna menata dan mengatur serta mengendalikan aktivitas PKL tersebut melalui penyusunan karakteristik aktivitas PKL, aspek visual dan prasarana pendukung
6.	Kajian pola ruang PKL dan karakteristik aktivitasnya di Kawasan Panbil Kota Batam, Yanivirzal Dwiyantri, 2005	Deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan crosstab	Berkurangnya lapangan kerja pada sektor formal mengakibatkan menjamurnya sektor informal terutama PKL di Kawasan Panbil. Permasalahan kemudian muncul ketika tidak ada ruang yang disediakan untuk PKL beraktivitas, sehingga perlu dikaji pola ruang aktivitas berdasarkan karakteristik PKL dan aspek normatif

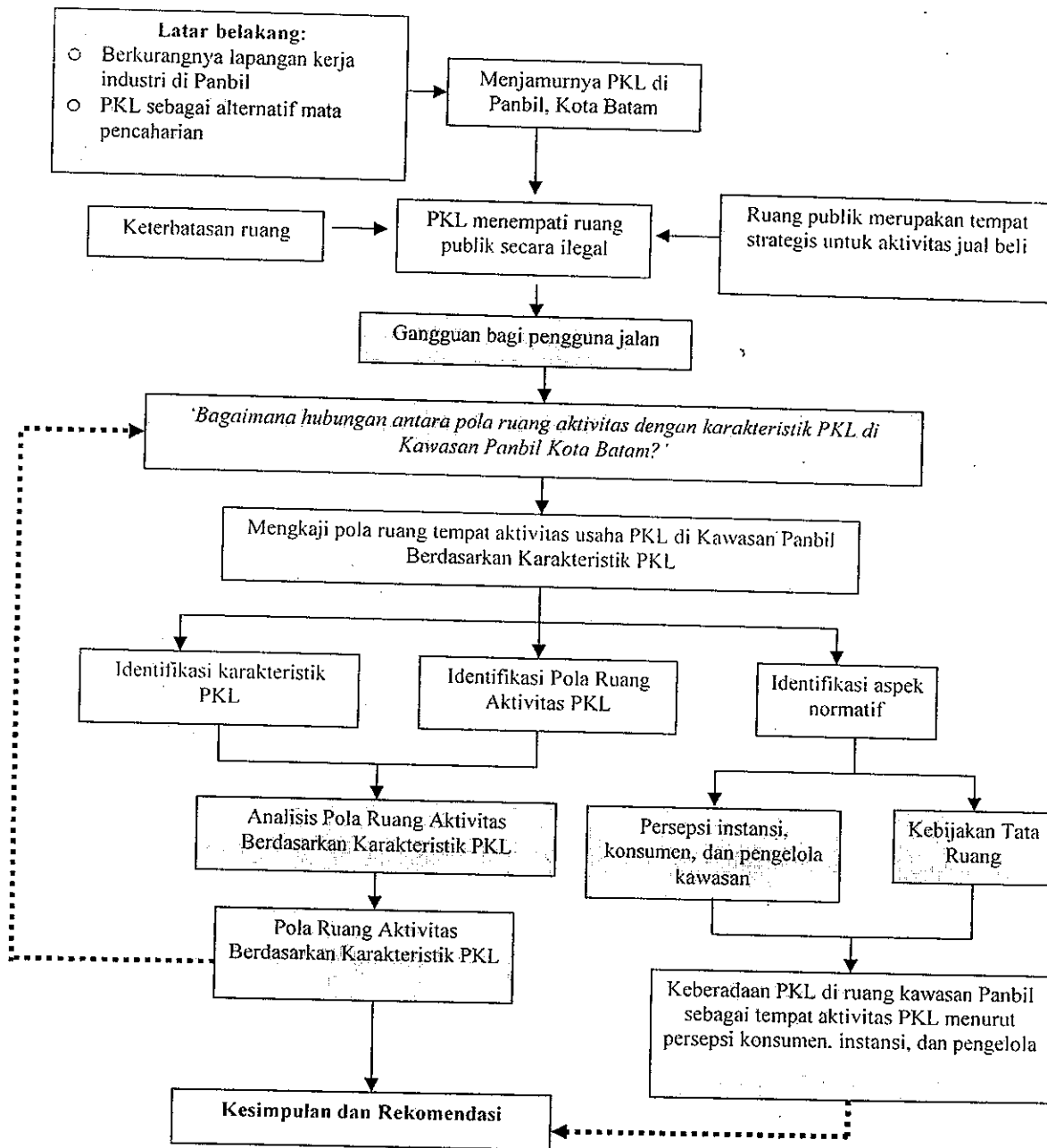
Sumber : Penelitian, 2005

1.5 Kerangka Pemikiran

Berkurangnya lapangan kerja di kawasan industri Kawasan Panbil menyebabkan munculnya PKL sebagai alternatif mata pencaharian hingga akhirnya keberadaannya menjamur di kawasan ini. Karena adanya keterbatasan ruang maka PKL kemudian menempati ruang-ruang publik karena ruang-ruang tersebut seakan tidak “bertuan” dan digunakan oleh banyak orang sehingga menjadi salah satu tempat strategis untuk aktivitas jual beli.

Namun perkembangan ini memiliki dua sisi yang bertolak belakang, di satu sisi dapat menguntungkan di sisi lain juga dapat merugikan. Persoalan menjadi semakin bertambah karena pola perdagangan PKL cenderung mencari lokasi-lokasi strategis yang berdekatan dengan konsumen dan pada akhirnya menimbulkan lingkungan yang secara visual berkesan buruk, tidak teratur, tidak tertib dan tidak indah yang dapat dilihat dari penempatan sarana perdagangannya yang tidak teratur. Oleh karena itu dirumuskan pertanyaan penelitian untuk mengetahui bagaimana hubungan antara pola ruang PKL dan karakteristik aktivitsnya di Kawasan Panbil Kota Batam. Untuk mencapai tujuan yaitu mengkaji pola ruang tempat aktivitas usaha PKL di Kawasan Panbil berdasarkan karakteristik PKL dilakukan identifikasi dan analisis karakteristik PKL yang terdiri dari karakteristik sosial ekonomi dan karakteristik aktivits PKL, pola ruang aktivitas PKL, pola ruang PKL berdasarkan karakteristik aktivits PKL dan pola ruang PKL berdasarkan karakteristik PKL dan aspek normatif.

Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka pikir rencana ruang tempat aktivitas usaha PKL di Kawasan Panbil dapat dilihat pada gambar 1.2.



GAMBAR 1.2
KERANGKA PIKIR KAJIAN POLA RUANG PKL DAN KARAKTERISTIK AKTIVITASNYA
DI KAWASAN PANBIL KOTA BATAM

Sumber: Peneliti, 2005

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Pendekatan Studi

Pendekatan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu deskriptif analisis yang terdiri dari deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Pendekatan deskriptif disebut sebagai penelitian *survai*, merupakan penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Penelitian dengan menggunakan pendekatan ini dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu (Singarimbun dan Effendi, 1995:3 – 4).

Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk mendapatkan gambaran komponen pengaturan aktivitas PKL berupa golongan pengguna jasa, sifat pelayanan, jenis dagangan, sarana fisik dan pola ruang PKL yang terdiri dari pola penyebaran dan ruang yang digunakan, persepsi konsumen, pengelola kawasan, pemerintah dan perencanaan ruang, penunjang lokasi tempat aktivitas PKL dan pola ruang aktivitas PKL berdasarkan karakteristik PKL dan aspek normatif. Sedangkan pendekatan deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengetahui pola ruang berdasarkan karakteristik PKL. Sesuai dengan cirinya, metode deskriptif diawali dengan pengumpulan data (yang berasal dari survey, angket, observasi, wawancara, studi kasus dan lain-lain) penyusunan, penjelasan dan kemudian menganalisis (Surakhmad, 1980:139-140). Selanjutnya data yang dianalisis berupa analisis deskriptif kuantitatif kemudian dilakukan analisis tabulasi silang (*crosstab tabulation*) dan dikaji dengan pendekatan pustaka untuk memperoleh jawaban permasalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

1.6.2 Metode Penelitian

1.6.2.1 Kebutuhan Data

Agar penelitian studi mendapatkan data-data yang lebih akurat, maka dalam penulisan ini dilakukan penelitian dengan menggunakan 3 (tiga) jenis data yaitu :

1. Penyebaran kuesioner atau wawancara langsung menggunakan kuesioner yang diajukan kepada responden. Pertanyaan dalam kuesioner tersebut dapat berupa pertanyaan terbuka maupun pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka berisi pertanyaan yang dapat secara bebas dijawab oleh responden, sedangkan pertanyaan tertutup berisi pertanyaan yang harus dijawab oleh responden dengan memilih alternatif jawaban yang telah disediakan.
2. *Observasi* atau pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi PKL dimana lokasi dan tempat aktivitas usahanya di Kawasan Panbil. Hasil ini selain ditulis secara deskriptif juga direkam dengan kamera foto.
3. *Dokumentasi*, yaitu digunakan untuk mempelajari dan mencatat arsip-arsip atau data-data yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang akan diteliti.

Data berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi data primer dan data sekunder (Marzuki, 2002:55–56). Data primer dan data sekunder yang dihimpun berasal dari para pelaku yang terlibat dalam kegiatan PKL dan program pengelolaan kebijakan PKL yang ada di Kota Batam.

1. Data Primer, dalam penelitian merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber atau responden dengan cara menyebar kuesioner atau melakukan wawancara langsung dengan panduan kuesioner.

2. Data Sekunder, merupakan data yang bersumber dari literatur, *text book*, referensi dan informasi yang didokumentasi oleh instansi/dinas. Data sekunder diambil dengan menyalin atau mengutip data dalam bentuk yang sudah jadi. Data tersebut berupa gambaran umum wilayah Kota Batam, produk tata ruang, peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan PKL, teori dan kajian yang berkaitan dengan pengaturan fisik dan aktivitas PKL.

1.6.2.2 Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data ini berasal dari dokumentasi yang berupa literatur, *text book*, data statistik, buku laporan, dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penelitian PKL.

2. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data ini berasal dari kuesioner atau wawancara dan observasi lapangan dengan cara penyebaran kuesioner kepada responden yang dapat mewakili secara keseluruhan. Penyebaran kuesioner atau wawancara dilakukan terhadap sampel yang merupakan objek penelitian yang terdiri dari *kesatu* PKL yang berada disekitar Kawasan Panbil, yaitu pedagang yang berjualan ditempat umum, seperti di trotoar jalan, bahu jalan dan median jalan. *Kedua* Konsumen yaitu masyarakat sebagai konsumen PKL maupun pengguna jalan, *ketiga* instansi/dinas dan pengelola kawasan yang terdiri dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota (Bappedako), Dinas Pasar dan Kebersihan, Dinas Perhubungan dan Pengelola Kawasan.

Sedangkan pengumpulan data primer dengan cara observasi lapangan atau pengamatan, selain ditulis deskriptif mengenai aktivitas yang terjadi, juga direkam dengan menggunakan kamera foto mengenai gambaran PKL di Kawasan Panbil Kota Batam.

Data primer yang akan diperoleh berupa keterangan dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Pengumpulan data dengan cara ini disebut dengan metode kuesioner (*questioner methode*).

1.6.2.3 Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Teknik pengolahan data baik berupa data primer dan data sekunder yang dikumpulkan, dipilah-pilah sesuai variabel dan karakteristik datanya. Karena data yang diperoleh tersebut masih berupa data mentah agar dapat lebih berguna bagi penelitian ini harus dilakukan pengolahan data. Tahap-tahap pengolahan data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. *Editing*, merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap data yang masuk apakah terdapat kekeliruan dalam pengisian atau kurang lengkap, palsu, tidak sesuai dan sebagainya. *Editing* dilakukan dengan harapan akan diperoleh data yang *valid* dan *reliabel*, serta dapat dipertanggungjawabkan.
2. *Coding*, merupakan proses pemberian tanda, simbol ataupun kode pada setiap data yang termasuk dalam kelompok yang sama. Tanda tersebut dapat berupa angka atau huruf.
3. *Tabulating*, merupakan tahap memasukkan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya. Penyajian data primer dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk tabel distribusi, tabel silang, gambar

dan grafik. Sedangkan data sekunder tidak diperlukan pengolahan lebih lanjut namun disajikan secara sistematis disesuaikan dengan analisis yang dilakukan.

1.6.2.4 Teknik Sampling

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah PKL yang berada di Kawasan Panbil Kota Batam. Teknik sampling yang akan dipergunakan adalah *stratified random sampling*, yaitu pengambilan sampel secara sengaja yang didasari bahwa sampel dimaksud representatif atau mewakili populasi dan dilakukan dengan membagi strata (Soehartono, 2000: 16). Pengambilan sampel menurut Arikunto (1993: 107), untuk penelitian deskriptif adalah 5 – 10% dari jumlah populasi. Sehingga untuk penelitian ini agar proposional teknik pemilihan sampel adalah atas dasar jumlah PKL pada jumlah ruas-ruas jalan sebanyak 10% dari jumlah populasi pada lokasi yang telah ditentukan.

Masing-masing pengambilan jumlah sampel yang akan dipergunakan untuk setiap objek dalam studi ini adalah sebagai berikut :

1. *Sampling* PKL

Dalam penentuan jumlah sampel tersebut bagi PKL dipakai formulasi dari Slovin (Sevilla, 1993:161) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan : n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Derajat kecermatan

Jenis sampel dagangan :

- a. Makanan meliputi : makanan kecil, minuman, makanan olahan, lauk pauk, mie bakso/ayam, buah-buahan dan sembako
- b. Bukan makanan meliputi : pakaian, sepatu/sandal, tas, kaos kaki, alat rumah tangga, aksesoris, handphone dan gorden
- c. Jasa meliputi : tambal ban/isi gas, tukang jahit reparasi dan bengkel.

2. *Sampling* Pemerintah dan Pengelola Kawasan

Untuk *sampling* ini dipilih narasumber yang menangani dan mengetahui PKL. Selanjutnya menurut Arikunto (1993:113), pengambilan narasumber dilakukan dengan cara pengambilan subjek berdasarkan tujuan tertentu dan dilakukan berdasarkan pertimbangan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya. Oleh sebab itu ditetapkan instansi/dinas adalah instansi/dinas yang berada dilingkungan Pemerintah Kota Batam yang terdiri dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota (Bappedako), Dinas Pasar dan Kebersihan, Dinas Perhubungan dan Pengelola Kawasan.

3. *Sampling* Konsumen

Merupakan *sampling* masyarakat sebagai konsumen (pembeli) yang melakukan transaksi dengan PKL. Karena tidak terdapat data mengenai jumlah konsumen yang melakukan transaksi dengan PKL, maka populasi ini dianggap sebagai populasi tak terhingga, sehingga tidak mungkin memberikan nilai probabilitas terhadap setiap konsumen. Oleh karena itu pengambilan sampel konsumen dilakukan secara *accidental sampling*, yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan dimana terjadi konsentrasi tinggi pembeli PKL.

tertentu pada pada setiap kategori lokasi dan tempat aktivitas usaha pedagang. Menurut Nawawi (2001:156), dalam pengambilan sampel dengan *accidental sampling*, jumlah sampel tidak ditetapkan terlebih dahulu. Data dikumpulkan dari unit *sampling* konsumen yang dijumpai dan setelah data dirasakan cukup maka pencarian sampel dihentikan.

1.6.2.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara analisis kuantitatif dan didukung oleh analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis keadaan objek penelitian melalui penjelasan-penjelasan yang *logis* didasarkan pada teori yang sesuai dan menggambarkan fenomena yang terjadi dikawasan studi berupa gambaran yang tidak dapat dijelaskan dengan angka-angka ataupun perhitungan-perhitungan. Penekanan analisis ini adalah pada ketajaman dan kepekaan berfikir dalam mengkaji suatu permasalahan ataupun kecenderungan yang terjadi dilapangan. Untuk memudahkan analisis, disajikan alat berupa data yang diambil dari instansi/dinas terkait serta kajian literatur. Sedangkan analisis kuantitatif yang akan dipergunakan dalam penelitian ini secara umum menggunakan tabel distribusi frekwensi dan analisis tabulasi silang (*cross tabulation*).

a. Teknik Analisis Distribusi Frekwensi

Teknik analisis dengan *distribusi frekwensi* digunakan untuk menggambarkan karakteristik aktivitas PKL, baik karakteristiknya secara umum maupun karakteristik lokasi dan tempat aktivitasnya usahanya, serta persepsi dan preferensi mereka terhadap lokasi dan tempat aktivitasnya usaha. Teknik ini juga

digunakan untuk menggambarkan karakteristik sosial ekonomi PKL, karakteristik aktivitas PKL dan karakteristik PKL, persepsi masyarakat dan instansi/dinas terkait terhadap ruang tempat aktivitasnya usaha PKL.

Untuk mengetahui ruang tempat aktivitas usaha yang diminati PKL untuk melakukan kegiatan, faktor-faktor yang mempengaruhi, persepsi konsumen, instansi/dinas dan pengelola kawasan dilakukan dengan mengidentifikasi :

1. Karakteristik PKL, yaitu untuk mengetahui gambaran PKL yang menjadi objek penelitian secara umum, pola penyebaran, pola pelayanan berupa golongan pengguna jasa, dan sifat pelayanan.
2. Lokasi dan tempat aktivitas usaha PKL, meliputi jenis lokasi dan tempat aktivitas usaha yang diminatinya (trotoar, sepanjang tepi jalan dan taman kota) dan status lokasi dan tempat aktivitas usaha yang digunakan (*privat/umum*) untuk mengetahui karakteristik lokasi dan tempat aktivitas usaha PKL dalam menjalankan kegiatannya.
3. Persepsi PKL terhadap lokasi dan tempat aktivitas usaha, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan aktivitas kegiatan. Identifikasi meliputi aspek lokasi terdiri dari alasan pemilihan lokasi, keuntungan dan kerugian lokasi saat ini dan aspek lingkungan tempat lokasi dan aktivitas usaha yang terdiri dari keamanan, kenyamanan, kebersihan dan prospek konsumen..
4. Persepsi konsumen dan instansi/dinas serta pengelola kawasan terhadap lokasi dan tempat aktivitas usaha. Dilakukan untuk mengetahui pengaruh adanya

aktivitas PKL, meliputi segi keamanan, kenyamanan dan dampak lingkungan yang muncul.

5. Aspek normatif yang berlaku yang berkaitan dengan keberadaan PKL, meliputi kebijakan tata ruang, peraturan daerah, dan peraturan-peraturan lain yang terkait di Kota Batam.

Variabel-variabel tersebut yang masih merupakan data mentah kemudian disusun dalam bentuk tabel distribusi frekwensi untuk memudahkan analisis selanjutnya.

b. Teknis Analisis Tabulasi Silang (*Cross Tabulation*)

Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui keterkaitan variabel-variabel penelitian, sehingga dapat diketahui hubungan antara variable-variabel tersebut. Dalam analisis tabulasi silang data-data setiap variabel dikelompokkan dalam beberapa kategori, dimana dari setiap kategori tersebut diberi skor untuk mempermudah perhitungan. (Singarimbun dan Effendi, 1995: 273–274)

Dalam analisis ini dipergunakan tabel distribusi persentase pada sel-sel sebagai dasar untuk menyimpulkan hubungan antara variabel-variabel penelitian. Dalam perhitungan ini prosentase responden untuk setiap kelompok dibuat sedemikian rupa agar mudah melihat hubungan antara dua variabel. Untuk itu persentase selalu dihitung pada tabel variabel pengaruh, atau jumlah 100 % adalah pada kategori variabel penuh. Hubungan variabel-variabel penelitian, yaitu efek variabel pengaruh dilihat dengan membandingkan distribusi presentase pada kategori-kategori variabel pengaruh. Agar mudah dibaca, variabel terpengaruh disusun sebagai baris (*vertical*) dan variabel pengaruh disusun sebagai kolom

(horizontal). Untuk mempermudah analisis digunakan alat bantu computer program *SPSS for Windows*.

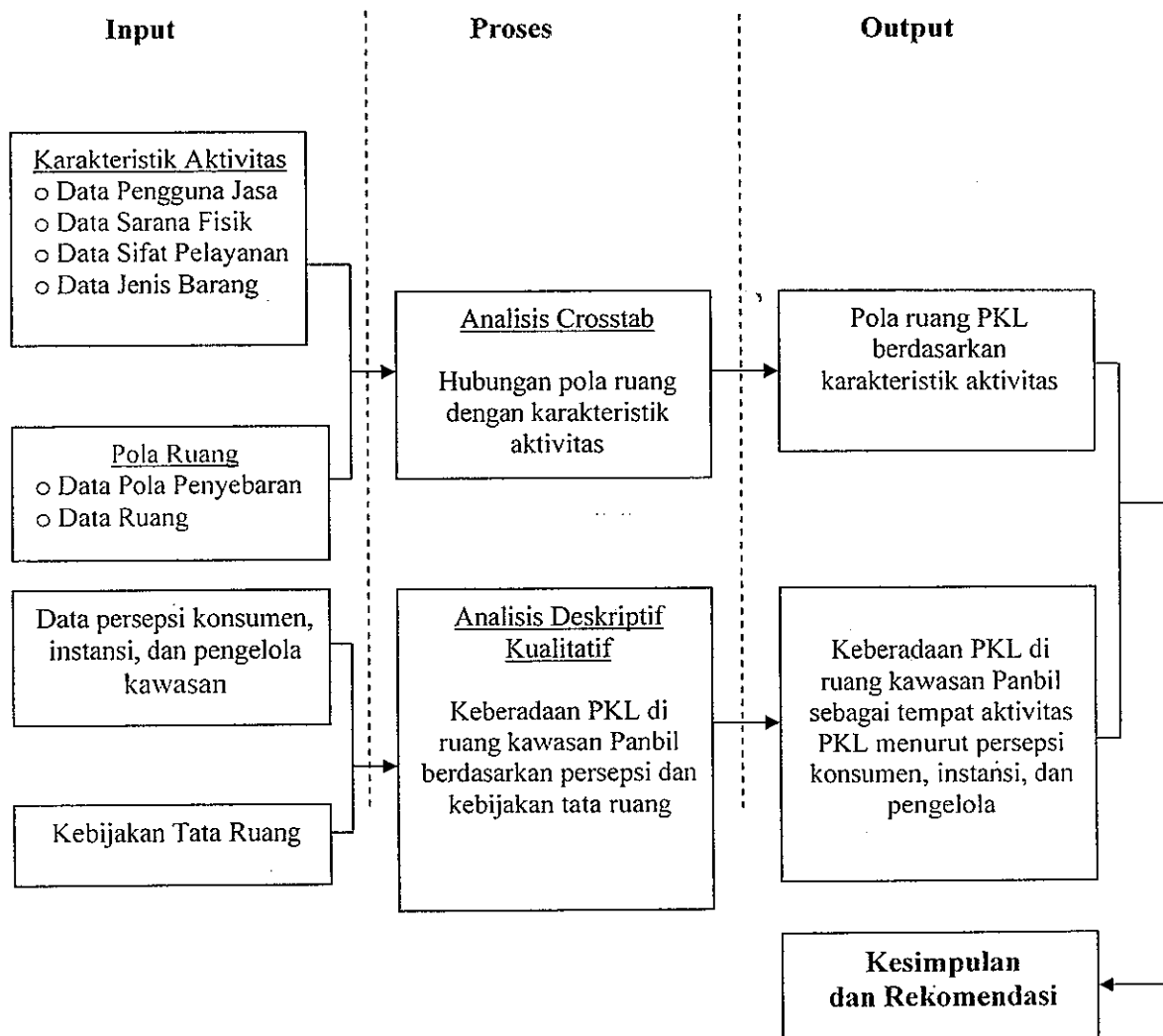
Untuk lebih jelasnya data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel I.2.

TABEL 1.2
DATA YANG DIANALISIS

No.	Sasaran	Variabel	Masukan	Jenis Data	Sumber Data	Metode Analisis
1.	Mengidentifikasi karakteristik PKL di Kawasan Panbil Kota Batam	• Karakteristik sosial ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Daerah asal • Pendidikan • Status pekerjaan • Lama bekerja sebagai PKL 	Primer	Kuesioner PKL	Deskriptif Kuantitatif dengan Distribusi Frekwensi
		○ Karakteristik aktivitas	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengguna jasa ○ Sifat pelayanan ○ Jenis dagangan ○ Sarana fisik yang digunakan 	Primer dan Sekunder	Kuesioner PKL dan Observasi Lapangan	Deskriptif Kuantitatif dengan Distribusi Frekwensi
		▪ Karakteristik ruang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pola penyebaran ▪ Lokasi PKL 	Primer dan Sekunder	Observasi Lapangan	Deskriptif Kuantitatif
2.	Mengidentifikasi aspek normatif berdasarkan persepai	• Konsumen	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan • Pekerjaan • Alasan berbelanja • Frekwensi belanja • Lokasi PKL yang diinginkan 	Primer	Kuesioner Konsumen	Deskriptif Kuantitatif dengan Distribusi Frekwensi
		○ Dinas/ Instansi	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pendidikan ○ Kendala pengelolaan PKL ○ Keberadaan PKL di lingkungan 	Primer dan Sekunder	Kuesioner Bappedako Pasar dan Kebersihan Perhubungan	Deskriptif Kualitatif

No.	Sasaran	Variabel	Masukan	Jenis Data	Sumber Data	Metode Analisis
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelola Kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sarana dagang ○ Lokasi PKL yang diinginkan ▪ Pendidikan ▪ Keberadaan PKL ▪ Keuntungan & kerugian PKL ▪ Keberadaan lokasi PKL ▪ Sarana dagang ▪ Lokasi PKL yang diinginkan 	Primer	Kuesioner Pengelola Panbil & Pengelola Muka Kuning	Deskriptif Kualitatif
3.	Menganalisis aspek normatif yang terkait dengan produk hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Perda • SK Walikota • Peraturan terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • Buku dan literatur 	Sekunder	Dokumentasi Bappedako Pasar dan Kebersihan Perhubungan	Deskriptif Kualitatif
4.	Mengidentifikasi dan menganalisis pola ruang aktivitas PKL		Pengolahan kuesioner	Primer dan Sekunder		Deskriptif Kualitatif, Kualitatif Dan Crosstab

Sumber : Peneliti, 2005



GAMBAR I.3
KERANGKA ANALISIS

Sumber: *Analisis, 2005*

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam laporan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab I berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran studi, ruang lingkup yang terdiri dari ruang lingkup materi, ruang lingkup wilayah dan posisi penelitian, metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan studi dan metodologi pelaksanaan studi, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN RUANG DAN TEMPAT AKTIVITAS USAHA PKL DIKAWASAN PERDAGANGAN PANBIL

Dalam Bab ini berisi tentang tata ruang kota yang terdiri dari ruang, tata ruang, perencanaan ruang dan urban desaig, sektor informal yang terdiri dari perbedaan sektor formal dan sektor informal, dan pengertian PKL, PKL dan Ruang Kota yang terdiri dari karakteristik perilaku PKL, komponen fisik pengaturan PKL, dan komponen aktivitas PKL, unsur-unsur yang terkibat dalam pemilihan lokasi aktivitas PKL, penentuan rencana penataan lokasi aktivitas PKL, rangkuman kajian teori.

BAB III TINJAUAN KEBERADAAN PKL DI KAWASAN PERDAGANGAN PANBIL

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum yang terdiri dari letak geografis, keadaan kependudukan dan sejarah perkembangan Batam, gambaran Kawasan Panbil Kota Batam yang terdiri dari sejarah

perkembangan Kawasan Panbil Kota Batam, sejarah perkembangan PKL di Kawasan Panbil Kota Batam dan kondisi eksisting PKL di Kawasan Panbil, karakteristik PKL yang terdiri dari komponen pengaturan aktivitas PKL dan komponen aktivitas PKL, aspek normatif yang terdiri dari kebijakan tata ruang pengembangan perdagangan Kota Batam dan kebijakan program pengembangan PKL di Kota Batam

BAB IV ANALISIS KARAKTERISTIK DAN PERILAKU PKL DI KAWASAN PANBIL KOTA BATAM

Dalam bab ini berisi tentang karakteristik sosial ekonomi PKL yang terdiri dari daerah asal, tingkat pendidikan, status pekerjaan, lama bekerja. Karakteristik aktivitas PKL yang terdiri dari golongan pengguna jasa, analisis sifat pelayanan, jenis dagangan, dan sarana fisik. Pola penyebaran PKL yang terdiri dari pola penyebaran dan ruang yang digunakan, analisis pola ruang berdasarkan konsumen, sarana fisik, sifat pelayanan dan jenis dagangan. Analisis aspek normatif berdasarkan persepsi konsumen dan instansi/dinas, analisis perencanaan ruang dan analisis penunjang lokasi tempat aktivitas dan pola ruang aktivitas PKL dan persepsi terhadap keberadaan PKL dan temuan-temuan studi.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi sesuai dengan tujuan studi.

BAB II

KAJIAN KARAKTERISTIK AKTIVITAS DAN RUANG USAHA PKL DI PERKOTAAN

2.1 Karakteristik PKL

2.1.1 PKL Sebagai Bagian dari Sektor Informal

Konsep sektor informal pertama kali diperkenalkan oleh J.K Hart tahun 1971, yang membedakan secara tegas kegiatan ekonomi yang bersifat formal dan informal (Rachbini, 1994: 26 dan Daldjoni, 1998: 222).

Pengertian sektor formal dan sektor informal dikemukakan oleh Hidayat, 1978: 6-7), sektor formal adalah sebagai sektor yang terdiri dari unit usaha yang telah memperoleh berbagai proteksi ekonomi dari pemerintah. Sedangkan sektor informal adalah usaha yang tidak memperoleh proteksi dari pemerintahan dan sektor yang belum mempergunakan bantuan, fasilitas pemerintah meskipun bantuan tersebut tersedia. Kriteria adanya "accessibility" terhadap suatu fasilitas yang disediakan pemerintah adalah yang dipakai sebagai ukuran untuk membedakan usaha sektor formal dan informal.

Konsep sektor informal juga diperkenalkan oleh ILO, Organisasi Buruh Internasional (Sethuraman, 1976:125) dalam penelitiannya di Kenya menyatakan ciri-ciri sektor informal adalah : *pertama*, Mudah dimasuki; *kedua*, Bersandar pada sumber daya sekitar; *ketiga*, Kegiatan usaha keluarga; *keempat*, Ukuran usahanya dalam skala kecil; *kelima*, Bersifat insentif kerja dan dengan teknologi tepat guna; *keenam*, Keterampilan yang bersangkutan bukan hasil didikan dari

sektor formal; *ketujuh*, Diluar jalur yang diatur pemerintah dan bergerak dalam pasar dan sangat bersaing.

Perbedaan karakteristik sektor formal dan sekor informal juga dikemukakan oleh Sudibyo, 2001. Yang diterangkan pada tabel II.1.

TABEL II.1
PERBEDAAN SEKTOR FORMAL DAN SEKTOR INFORMAL

NO	KARAKTERISTIK	SEKTOR FORMAL	SEKTOR INFORMAL
1.	Modal	Mudah diperoleh	Sukar diperoleh
2.	Teknologi	Padat modal	Padat karya
3.	Organisasi	Birokrasi	Menyerupai organisasi keluarga
4.	Kredit	Dari lembaga keuangan resmi	Dari lembaga keuangan tidak resmi
5.	Serikat Buruh	Sudah berperan	Tidak berperan
6.	Bantuan Pemerintah	Penting untuk kelangsungan usaha	Tidak berperan
7.	Hubungan dengan Desa	One-way-traffic untuk kepentingan sektor formal	Saling menguntungkan
8.	Sifat Wiraswasta	Sangat tergantung dari impor	Berdikari
9.	Persediaan Barang	Jumlah besar dan kualitas impor	Jumlah kredit dan kualitas berubah-ubah
10.	Hubungan Kerja	Berdasarkan kontrak kerja	Berdasarkan azas saling percaya

Sumber : D. Priyono Sudibyo, 2001

Dalam penelitiannya mengenai sektor informal di Kota Yogyakarta Hidayat, (1978 : 8), mengemukakan sebelas ciri-ciri pokok sektor informal yaitu :

1. Kegiatan usaha yang tidak terorganisir secara baik karena timbulnya unit usaha tidak menggunakan fasilitas atau kelembagan yang tersedia;
2. Pada umumnya tidak mempunyai izin;
3. Pola kegiatan usaha tidak teratur, baik dalam arti lokasi maupun jam kerja;
4. Pada umumnya kebijakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini;
5. Suatu usaha yang mudah keluar dan masuk dari sub sektor yang satu ke sub sektor yang lain;
6. Teknologi yang dipakai masih bersifat sangat sederhana;
7. Modal dan perputaran usaha kecil sehingga sektor operasinya juga kecil;
8. Penduduk yang diperlukan untuk menjalankan usaha tidak memerlukan pendidikan formal karena pendidikan diperoleh dari pengalaman sambil bekerja;
9. Pada umumnya satuan termasuk dalam golongan *one man enterprises* dan kalau mempekerjakan buruh biasanya berasal dari keluarga;
10. Sumber dan modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan tidak resmi;
11. Hasil produksi atau jasa tertentu dikonsumsi oleh masyarakat kota/desa yang berpenghasilan rendah/kadang-kadang juga yang berpenghasilan menengah.

Dari penjelasan mengenai perbedaan sektor formal dan sektor informal seperti tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sektor formal merupakan

sektor yang memperoleh proteksi dari pemerintah sehingga mendapatkan kredit dari lembaga keuangan resmi, dengan modal yang besar, menggunakan teknologi padat modal, dan memiliki hubungan kerja berdasarkan kontrak kerja, sedangkan sektor informal merupakan sektor yang tidak memperoleh proteksi dari pemerintah sehingga tidak mendapatkan kredit dari lembaga keuangan resmi, dengan modal yang sendiri atau sukar diperoleh, menggunakan teknologi padat karya, dan memiliki hubungan kerja berdasarkan azas saling percaya.

Perkembangannya istilah sektor informal dipakai sebagai konsep penelaahan struktur dualisme perekonomian kota. Hal ini dikarenakan keluesan dan belum adanya definisi baku dari konsep informal tersebut. Selain itu istilah sektor informal juga menunjukkan kepada kegiatan ekonomi dan perbedaan kegiatan ini dari sektor formal yang didasarkan kepada ciri-ciri berproduksi. Bentuk organisasi unit usahanya dan skala produksinya (Hidayat, 1982:9).

Dalam perkembangannya konsep ini tidak mengalami banyak perubahan, bahkan dapat dikatakan statis. Hal demikian mengakibatkan gambaran sektor informal ini kurang memadai sehingga definisi yang kurang baik tersebut memunculkan daftar kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kegiatan ini kurang jelas (Manning, 1985:139-140). Dilihat dari lokasi, sektor informal dapat terjadi di kota ataupun di desa. Sektor informal yang berada di desa dinamakan sektor tradisional, sedangkan sektor informal yang berada di kota disebut dengan sektor informal. Dengan adanya pengertian tersebut diatas secara konseptual di daerah perkotaan dikenal dengan istilah sektor formal dan sektor informal, sedangkan

diperdesaan dikenal dengan istilah sektor formal dan sektor tradisional (Majid, 1986:34-35).

Menurut Keith Hart dalam Chris Manning (1985: 79-89), cakupan dari sektor informal atau pekerjaan yang tergolong dalam sektor informal adalah perumahan (sewa menyewa kamar/kost), transportasi (ojek, becak dan lain-lain), pedagang kelontong, pedagang kaki lima, pengusaha makanan jadi, pelayan bar/toko, pengangkut barang, penyalur tenaga kerja/pembantu rumah tangga, jasa (pengamen, pengusaha binatu/cuci pakaian, penyemir sepatu, tukang cukur, pembuang sampah, juru potret, pekerja reparasi kendaraan maupun reparasi lainnya, makelar atau perantara, transaksi pribadi (pinjam meminjam uang/rentenir, pengemis, pengkredit barang, dll). Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sektor informal memiliki banyak pekerjaan yang termasuk didalamnya dan salah satu pekerjaan tersebut adalah PKL.

2.1.2 Pengertian Pedagang Kaki Lima

Istilah PKL merupakan peninggalan jaman penjajahan Inggris. Diambil dari ukuran trotoar yang dihitung dalam *feet* sama dengan kaki yaitu kira-kira 21 cm lebih sedikit. Lebar trotoar pada saat tersebut adalah 5 feet (1,5 M). Pedagang yang berjualan disepanjang trotoar tersebut kemudian disebut dengan PKL (Jullisar An Naf, 1983 : 30 – 31).

PKL juga dapat didefinisikan sebagai pedagang eceran bermodal kecil yang berpendapatan rendah dan berjualan di tempat-tempat umum seperti di

emper-emper, toko, ditepi jalan raya, taman-taman dan pasar-pasar tanpa izin usaha dari pemerintah (Dimara, 1979:47).

Menurut Mc Gee dan Yeung (1977:25), PKL mempunyai pengertian yang sama dengan *hawkers*, yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual ditempat umum, terutama dipinggir jalan dan trotoar. Menurut Ramli (1992:31), PKL adalah pekerjaan yang paling nyata dan paling penting dikebanyakan kota di negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya, begitu pentingnya dan khas dalam sektor informal menyebabkan istilah sektor nformal sering diidentikkan dengan pekerjaan yang dilakukan PKL.

Dalam perkembangannya pengertian PKL saat ini telah berkembang tidak hanya menggunakan trotoar saja sebagai tempat aktivitasnya melainkan berkembang pada kegiatan usaha tanpa izin dari pemerintah yang berada emper-emper, toko, taman-taman dan ruang terbuka, terminal, perempatan jalan, pedagang keliling dan lain sebagainya.

2.1.3 Perilaku PKL

Karakteristik PKL menurut Julius An-naf (dalam Widodo, 2000: 31) adalah sebagai berikut :

1. Retribusi maupun pungutan-pungutan tidak resmi;
2. Bagi PKL berdagang di kaki lima umumnya sebagai mata pencarian pokok;
3. PKL umumnya tergolong angkatan kerja produktif
4. Tingkat pendidikan mereka umumnya relatif rendah;

5. Sebagian besar PKL merupakan pendatang dari daerah dan belum memiliki status kependudukan yang sah di kota;
6. Mereka mulai berdagang sudah cukup lama;
7. Sebelum menjadi PKL mereka menjadi petani atau buruh;
8. Permodalan mereka umumnya sangat lemah dan omzet penjualannya juga relatif kecil;
9. Umumnya mereka memiliki atau mengusahakan sendiri dan belum ada hubungan dengan bank;
10. Kurang mampu memupuk modal;
11. Umumnya mereka memperdagangkan bahan pangan, sandang dan kebutuhan primer;
12. Pada hakekatnya mereka terkena pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, karakteristik PKL dapat disimpulkan bahwa mereka merupakan pendatang, dengan berdagang sebagai status pekerjaan utama dan bekerja sudah cukup lama dengan modal sendiri dan omset yang sangat kecil.

Kartini Kartono (dalam Widodo, 2000: 28), menyebutkan ciri-ciri PKL adalah sebagai berikut :

1. Kelompok ini merupakan pedagang yang kadang-kadang juga berarti sebagai produsen misalnya pedagang makanan-minuman yang dimasak sendiri;
2. Perkataan "kaki lima" memberikan konotasi bahwa mereka umumnya menjajakan barang-barang dagangannya pada gelaran tikar di pinggir-pinggir

jalan atau dimuka toko yang dianggap strategis. Juga kelompok pedagang yang mempergunakan kereta dorong dan kios kecil;

3. PKL umumnya menjual barang eceran;
4. PKL umumnya bermodal kecil, bahkan tidak jarang hanya merupakan "alat" bagi pemilik modal yang mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan jerih payahnya;
5. Pada umumnya para PKL merupakan kelompok marjinal bahkan ada pula yang tergolong pada kelompok sub marjinal;
6. Pada umumnya kualitas barang yang diperdagangkan relatif lebih rendah bahkan ada yang mengkhususkan diri dalam berjualan barang-barang cacat sedikit dengan harga jauh lebih murah;
7. Omzet penjualan PKL pada umumnya tidak besar;
8. Para pembeli pada umumnya berdaya beli rendah;
9. Kasus dimana PKL berhasil secara ekonomi sehingga akhirnya dapat menaiki tangga dalam jenjang hirarki pedagang yang sukses agak langka atau jarang terjadi;
10. Pada umumnya usaha PKL merupakan usaha "*family enterprise*" dimana anggota keluarga turut membantu dalam usaha tersebut;
11. Mempunyai sifat "*one man enterprise*";
12. Barang yang ditawarkan PKL biasanya tidak berstandar dan "*shifting*" jenis barang yang diperdagangkan seringkali terjadi;
13. Tawar menawar antar pembeli dan penjual merupakan ciri yang khas dari usaha perdagangan para PKL;

14. Sebagian dari PKL melaksanakan pekerjaan secara penuh yaitu berupa "*full time job*", sebagian lagi melakukan setelah jam kerja atau pada waktu senggang dalam rangka usaha mencapai '*additional*';
15. Sebagian PKL melaksanakan pekerjaan secara musiman, dan kerap kali terlihat jenis barang dagangannya berubah-ubah;
16. Barang-barang yang umumnya dijual oleh PKL merupakan apa yang dalam ilmu marketing disebut "*convenience goods*", jarang sekali mereka memperdagangkan '*speciality goods*';
17. Para PKL umumnya dalam suasana tidak tenang, takut kalau sewaktu-waktu usaha mereka dihentikan oleh TIBUM;
18. Masyarakat umum sering menganggap bahwa para PKL merupakan kelompok yang menduduki status sosial yang rendah dalam masyarakat;
19. Mengingat faktor pertentangan kepentingan maka kelompok PKL merupakan kelompok yang sulit dapat bersatu dalam bidang ekonomi walaupun perasaan setia kawan cukup kuat diantara mereka;
20. Jam dan waktu kerja pada umumnya tidak menunjukkan pola yang tetap, hal mana merupakan salah satu ciri perusahaan perorangan;
21. Para PKL terlihat memiliki jiwa "*entrepreneurship*" yang kuat.

Sedangkan ciri-ciri PKL dapat disimpulkan sebagai pendatang dengan yang digolongkan dalam kelompok yang memiliki status sosial yang rendah dengan konotasi bahwa mereka menjajakan dagangannya di pinggir jalan, menjual dagangan eceran yang berkualitas rendah dan tidak berstandar, bekerja secara *full*

time job dan musiman dan kegiatan yang terdapat didalamnya merupakan kegiatan tawar menawar dengan masyarakat pembeli adalah berdaya beli rendah.

2.1.3.1 Karakteristik Aktivitas PKL

Menurut Mc Gee dan Yeung (1977:76) pola ruang aktivitas PKL sangat dipengaruhi oleh aktivitas sektor formal dalam menjaring konsumennya. Lokasi PKL sangat dipengaruhi langsung dan tidak langsung dengan berbagai kegiatan formal dan kegiatan informal atau hubungan antara PKL dengan konsumennya.

A. Pola Pelayanan Aktivitas PKL

Pola pelayanan menurut Mc Gee dan Yeung (1977:76) adalah cara berlokasi aktivitas PKL dalam memanfaatkan ruang kegiatannya sebagai tempat usaha. Pola pelayanan aktivitas dapat ditinjau dari aspek :

o Golongan Pengguna Jasa PKL

Golongan pengguna jasa yang dilayani oleh aktivitas PKL pada umumnya dari golongan pendapatan menengah dan rendah. Hal ini disebabkan karena harga yang ditawarkan oleh pedagang sektor ini relatif lebih rendah sehingga terjangkau bagi golongan berpendapatan rendah. Seperti yang dikemukakan oleh Dimara (dalam Rusli, 1992:39), bahwa pada umumnya golongan pengguna jasa yang dilayani oleh aktivitas PKL adalah golongan dengan penghasilan rendah dan sedang, walaupun ada kalangan golongan atas yang mendapatkan pelayanan dari PKL seperti pedagang sayuran dan buah-buahan ataupun penjual jasa.

Menurut Rachbini dan Hamid (1994:92), menyatakan bahwa dari sekitar dua juta buruh atau pegawai sektor formal (swasta maupun negeri) di Jakarta kurang lebih satu setengah juta membeli makanan dari sektor formal. Hanya dengan cara ini mereka dapat bertahan dalam kondisi gaji di sektor formal yang rata-rata rendah.

o **Skala Pelayanan PKL**

Skala pelayanan suatu aktivitas jasa sektor informal dapat diketahui dari asal pengguna jasa. Besar kecilnya skala pelayanan tergantung dari jauh dekatnya pengguna jasa tersebut. Semakin dekat asal pengguna, maka skala pelayanan semakin besar (Manning dan Effendi, 1996:366-372).

o **Sifat Pelayanan PKL.**

Menurut Mc. Gee dan Yeung (1977:82) sifat pelayanannya PKL dapat dikelompokkan :

a. Pedagang menetap (*Static*)

Mempunyai bentuk layanan dengan cara dan sifat menetap pada suatu lokasi tertentu. Setiap pembeli atau konsumen harus datang sendiri ketempat dimana ia berada.

b. Pedagang semi menetap (*semi static*)

Mempunyai bentuk layanan menetap yang sementara, yaitu hanya pada saat-saat tertentu saja. Pedagang akan menetap bila ada kemungkinan datangnya pembeli yang cukup besar. Apabila tidak ada kemungkinan pembeli yang cukup besar, maka pedagang tersebut akan berkeliling.

c. Pedagang keliling (*mobile*)

Mempunyai bentuk layanan yang sifatnya selalu mendatangi atau mengejar konsumen. Biasanya pedagang ini mempunyai volume dagangan yang kecil

B. Waktu Berdagang

Menurut Mc Gee dan Yeung (1977:76) dari penelitian di kota-kota Asia Tenggara menunjukkan bahwa pola aktivitas PKL menyesuaikan terhadap irama dari ciri kehidupan masyarakat sehari-hari. Penentuan periode waktu kegiatan PKL didasarkan pula atau sesuai perilaku kegiatan formal. Adapun perilaku keduanya cenderung sejalan, walaupun pada saat tertentu kaitan aktivitas keduanya lemah ataupun tidak ada hubungan langsung.

Saat teramai pada suatu waktu pelayanan dipengaruhi oleh orientasi jasa terhadap pusat-pusat perbelanjaan akan berbeda dengan saat-saat teramai di dekat kawasan wisata, permukiman, kawasan perkantoran dan sebagainya. Menurut Ramli (1992:39), waktu yang dianggap paling sesuai untuk berjualan adalah antara jam 06.00 – pagi sampai jam 12.00 siang dan pada jam 18.00 sore sampai jam 20.00 malam, karena pada waktu-waktu itu terdapat pengunjung yang cukup banyak. Selanjutnya menurut Hugo (dalam Ramli, 1992:39), walaupun jam kerja PKL sangat panjang, namun seperti halnya pekerjaan-pekerjaan lain dalam sektor informal, umumnya pendapatan mereka sangat rendah.

C. Jenis Dagangan PKL

Menurut Mc Gee dan Yeung (1977:82–83) jenis dagangan PKL sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang ada disekitar kawasan PKL beraktivitas. Misalnya dikawasan perdagangan maka jenis dagangannya juga beraneka ragam seperti makanan/minuman, kelontong, pakaian dan lain-lain.

Selanjutnya jenis dagangan yang ditawarkan PKL dapat dikelompokkan atas 4 (empat) kelompok utama yaitu :

1. Makanan yang tidak dan belum diproses, termasuk didalamnya makanan mentah, seperti daging, buah-buahan dan sayuran;
2. Makanan yang siap saji, seperti nasi dan lauk pauknya dan juga minuman;
3. Barang bukan makan, mulai dari tekstil hingga obat-obatan;
4. Jasa, yang terdiri dari beragam aktivitas, umpamanya tukang potong rambut, tukang tambal ban dan lain sebagainya.

D. Sarana Fisik Dagangan

Sarana perdagangan yang dipergunakan oleh PKL dalam menjalankan aktivitasnya sangat bervariasi. Dari hasil penelitian Mc Gee dan Yeung (1977:82) kota-kota Asia Tenggara ditemukan bahwa untuk sarana fisik, dagangan PKL umumnya sangat sederhana dan biasanya mudah untuk dipindah-pindahkan dan mudah untuk dibawa-bawa dari satu tempat ke tempat lainnya. Jenis sarana dagang yang dipergunakan PKL sesuai dengan jenis dagangan yang dijual.

Adapun bentuk sarana perdagangan yang dipergunakan oleh PKL menurut Waworoentoe (dalam Widjajanti, 2000:39– 40) adalah :

1. Gerobak/kereta dorong, bentuk sarana ini terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu gerobak/kereta dorong tanpa atap dan gerobak/kereta dorong yang beratap untuk melindungi barang dagangan dari pengaruh cuaca. Bentuk ini dapat dikategorikan dalam bentuk aktivitas PKL yang permanen (*static*) atau semi permanen (*semi static*), dan umumnya dijumpai pada PKL yang berjualan makanan, minuman dan rokok.
2. Pikulan/keranjang, bentuk sarana perdagangan ini digunakan oleh PKL keliling (*mobile hawkers*) atau semi permanen (*semi static*), yang sering dijumpai pada PKL yang berjualan jenis barang dan minuman. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah dibawa atau dipindah tempat.
3. Warung semi permanen, terdiri dari beberapa gerobak/kereta dorong yang diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan kursi dan meja. bagian atap dan sekelilingnya biasanya ditutup dengan pelindung yang terbuat dari kain plastik, terpal atau lainnya yang tidak tembus air. PKL ini dapat dikategorikan pedagang permanen (*static*) yang umumnya untuk jenis dagangan makanan dan minuman.
4. Kios, bentuk sarana PKL ini menggunakan papan-papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menyerupai bilik semi permanen, yang mana pedagang bersangkutan juga tinggal ditempat tersebut. PKL ini dikategorikan sebagai pedagang menetap (*static*).

5. Gelaran/alas, berdagang dengan menggunakan alas tikar, kain atau lainnya untuk menjajakan dagangannya. Berdasarkan sarana tersebut PKL ini dapat dikategorikan dalam aktivitas semi permanen (*semi static*). Umumnya dapat dijumpai pada PKL yang berjualan barang kelontong dan makanan.

Bentuk sarana dagangan yang banyak terdapat di Kawasan Panbil terdiri dari gerobak/kereta dorong dan warung semi permanen. Penggunaan sarana dagang gerobak/kereta dorong kebanyakan digunakan pedagang untuk menjual buah-buahan, sedangkan penggunaan sarana dagang berupa warung semi permanen biasanya menjual makanan dan minuman siap saji, perlengkapan rumah tangga, dan lain sebagainya.

2.1.3.2 Karakteristik Ruang

A. Lokasi

Mc Gee dan Yeung (1977:108) menyatakan bahwa PKL beraglomerasi pada simpul-simpul jalur pejalan yang lebar dan tempat-tempat yang sering dikunjungi orang dalam jumlah besar yang dekat dengan pasar, terminal dan daerah komersil.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Joedo (1997:6-3) penentuan lokasi yang diminati oleh sektor informal atau PKL adalah sebagai berikut

1. Terdapat akumulasi orang yang melakukan kegiatan bersama-sama pada waktu yang relatif sama, sepanjang hari;

2. Berada pada kawasan tertentu yang merupakan pusat-pusat kegiatan perekonomian kota dan pusat non ekonomi perkotaan, tetapi sering dikunjungi dalam jumlah besar;
3. Mempunyai kemudahan untuk terjadi hubungan antara PKL dengan calon pembeli, walaupun dilakukan dalam ruang relatif sempit;
4. Tidak memerlukan ketersediaan fasilitas dan utilitas pelayanan umum.

B. Pola Penyebaran PKL

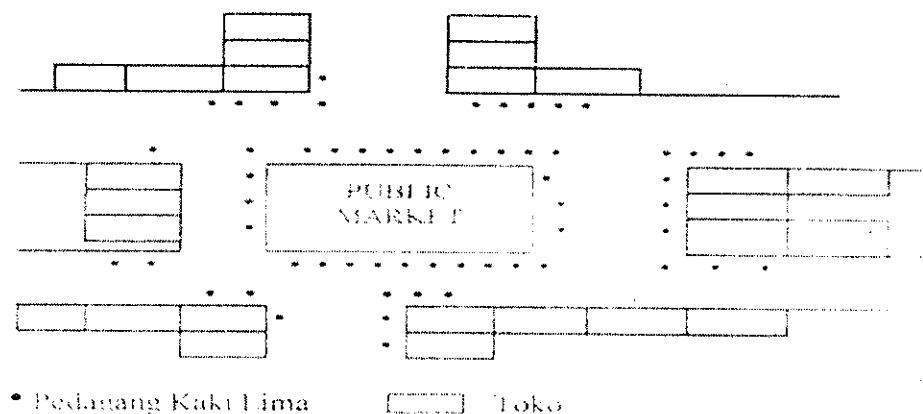
Menurut Mc Gee dan Yeung (1977:76) pola penyebaran PKL dipengaruhi oleh aglomerasi dan aksesibilitas, sebagai berikut :

1. Aglomerasi PKL selalu akan memanfaatkan aktivitas-aktivitas di sektor formal dan biasanya pusat-pusat perbelanjaan juga merupakan suatu daya tarik lokasi sektor informal untuk menarik konsumennya. Adapun cara PKL untuk menarik konsumen dengan cara berjualan berkelompok (aglomerasi). Para PKL cenderung melakukan kerjasama dengan pedagang PKL lainnya yang sama jenis dagangannya atau saling mendukung seperti penjual makanan dan penjual minuman. Pengelompokan PKL juga merupakan salah satu daya tarik bagi konsumen, karena mereka bebas memilih barang atau jasa bagi konsumen.
2. Aksesibilitas, para PKL lebih suka berlokasi di sepanjang pinggir jalan utama dan tempat-tempat yang sering dilalui pejalan kaki.

Berdasarkan pola penyebarannya, aktivitas PKL menurut Mc. Gee dan Yeung (1977: 36-37) dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) pola yaitu

1. Pola Penyebaran Mengelompok (*Focus Agglomeration*)

PKL pada tipe pola ini pada umumnya terdapat pada ujung jalan, ruang-ruang terbuka, sekeliling pasar, ruang parkir, taman-taman dan lain sebagainya. Pola penyebaran seperti ini biasanya banyak dipengaruhi oleh adanya pertimbangan aglomerasi, yaitu suatu pemusatan atau pengelompokan pedagang sejenis atau pedagang yang mempunyai sifat komoditas sama atau menunjang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1.

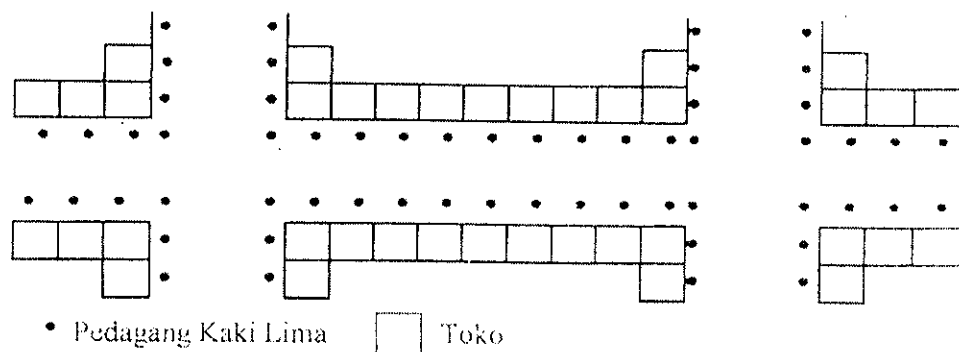


GAMBAR 2.1
POLA PENYEBARAN MENGELOMPOK (FOCUS
AGLOMERATION)

2. Pola Penyebaran Memanjang (*Linier Concentration*)

Pola ini umumnya merupakan pola penyebaran memanjang yang terjadi disepanjang atau di pinggir jalan utama (main street) atau pada jalan yang menghubungkan jalan utama. Pola perdagangan ini ditentukan oleh pola jaringan jalan itu sendiri. Pola kegiatan linier lebih banyak dipengaruhi oleh

pertimbangan aksesibilitas yang tinggi pada lokasi yang bersangkutan. Dilihat dari segi PKL itu sendiri, hal ini sangat menguntungkan, sebab dengan menempati lokasi yang beraksesibilitas tinggi akan mempunyai kesempatan yang tinggi dalam meraih konsumen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.2.



Sumber: Mc Gee dan Yeung (1977: 37)

GAMBAR 2.2
POLA PENYEBARAN MEMANJANG (LINIER
CONCENTRATION)

2.2 Tata Ruang Kota

2.2.1 Ruang

Pemahaman mengenai ruang dapat dijelaskan dengan pendekatan ilmu geografi. Definisi ruang ditinjau dari segi geografi adalah terbagi menjadi dua, yaitu menurut istilah geografi umum dan geografi regional (Jayadinata, 1999:12). Menurut istilah geografi umum, yang dimaksud dengan ruang (*space*) adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfera, tempat hidup tumbuh-

tumbuhan, hewan dan manusia. Ruang permukaan bumi tingginya adalah setinggi lapisan atmosfera. Menurut istilah geografi regional, ruang dapat merupakan suatu wilayah yang mempunyai batas geografis, yaitu batas menurut keadaan fisik, sosial atau pemerintahan, yang terjadi dari sebagian permukaan bumi dan lapisan tanah di bawahnya serta lapisan udara di atasnya.

Selain itu, definisi ruang dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang pasal 1 Ruang adalah sebagai wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, ruang tidak dapat dipisahkan dari manusia baik secara psikologis, emosional maupun dimensional. Manusia berada dalam ruang, bergerak, menghayati dan berpikir, juga membuat ruang untuk menciptakan dunianya (Budihardjo, 1999:91).

2.2.2 Tata Ruang

Konsep tata ruang kota merupakan pemikiran atau gagasan yang mencakup semua hal dan berkaitan dengan karakteristik tata ruang kota. Tata ruang mengandung arti yang sangat luas tetapi sekaligus juga seringkali punya konotasi sempit terbatas pada perencanaan fisik semata (Budihardjo, 1993:199-200). Padahal sudah semenjak beberapa tahun yang lampau perencanaan yang menekankan arti fisik, serba deterministik dan menomor-duakan manusia dengan segenap keunikannya, telah banyak mendapat kecaman. Penataan ruang sungguh rumit dan pelik karena mau tidak mau menyangkut benturan antara

pendekatan-pendekatan teknokratik komersial dan humanis. Wujud pola pemanfaatan ruang di antaranya meliputi pola lokasi, sebaran permukiman, tempat kerja, industri, serta pola penggunaan tanah pedesaan dan perkotaan.

Adapun elemen-elemen yang membentuk struktur ruang kota (Sinulingga, 1999:25) adalah :

1. Kumpulan dari pelayanan jasa termasuk didalamnya perdagangan, pemerintahan dan keuangan;
2. Kumpulan dari industri sekunder (*manufacture*), pergudangan dan perdagangan grosir;
3. Lingkungan permukiman sebagai tempat tinggal manusia dan ruang terbuka;
4. Jaringan transportasi yang menghubungkan tempat 1, 2, 3 diatas.

2.2.3 Perencanaan Ruang

Perencanaan ruang merupakan salah satu upaya untuk menciptakan tata ruang yang baik dan efisien serta efektif. Setiap orang berhak menikmati manfaat ruang, termasuk pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang. Perencana dan pengelolaan kota perlu memperhatikan aspek-aspek yang kompleks (Zahnd, 1999: 222-223). Kompleksitas tersebut mencakup banyak kriteria, namun secara singkat terdapat empat kriteria yang dianggap paling penting, yaitu:

1. Tipologi kawasan kota;

Tipologi kawasan kota terdiri dari tipologi elemen-elemen perkotaan yang arsitektural (rumah, museum, rumah sakit) serta tipologi elemen-elemen perkotaan fungsional (perdagangan, industri, permukiman dan lain-lain).

2. Morfologi kawasan kota;

Morfologi secara harfiah merupakan "penataan/susunan" atau "pembentukan obyek atau sistem". Dalam lingkungan perkotaan, kawasan kota sebagai obyek yang besar perlu dipahami sistemnya, baik dari luar maupun dari dalam secara arsitektural. Morfologi sebagai kriteria kedua menekankan pada tata ruang perkotaan dan massanya serta aspek-aspek hubungannya.

3. Skala kawasan kota;

Kriteria skala kawasan kota tidak hanya penting secara visual saja, melainkan juga berhubungan dengan segala aspek perkotaan, baik mikro maupun makro. Maka, dengan menciptakan dan mengelola suatu skala perkotaan tertentu, ada kaitan erat dengan kuantitas jumlah pemakaiannya yang akan sangat mempengaruhi cara kehidupan melalui skala konteksnya.

4. Identitas kawasan kota;

Istilah identitas berfokus pada jati diri kawasan perkotaan. Suatu keunikan pada tempat-tempat tertentu menimbulkan perasaan-perasaan tertentu. Kriteria identitas sebuah tempat disebabkan oleh banyak faktor, baik obyektif maupun subyektif, baik konkret maupun abstrak. Dengan demikian, perlu diperhatikan gambaran sebuah tempat yang "ber-identitas" dengan segala implikasinya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, penataan ruang merupakan proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang

dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan demikian, penataan ruang pada dasarnya meliputi pengertian manajemen ruang.

2.3 Pedagang Kaki Lima dan Ruang Kota

2.3.1 Unsur-unsur yang Terlibat dalam Pemilihan Lokasi Aktivitas Kegiatan PKL

Sektor formal yang banyak tumbuh dan berkembang diperkotaan berupa kegiatan industri, perdagangan, perkantoran, jasa dan perumahan dan kemudian dilengkapi dengan prasarana lingkungan perkotaan berupa jalan dan berbagai aksesorisnya, menarik berbagai kegiatan lain yang saling terkait dengan kegiatan perkotaan tersebut. Keadaan tersebut dapat dilihat dari tumbuhnya sektor informal terutama PKL sebagai salah satu kegiatan pendukung kegiatan sektor formal tersebut. Keberadaan PKL yang selalu menempati ruang publik terutama di trotoar, bahu jalan, taman dan tempat parkir telah mengakibatkan konflik kepentingan di ruang publik tersebut.

Sebagai aktivitas pendukung, keberadaan PKL tidak terlepas dari keberadaan sektor formal. Hal ini dapat dilihat dari interaksi ekonomi antara pedagang dan pembeli yang terjadi. Menurut Rachbini dan Hamid (1994: 90–91), dalam observasinya mengenai PKL di Jakarta dan Surabaya menemukan bahwa adanya kecenderungan bahwa disetiap berdirinya gedung bertingkat di jalan Sudirman Jakarta dapat dipastikan sejumlah PKL berderetan disepanjang jalan. Mereka melayani para karyawan atau pegawai bergaji rendah.

Kegiatan perdagangan sangat dipengaruhi oleh pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi juga sangat mempengaruhi dalam perkembangan PKL. Aktivitas ini selalu muncul mendekati lokasi-lokasi yang strategis yaitu dimana terdapat kunjungan yang tinggi. Pemilihan lokasi-lokasi yang strategis tersebut menurut Richardson (1997:55) disebutkan bahwa pemilihan lokasi diperkotaan dikarenakan kota merupakan lokasi yang mempunyai skala nilai ekonomi dengan keuntungan komparatif yang tinggi, sehingga ada keinginan bagi pelaku ekonomi untuk memperoleh kemudahan hubungan (*accessibility*), sewa tempat disentral usaha, pengurangan biaya-biaya akibat kemacetan (*congestion*), nyaman dalam melakukan aktifitas (*amenities*). Keinginan tersebutlah yang selalu diprioritaskan dalam mencari tempat oleh pelaku ekonomi dan hal tersebut tidak terkecuali bagi PKL, mereka selalu mendekati diri pada lokasi-lokasi strategis yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan keuntungan komparatif.

Kota sebagai lambang gejala aglomerasi ekonomi menjadi sasaran para pelaku PKL diperkotaan. Mengetahui bahwa harga sewa lahan diperkotaan sangat tinggi, namun dikarenakan lokasi tersebut sangat strategis bagi mereka dalam berusaha maka mereka mencari lokasi yang memiliki harga sewa yang rendah atau tidak jarang menempati lokasi yang tidak memiliki sewa. Konsekwensinya adalah lokasi tersebut memiliki kondisi yang tidak memenuhi persyaratan (*slum area*) karena keinginan untuk mendapatkan lokasi yang strategis dengan sewa yang murah atau tidak dikenakan biaya sama sekali. Lokasi yang dipilih mereka selalu berdekatan dengan kawasan perdagangan, perkantoran, perindustrian, perumahan dan lain sebagainya. Karena biasanya kawasan tersebut

memiliki sewa yang sangat tinggi sehingga agar dapat tetap berlokasi dikawasan tersebut PKL memilih untuk berlokasi pada trotoar atau tepi jalan. Tentu saja dengan peletakan sarana dagangan mereka akhirnya menimbulkan konflik kepentingan antara ruang publik dan ruang privat.

Ruang publik tersebut meliputi jalan, taman dan ruang-ruang terbuka lainnya yang merupakan ruang dinamis yang potensial untuk memenuhi kebutuhan pergerakan, komunikasi dan rekreasi bagi warga kotanya. Karenanya ruang publik harus bersifat terbuka, dapat dijangkau oleh siapa saja baik secara kelompok maupun pergerakan, ruang untuk aktivits sosial dan aktivitas ekonomi sehingga dapat mengakomodir aktivitas yang terdapat pada kawasan tersebut baik yang bersifat dinami smaupun yang bersifat statis serta ruang tersebut juga harus memperhatikan pengguna aktivitas yang beragam baik secara sosial maupun fisik. Ruang publik juga memberikan keragaman akses terhadap aktivitas, sumber daya, informasi dan tempat. Karenanya diperlukan pula kemudahan untuk memilih akses bagi keragaman tersebut. Sehingga ruang publik dapat menimbulkan kenyamanan baik secara psikis maupun psikologis, bebas dan nyaman dalam melakukan aktivitas atau berinteraksi serta memiliki ruang yang jelas dan muidah dipahami.

Selain memillih lokasi yang berdekatan dengan kawasan perdagangan, perkantoran, perindustrian, perumahan dan lain-lain keberadaan PKL sangat dipengaruhi dengan keinginan mereka untuk memilih lokasi yang strategis dan menguntungkan di pusat kota atau lokasi yang merupakan aktivitas masyarakat. Sedangkan tempat yang dipilih menurut Ramli (1992:65) dalam penelitian PKL di

Jakarta, mengemukakan bahwa pada umumnya tempat usaha PKL adalah trotoar/jalan umum, taman parkir, taman kota, halaman-halaman perkantoran atau sekolah, yang kesemuanya merupakan tempat-tempat umum yang ramai didatangi atau dilalui orang. Sehingga PKL bukan merupakan kegiatan utama seperti yang diungkapkan oleh Shirvani (1985:37), aktivitas PKL dipertanian merupakan pendukung aktivitas (*activity support*) dari aktivitas-aktivitas fungsional kota.

Kedekatan PKL dengan tempat tinggal merupakan salah satu faktor yang diperhitungkan PKL dalam pemilihan lokasi. Menurut Rachbini dan Hamid (1994: 101), berdasarkan penelitiannya di Jakarta dan Surabaya mengemukakan bahwa ada korelasi yang tinggi antara tingkat mobilitas tempat usaha dengan mobilitas tempat tinggal. Artinya mobilitas tempat tinggal terjadi karena mobilitas tempat usaha dan bukan sebaliknya. Mereka harus dekat dengan tempat usahanya, jika tidak mereka akan terlilit ongkos transportasi dan kesulitan lain yang menyangkut cara membawa dan menyimpan alat-alat usahanya.

Faktor seperti tersebut diatas yang mempengaruhi PKL dalam memilih tempat, bagi sebagian pemerintah tidak menjadi alternatif dalam peletakan PKL, sehingga tidak jarang PKL harus main kucing-kucingan dan selalu mengalami pengusuran oleh pemerintah. Berbeda dengan negara Malaysia, kota-kota yang berada di negara tersebut selalu mengadakan pertemuan konsultasi dengan para PKL untuk mengeluarkan suatu keputusan. Demikian pula dalam penentuan lokasi PKL di suatu ruang kota juga dilakukan pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan kesepakatan. Timbal baliknya para PKL sangat mentaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah, seperti diantara para PKL saling

mengingatkan akan ketaatan pada peraturan yang telah disepakati. Tidak seperti dinegara lain di Asia Tenggara dalam menanggapi masalah PKL dengan cara menggusur, tanpa ada pertemuan untuk kesepakatan lokasi. Penyelesaian perencanaan untuk mengintegrasikan sektor informal kedalam sektor formal tidak mungkin dilakukan tanpa adanya dukungan kebijakan politis dari pemerintah (Wiryosumartono, 1995: 83).

Berdasarkan penelitian Mc. Gee dan Yeung di Asia Tenggara (1977:107), pihak yang terkait langsung dalam persoalan PKL adalah pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah (kotamadya/kabupaten). Pihak pemerintah membuat kesepakatan dengan PKL dan membuat peraturan operasional yang harus ditaati PKL.

2.3.2 Penentuan Rencana Penataan Lokasi Aktivitas Kegiatan PKL

Kebijakan pembangunan kota di negara-negara berkembang pada umumnya, seperti Indonesia misalnya, seringkali hanya mempertimbangkan indikator-indikator atau elemen-elemen kota yang bersifat formal dalam perencanaannya. Hal ini lebih disebabkan karena adanya pandangan atau orientasi terhadap kondisi dinegara-negara maju, dimana kondisi masyarakatnya telah mengalami modernisasi dengan tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan yang cukup tinggi, sehingga kegiatannya lebih banyak pada sektor formal. Sedangkan di negara-negara berkembang komposisi penduduk lebih besar pada kelompok masyarakat berpendapatan dan kondisi tersebut pada akhirnya mendorong

munculnya aktivitas-aktivitas sektor informal, seperti PKL, terutama di wilayah perkotaan. Rachbini (dalam Ambarwati, 2003:54).

Perkembangan PKL selalu dianaktirikan jika dibandingkan dengan sektor formal, terutama sekali apabila kedua sektor ini saling berbenturan. Menurut Rachbini dan Hamid (1994:49), disebutkan bahwa pemerintah selalu memenangkan kepentingan yang formal dan menggeser yang informal apabila kedua kepentingan ini bertabrakan. Salah satu contoh kasus adalah pengusuran terhadap PKL merupakan bukti bahwa kebijakan penatan yang diambil pemerintah hampir senantiasa menyudutkan sektor informal. Persoalan lain pada pemerintah daerah juga harus diselesaikan karena pada level birokrasi inilah persoalan mengalami kemacetan akibat pola kebijakan langsung "*direct approach*" yang menganggap sektor ini mengganggu perdagangan formal yang telah menempati tempat yang lebih mapan.

Kondisi tersebut sangat berbeda dengan di negara-negara berkembang yang komposisi penduduknya lebih besar pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Keadaan diatas akhirnya mendorong munculnya aktivitas-aktivitas sektor informal, seperti PKL terutama di wilayah perkotaan. Karena karakteristik PKL itu sendiri adalah memiliki pendidikan yang relatif rendah sehingga akan sukar bagi mereka untuk berusaha dan mencari kerja pada bidang formal.

Keadaan tersebut kemudian diperparah dengan terjadinya krisis ekonomi yang melanda dunia. Salah satu dampak yang sangat dirasakan masyarakat adalah dilakukannya pengurangan jumlah tenaga kerja oleh perusahaan-perusahaan atau

yang lebih ekstrim adalah henggang atau tutupnya perusahaan tersebut sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. Hal ini menimbulkan masalah baru bagi kegiatan perekonomian diperkotaan.

Akibat dari kondisi diatas adalah munculnya masalah perkotaan yang disebabkan karena keberadaan PKL. Masalah tersebut diantaranya adalah :

1. Menciptakan kawasan-kawasan kumuh yang seringkali dijumpai di daerah-daerah pinggiran sungai;
2. Kualitas lingkungan kawasan mengalami penurunan;
3. Secara tidak langsung menghambat proses penataan kota yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah mengingat banyaknya para pedagang yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Kondisi tersebut sangat tidak sesuai dengan tatanan fisik lingkungan, sehingga perlu penataan elemen-elemen yang serasi dan sesuai dan persyaratan perencanaan sehingga akan tercipta ruang kota yang sesuai dan serasi dengan lingkungan perkotaan.

BAB III

TINJAUAN KEBERADAAN PKL DI KAWASAN PERDAGANGAN PANBIL KOTA BATAM

3.1. Gambaran Umum

3.1.1 Letak Geografis

Secara geografis Kawasan Perdagangan Panbil berada di Kecamatan Sungai Beduk, Kelurahan Muka Kuning. Wilayah studi yang ditekankan menjadi wilayah pembahasan berada di jalan Jendral Ahmad Yani yaitu berada diantara Kawasan Perdagangan Panbil (jalan Jendral Ahmad Yani yang akan menuju ke Batam Center) dan Kawasan Perindustrian Muka Kuning (jalan Jendral Ahmad Yani yang akan menuju ke Batu Aji).

Untuk lebih jelasnya lokasi studi dapat dilihat pada gambar 3.1

3.1.2 Keadaan Kependudukan

Perkembangan penduduk Kota Batam dari tahun ke tahun menunjukkan pertambahan yang relatif terus meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari sensus penduduk rata-rata dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 sebesar 12,87 persen, sedangkan pada tahun 2001 pertumbuhan rata-ratanya sudah menunjukkan perkembangan sebesar 13,26 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1

TABEL III.1
PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2000 – 2002

Tahun	Jumlah Penduduk	Prosentase
2000	434.286	12,87
2001	527.151	17,62
2002	549.951	4,15

Sumber : Batam dalam Angka, 2005.

MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
 PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS DIPONEGORO

KAJIAN POLA RUANG BERDASARKAN
 KARAKTERISTIK AKTIVITAS PKL DI KAWASAN
 PANBIL KOTA BATAM

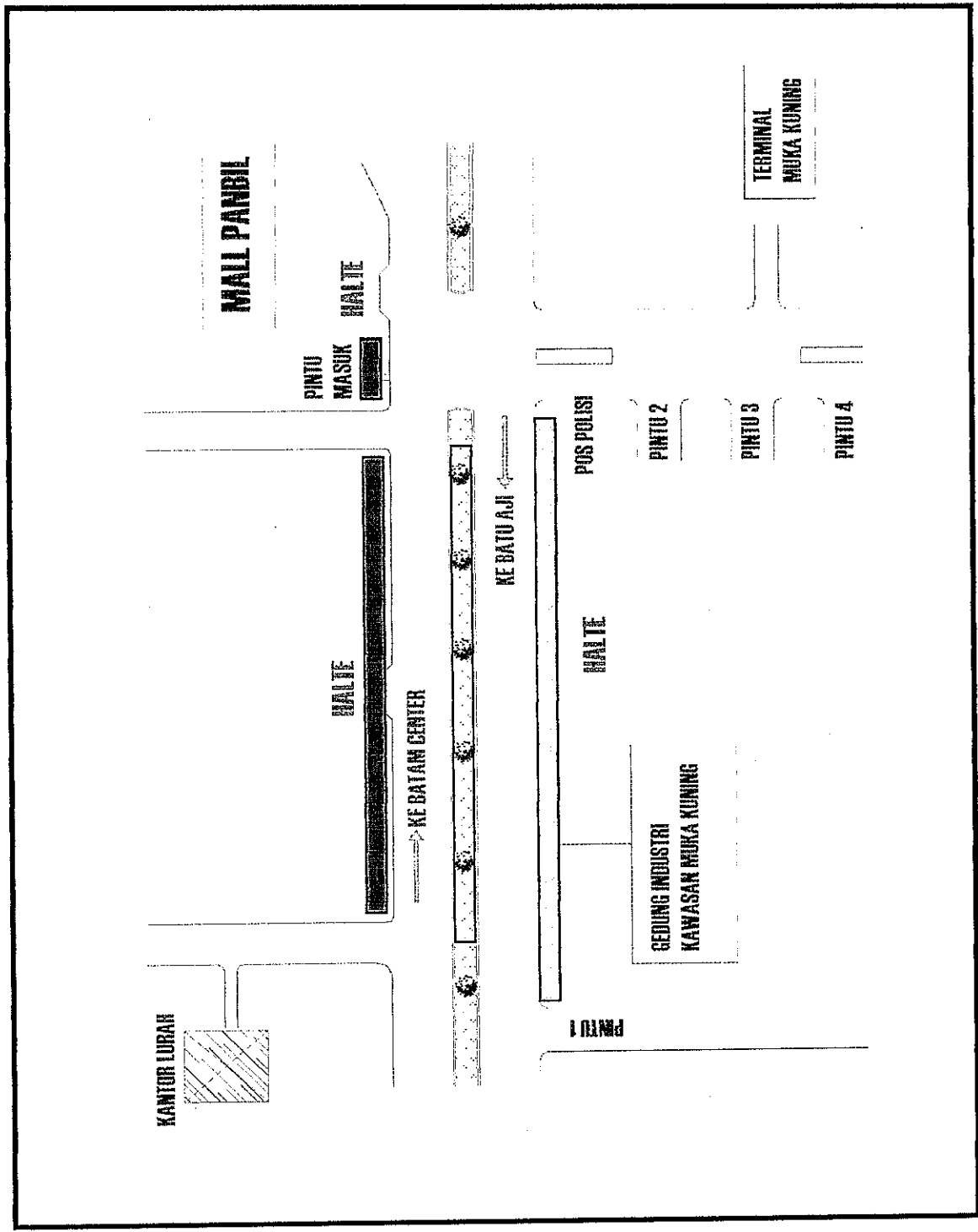
PETA
 JUMLAH DAN SEBARAN PKL

JUMLAH PKL:
 : 95 (sembilan puluh lima) PKL
 : 25 (dua puluh lima) PKL
 : 86 (delapan puluh enam) PKL
 JUMLAH : 206 (DUA RATUS ENAM)
 PKL



GAMBAR 3.1

SUMBER: OBSERVASI LAPANGAN, 2005



3.1.3 Sejarah Perkembangan Batam

Sejarah perkembangan Kota Batam dapat dirangkum dalam 4 periode, yang terdiri dari :

1. Periode Persiapan (tahun 1969 – 1975)

Pada periode ini perkembangan Batam lebih ditujukan untuk menunjang kegiatan pertanian dan pencarian minyak lepas pantai. Sehingga Batam ditetapkan sebagai basis logistik operasional untuk industri yang berkaitan dengan eksplorasi gas bumi di lepas pantai.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terhadap Batam berisi tentang : pengembangan Pulau Batam, Pembentukan Badan Pimpinan Daerah Industri (Badan Penguasa) yang bertanggungjawab kepada Presiden, menetapkan Batam sebagai lingkungan kerja daerah industri dengan pembentukan Otorita Pembangunan Daerah Industri Pulau Batam (OPOIPB), menetapkan beberapa kawasan di Sekupang, Batu Ampar dan Kabil sebagai *Bonded Ware House*.

2. Periode Konsolidasi (tahun 1976 – 1978)

Periode ini dititik beratkan untuk konsolidasi, pemeliharaan sarana dan prasarana serta aset-aset yang ada.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terhadap Batam berisi tentang : pengelolaan penggunaan tanah, pembangunan pelabuhan, kewenangan pengurusan dan penilaian investor baik dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), serta menetapkan seluruh wilayah Pulau Batam menjadi wilayah *Bonded Ware House*.

3. Periode Pemantapan (tahun 1978 – 1983)

Periode ini menitik beratkan pada rencana pengembangan Pulau Batam yang disesuaikan dengan rencana strategi pengembangan, strategi pembangunan nasional dan situasi ekonomi dunia.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terhadap Batam berisi tentang : menetapkan seluruh Pulau Batam sebagai Kawasan Berikat (*Bonded Zone*), penetapan Pulau Batam sebagai daerah berstatus khusus di bidang keimigrasian, pelimpahan wewenang dibidang perdagangan dan koperasi, dan tentang kebijakan pengembangan pariwisata, dalam hal ini pelabuhan laut dan udara di Pulau Batam ditetapkan sebagai pintu masuk wisatawan dari luar negeri.

4 Periode Penanaman Modal, Industri dan Pengembangannya (tahun 1983 - Sekarang)

Periode ini Batam telah menunjukkan perkembangan dan hasilnya. Sehingga pada tahun 1984 ditetapkan seluruh Pulau Batam dan ditambah pulau-pulau yang berada disekitarnya yang terdiri dari Pulau Janda berhias, Pulau Tanjung Sauh, Pulau Ngenang, Pulau Kasem dan Pulau Moi-Moi sebagai Kawasan Berikat (*Bonded Zone*)

3.2 Gambaran Kawasan Panbil Kota Batam

3.2.1 Sejarah Perkembangan Kawasan Panbil Kota Batam

Kawasan Perdagangan Panbil Kota Batam merupakan salah satu Kawasan Berikat (*Bonded Zone*). Awal mula terbentuknya kawasan ini merupakan kawasan hutan yang sangat luas, dengan semakin berkembangnya Batam pada periode konsolidasi dengan memutuskan kewenangan pengurusan dan penilaian investor

baik dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan semakin pesat pada saat periode pematangan mengakibatkan tumbuh dan berkembangnya banyak industri di Batam.

Setelah dipilih kawasan yang sesuai untuk industri ini dilakukanlah penebangan terhadap hutan tersebut. Karena lokasinya yang sangat luas dan belum adanya sarana yang memadai untuk melakukan survei kelokasi tersebut, pada awalnya pemerintah melakukan survey dengan menggunakan helikopter. Suasana hutan yang biasanya lebat dan hijau, sekarang berubah menjadi dataran yang berwarna kuning.

Melihat permukaan bumi yang telah menjadi kuning, kemudian lokasi tersebut dijuluki dengan panggilan "permukaan kuning". Semakin tahun berganti dengan nama yang panjang, akhirnya penduduk sekitar untuk lebih menggampangkan penyebutan ke lokasi permukaan kuning disingkat menjadi "Muka Kuning" saja.

Kawasan Muka Kuning tersebut banyak diperuntukkan untuk kegiatan pengolahan industri elektronik berupa kegiatan perakitan. Semakin berkembangnya Kawasan Muka Kuning, pemerintah membuka lahan baru untuk industri yang kemudian disebut dengan Kawasan Panbil, kawasan ini selain berisi kegiatan industri, jasa dan perumahan juga diisi dengan kegiatan dominan yaitu perdagangan.

3.2.2 Sejarah Perkembangan PKL di Kawasan Panbil Kota Batam

Kawasan Perdagangan Panbil merupakan kawasan tempat terkonsentrasinya perindustrian, perdagangan, jasa dan perumahan yang merupakan kegiatan dominan yang ada di kawasan tersebut. Alasan keberadaan tersebut pada awalnya dipengaruhi oleh tumbuhnya berbagai industri yang ada di kawasan Muka Kuning. Untuk

Perkembangan PKL tersebut semakin tumbuh pesat seiring dengan banyaknya pengunjung yang singgah dan berada di kawasan tersebut. Penempatan kios-kios PKL tersebut selain menempati ruang publik dan pribadi juga menurunkan kualitas lingkungan fisik kawasan sekitarnya. Karena penampilan warung semi permanen, gerobak/ kereta dorong dan kios yang cenderung kumuh dengan kondisi yang relatif sederhana berupa dinding-dinding tempat menyandarkan barang dagangan, telah mengganggu keindahan dan keunikan penampilan kawasan secara menyeluruh.

3.2.3 Kondisi Eksisting PKL di Kawasan Panbil

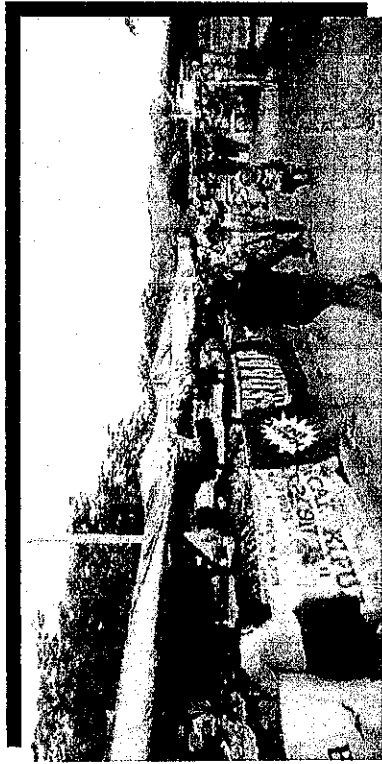
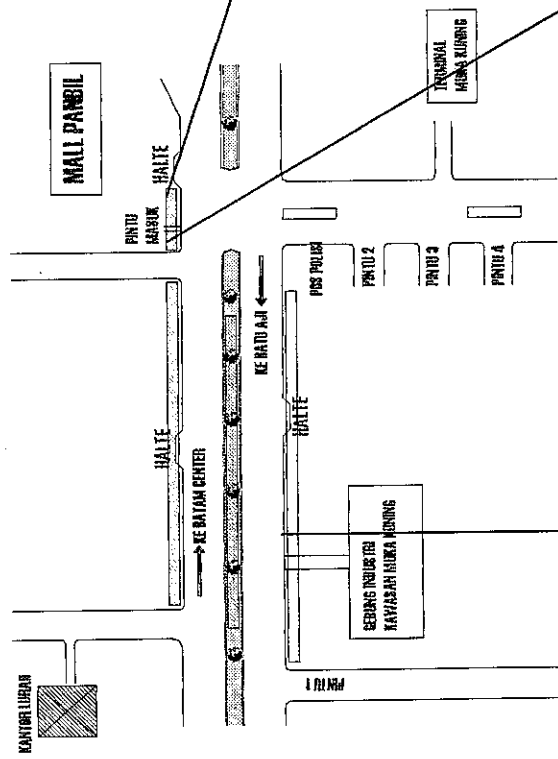
Lokasi PKL yang berada di Kawasan Perdagangan Panbil sangat mengganggu pengguna jalan baik bagi pejalan kaki maupun pengguna kendaraan. Bermunculannya PKL tersebut menyebabkan terjadinya transaksi jual beli dan tawar menawar di bahu jalan. Pertumbuhan PKL di kawasan semakin pesat karena kawasan tersebut merupakan kawasan strategis.

PKL di Kawasan Perdagangan Panbil menempati ruang di sekitar ruas jalan Jenderal Ahmad Yani, baik yang berada di depan Kawasan Industri Muka Kuning yaitu jalan Jendral Ahmad Yani yang menuju ke Batu Aji dan di Samping Kawasan Perdagangan Panbil yaitu jalan Jendral Ahmad Yani yang menuju ke Batam Center. Jenis barang yang diperdagangkan berupa barang kebutuhan sehari-hari, yaitu makanan (makanan kecil, minuman, makanan olahan, lauk pauk, mie bakso/ayam, buah-buahan dan sembako), bukan makanan (pakaian, sepatu/sandal, tas, kaos kaki, alat rumah tangga, aksesoris, handphone dan gorden) dan jasa (tambal ban/isi gas,

tukang jahit reparasi dan bengkel). Untuk lebih jelasnya mengenai jenis ragam dagangan PKL dapat dilihat pada gambar 3.2, 3.3 dan 3.4.

Jenis sarana dagang PKL terdiri dari bermacam-macam, yaitu terdiri dari warung semi permanen, gerobak/kereta dorong, meja gelaran, kios, dan kendaraan baik berupa motor dan mobil yang berisi barang dagangannya. Peletakan sarana dagang tersebut saling berdempetan dan terlihat tidak teratur, sehingga menimbulkan kesan semrawut. Untuk lebih jelasnya bentuk sarana dagang PKL dapat dilihat pada gambar 3.5, 3.6 dan 3.7.

Lokasi tempat aktivitas PKL di selalu mendekati pintu masuk, baik untuk ke Kawasan Perdagangan Panbil maupun pintu masuk untuk ke Kawasan Industri Muka Kuning. Lokasi yang sangat strategis tersebut selain menjadi tempat penumpang yang naik turun untuk berganti kendaraan umum, juga merupakan tempat lalu lalang yang sangat ramai dilalui pengunjung. Sehingga pemilihan lokasi tersebut dirasakan pedagang akan sangat menguntungkan untuk mereka memamerkan dagangannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.8, 3.9 dan 3.10.



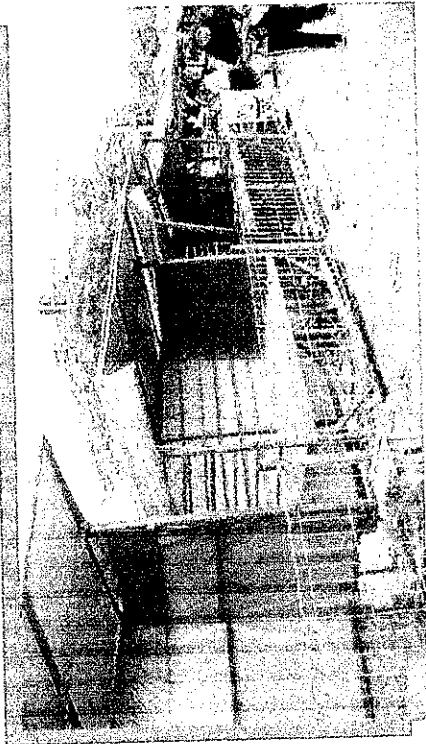
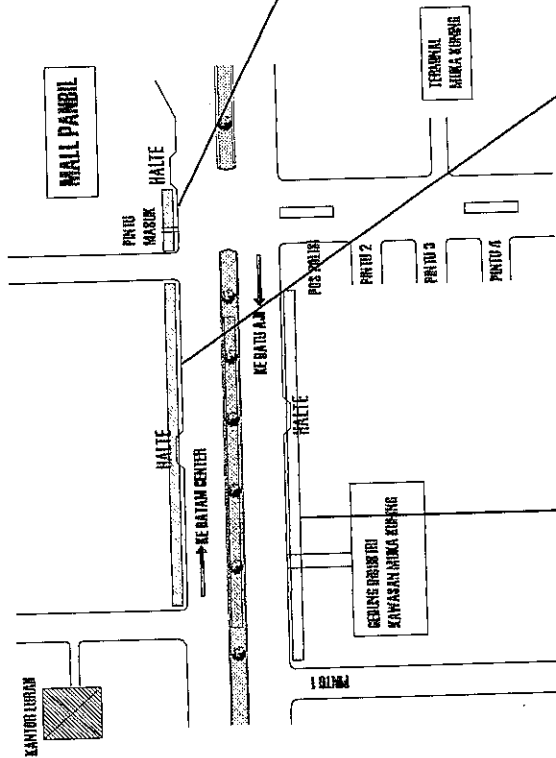
GAMBAR 3.2
JENIS DAGANGAN BERUPA MAKANAN



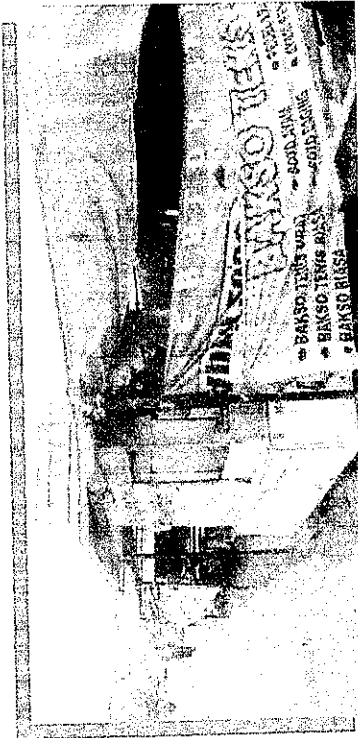
GAMBAR 3.3
JENIS DAGANGAN BERUPA NON MAKANAN



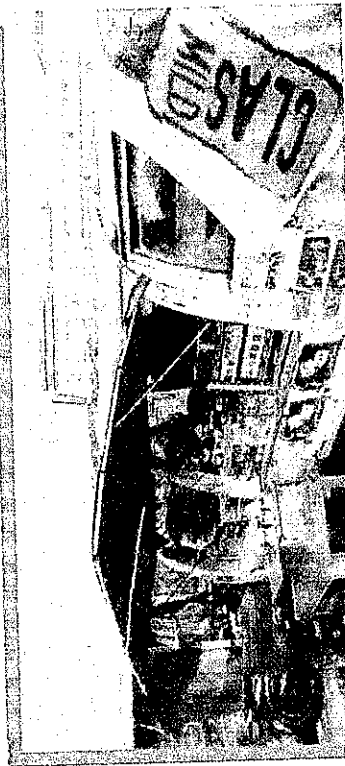
GAMBAR 3.4
JENIS DAGANGAN BERUPA JASA



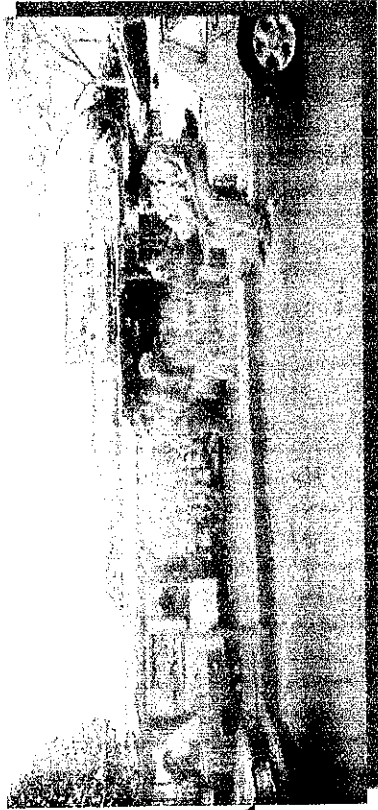
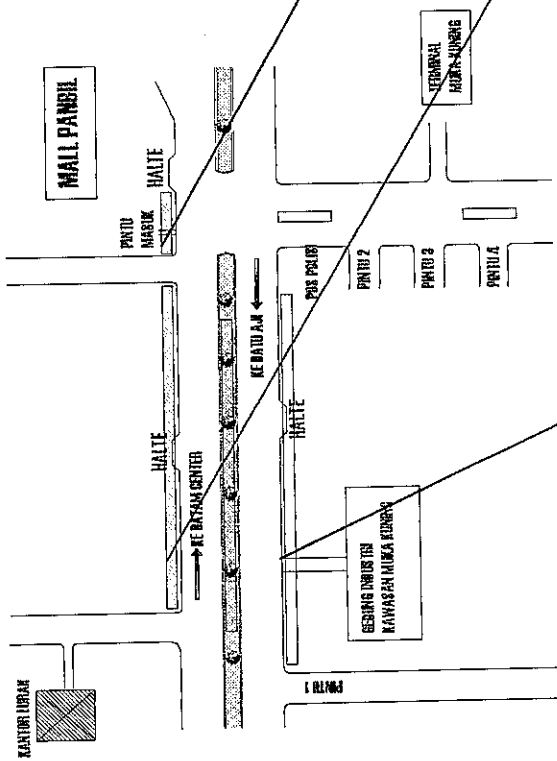
GAMBAR 3.5
SARANA YANG DITINGGALKAN PKL



GAMBAR 3.7
SARANA DAGANG PKL BERUPA WARUNG
SEMI PERMANEN



GAMBAR 3.6
SARANA DAGANG PKL BERUPA KENDARAAN
RODA EMPAT YANG DIPARKIR



GAMBAR 3.8
LOKASI PKL DI TROTOAR JALAN



GAMBAR 3.10
LOKASI PKL DI BAHU JALAN



GAMBAR 3.9
LOKASI PKL DI PINTU MASUK MUKA KUNING

3.3 Karakteristik Aktivitas PKL

3.3.1 Waktu Berdagang PKL

Waktu berdagang PKL bervariasi antara setiap pedagang, misalnya saja pedagang makanan lebih cenderung berjualan dari pagi sampai larut malam. Sedangkan pedagang yang menjual non makanan dan jasa lebih cenderung berjualan tidak terlalu pagi dan tutup tidak terlalu malam.

Hal tersebut dikarenakan kegiatan PKL yang menyesuaikan dengan keadaan pengguna jasanya yaitu dengan pekerja Kawasan Perdagangan Panbil dan Kawasan Industri Muka Kuning dan kebiasaan pola hidup masyarakat sekitar.

3.3.2 Jenis Dagangan PKL

Jenis dagangan PKL untuk di Kawasan Perdagangan Panbil dibagi dalam tiga jenis dagangan yaitu makanan, non makanan dan jasa. Pedagang makanan meliputi makanan kecil, minuman, makanan olahan, lauk pauk, mie bakso/ayam, buah-buahan dan sembako. Pedagang yang menjual non makanan meliputi pakaian, sepatu/sandal, tas, alat rumah tangga, aksesoris, handphone dan gorden. Dan pedagang jasa meliputi tambal ban/isi gas, tukang jahit reparasi dan bengkel.

3.3.3 Sarana Fisik Dagangan PKL

Dalam menjalankan aktivitasnya sarana dagangan yang dipergunakan PKL terdiri dari gerobak/kereta dorong, warung semi permanent, gelaran meja dan kendaraan roda dua dan roda empat. Penggunaan sarana perdagangan dengan jenis gerobak/kereta, gelaran meja dan kendaraan baik roda dua maupun roda empat

walaupun ada di kawasan ini tetapi memiliki jumlah yang relatif sedikit terutama untuk kendaraan. Penggunaan sarana dagangan yang paling banyak dijumpai adalah warung semi permanen.

Hal tersebut menurut Waworoentoe (dalam Widjajanti, 2000 : 39 – 40) disebutkan tentang penggunaannya adalah : gerobak/kereta dorong merupakan bentuk sarana yang terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu gerobak/kereta dorong tanpa atap dan gerobak/kereta dorong yang beratap untuk melindungi barang dagangan dari pengaruh cuaca. Warung semi permanen merupakan bentuk sarana yang diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan kursi dan meja bagian atap dan sekelilingnya biasanya ditutup dengan pelindung yang terbuat dari kain plastik, terpal atau lainnya yang tidak tembus air. kios merupakan bentuk sarana PKL yang menggunakan papan-papan dan diatur sedemikian rupa sehingga menyerupai bilik semi permanen, yang mana pedagang bersangkutan juga tinggal ditempat tersebut.

3.3.4 Golongan Pengguna Jasa PKL

Keberadaan PKL di Kawasan Perdagangan Panbil sangat membantu para pekerja sektor formal yang banyak terdapat di sekitar kawasan tersebut baik pekerjaan sektor perdagangan dan jasa yang terdapat di Kawasan Perdagangan Panbil, maupun pekerja industri yang terdapat di Muka Kuning. Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Rachbini dan Hamid (1994:92), menyatakan bahwa dari sekitar dua juta buruh atau pegawai sektor formal (swasta maupun negeri) di Jakarta kurang lebih satu setengah juta membeli makanan dari sektor formal.

Hanya dengan cara ini mereka dapat bertahan dalam kondisi gaji di sektor formal yang rata-rata rendah

Tidak jarang pengunjung yang akan berbelanja ke Kawasan Panbil Mall juga singgah untuk berbelanja sejenak pada PKL tersebut. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Dan Dimara (dalam Rusli 1992:39), bahwa pada umumnya golongan pengguna jasa yang dilayani oleh aktivitas PKL adalah golongan dengan penghasilan rendah dan sedang, walaupun ada kalangan golongan atas yang mendapatkan pelayanan dari PKL seperti pedagang sayuran dan buah-buahan ataupun penjual jasa.

3.3.5 Skala Pelayanan PKL

Skala pelayanan kegiatan PKL di Kawasan Perdagangan Panbil selain melayani masyarakat yang berasal dari pekerja yang terdapat pada sekitar kawasan tersebut, yaitu masyarakat yang terdapat di Kelurahan Sei Beduk dan terdiri dari pekerja Industri Muka Kuning, Kawasan Industri Panbil dan Kawasan Perbelanjaan Panbil. Tidak jarang pengunjung yang menggunakan jasa ini adalah masyarakat sekitar Kota Batam.

3.3.6 Sifat Pelayanan PKL

Sifat pelayanan PKL yang terdapat di Kawasan Perdagangan Panbil merupakan pedagang yang menetap sehingga untuk dapat menikmati kegiatan ini pembeli harus mendatangi perdagangan. Selain itu pedagang tersebut juga terkadang ada yang memberikan pelayanan menetap yang sementara dan

berpindah apabila dirasakan tidak menguntungkan, walaupun jumlahnya relatif sedikit.

Menurut Mc. Gee dan Yeung (1977:82) sifat pelayanannya PKL tersebut dapat dikategorikan sebagai pedagang menetap (*Static*) yang mempunyai bentuk layanan dengan cara dan sifat menetap pada suatu lokasi tertentu. Setiap pembeli atau konsumen harus datang sendiri ketempat dimana ia berada. Dan pedagang semi menetap (*semi static*) yang mempunyai bentuk layanan menetap yang sementara, yaitu hanya pada saat-saat tertentu saja. Pedagang akan menetap bila ada kemungkinan datangnya pembeli yang cukup besar. Apabila tidak ada kemungkinan pembeli yang cukup besar, maka pedagang tersebut akan berkeliling.

3.4 Karakteristik Ruang PKL

3.4.1 Lokasi PKL

Lokasi Penelitian ini terdapat pada jalan Jendral Ahmad Yani. Sebagai jalan utama menuju kota dengan dua jalur, median dan empat lajur ini sangat banyak dilalui baik oleh kendaraan umum dan pribadi. Pemberhentian kendaraan yang terdapat di kedua sisi jalan memberikan peluang PKL untuk menjajakan dagangannya bagi para pekerja maupun para pengunjung yang akan bekerja ke Kawasan Perdagangan Panbil dan Kawasan Industri Muka Kuning maupun pengunjung yang akan ke kawasan tersebut.

Kondisi PKL yang terdapat di Jendral Ahmad Yani yang menuju ke Batu Aji memiliki aktivitas perdagang yang terdiri dari penjual makanan kecil,

minuman, makanan olahan, lauk pauk, mie baso/ayam, buah-buahan, sembako, pakaian, sepatu/sandal, aksesoris, handphone, tambal ban/isi gas, tukang jahit reparasi dan bengkel. Untuk PKL yang terdapat di jalur jalan Jendral Ahmad Yani menuju Batam Center adalah makanan kecil, minuman, makanan olahan, lauk pauk, mie baso/ayam, buah-buahan, pakaian, sepatu/sandal, aksesoris, gorden dan tambal ban/isi gas. Sedangkan PKL yang berjualan di median jalan merupakan PKL yang berjualan buah-buahan.

3.4.2 Pola Penyebaran PKL

Pola penyebaran PKL di Kawasan Perdagangan Panbil Kota Batam merupakan penyebaran yang memanjang disepanjang pinggir jalan. Hal tersebut dapat dilihat dari PKL yang berjejernya disepanjang kedua jalur pinggir jalan utama yang terdapat di jalan Jendral Ahmad Yani, baik yang menuju ke Batu Aji, sepanjang median jalan dan jalan Jendral Ahmad Yani yang menuju ke Batam Center.

Berdasarkan penelitian yang di kemukakan oleh Mc. Gee dan Yeung (1977:36-37) pola ini disebut dengan pola memanjang (*linier agglomeration*), yang terjadi disepanjang atau di pinggir jalan utama (*main street*) atau pada jalan yang menghubungkan jalan utama. Pola perdagangan ini ditentukan oleh pola jaringan jalan itu sendiri. Pola kegiatan linier lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan aksesibilitas yang tinggi pada lokasi yang bersangkutan. Dilihat dari segi PKL itu sendiri, hal ini sangat menguntungkan, sebab dengan menempati lokasi yang

beraksesibilitas tinggi akan mempunyai kesempatan yang tinggi dalam meraih konsumen

3.5 Aspek Normatif

3.5.1 Kebijakan Tata Ruang Pengembangan Perdagangan Kota Batam

Peraturan Daerah Kota Batam Tahun 2004 – 2014 menyebutkan mengenai perdagangan dan jasa sebagai berikut : (Peraturan Daerah Kota Batam, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004 – 2014 hal:59), Lokasi Kecamatan Sei Beduk dalam rencana struktur ruang kota dialokasikan sebagai pusat orientasi yang memberikan pelayanan bagi penduduk dan sebagai pengikat lingkungan untuk berinteraksi dan bersosialisasi antar masyarakat, yang dialokasikan disejumlah lokasi kegiatan perdagangan dan jasa serta fasilitas umum. Sedangkan pada kawasan Muka Kuning dan Panbil pengalokasiannya lebih ditekankan pada pengembangan industri (kawasan-kawasan industri) dengan jenis komoditi yang berorientasi ekspor. Sedangkan menurut pelayanan wilayah Kecamatan, kawasan perdagangan dan jasa dialokasikan disetiap ibukota Kecamatan menurut kebutuhan juga dialokasikan di :

1. Sekitar Simpang Sungai Harapan (ruas jalan Gajah Mada dan jalan R.E Martadinata), dan di sepanjang jalan dari Simpang Base Camp sampai Waterfront City, di Kecamatan Semarang;
2. Sekitar Simpang jalan Hang Tuah dengan jalan Hang Jebat (sebelah Timur Laut Bandara Hang Nadim), dan di sebelah Selatan Simpang jalan Hang

- Kesturi dengan jalan Hasanudin (Selatan Bandara Hang Nadim), di Kecamatan Nongsa;
3. Sekitar Simpang Trans Bareleng (Simpang jalan Trans Bareleng dengan jalan R. Suprpto), dan di Simpang Duriangkang (Simpang jalan S. Parman dengan jalan menuju Waduk Duriangkang), di Kecamatan Sei Beduk;
 4. Pulau Galang Baru, Kecamatan Galang, pada Kawasan Strategis.

Dengan jenis kegiatan yang akan dikembangkan di sub pusat ini disesuaikan dengan kebudayaan dan daya dukung lahannya diantaranya berupa : bank cabang pembantuan jasa keuangan lainnya; supermarket, pertokoan ataupun ruko; rumah makan/kantin/pujasera; puskesmas pembantu, balai pengobatan, poliklinik dan apotik; salon kecantikan; bengkel; warpostel dan telepon umum; taman; dan fasilitas pendukung lainnya.

3.5.2 Kebijakan Program Pengembangan PKL di Kota Batam

Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2001-2005 menyebutkan Program Pengembangan Usaha Daerah dengan Program Kegiatan Pembangunan Ekonomi Lemah, dengan kegiatan sebagai berikut (Pemerintah Daerah Kota Batam, Rencana Strategis Pembangunan Kota Batam Tahun 2001-2005, hal:41):

1. Menjalin kerjasama antara pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha kuat;
2. Pemberian bantuan/penyediaan pinjaman modal dengan syarat yang lunak dan dilakukan secara bergulir;

3. Pembentukan semacam lembaga keuangan non bank yang secara khusus menangani perguliran dana tersebut;
4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia bagi usaha kecil dan menengah (UKM);
5. Melaksanakan inventarisasi potensi pengembangan UKM;
6. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana bagi usaha kecil seperti pembangunan pasar dan penataan kawasan sektor informal.

BAB IV
ANALISIS KARAKTERISTIK DAN PERILAKU PEDAGANG KAKI
LIMA DI KAWASAN PANBIL KOTA BATAM

4.1 Karakteristik Pedagang Kaki Lima

4.1.1 Karakteristik Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima

Analisis sosial ekonomi PKL terdiri dari daerah asal, tingkat pendidikan, status pekerjaan dan lamanya bekerja

4.1.1.1 Daerah Asal

Penggunaan daerah asal PKL dilakukan untuk mengetahui kondisi eksisting PKL sehingga dapat diketahui siapakah sebenarnya yang menjadi PKL di Kawasan Panbil Kota Batam. Gambaran selengkapnya mengenai daerah asal responden dapat dilihat pada tabel IV.1

TABEL IV.1
ANALISIS DAERAH ASAL PKL

No	Daerah Asal	Frekwensi	Persen
1.	Bengkulu	1	4.5
2.	Jawa	4	18.2
3.	Sumbar	12	54.4
4.	Sumut	5	22.7
Jumlah		22	100

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Karakteristik PKL menurut Julius An-naf (dalam Widodo, 2000:31) salah satunya disebutkan bahwa sebagian besar PKL merupakan pendatang dari daerah dan belum memiliki status kependudukan yang sah di kota. Hal tersebut sesuai dengan keadaan yang terjadi di Kawasan Panbil berdasarkan hasil wawancara dengan responden, diketahui bahwa PKL umumnya berasal dari luar Kota Batam.

Dari tabel diatas diketahui bahwa PKL yang berada di Kawasan Panbil Kota Batam berasal dari luar Pulau Batam, dengan daerah asal yang paling banyak adalah Sumbar berjumlah 11 responden dari 22 responden yaitu sebesar 54.4 %. Hal tersebut disebabkan oleh adanya suatu adat istiadat bahwa laki-laki sebaiknya melakukan perantauan atau mencari pekerjaan di kota lain. Selain hal itu disebutkan juga alasan-alasan lain yang menyebabkan kepindahan dari daerah asal antara lain keterbatasan pekerjaan di daerah asalnya, sehingga sangat sukar bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan di daerah asalnya. Hal tersebut kemudian juga ditambah dengan keadaan teman-temannya yang telah bekerja di Kota Batam yang kemudian pulang ke daerah asal dengan kondisi yang lebih baik. Alasan lainnya adalah untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak sehingga mengharapkan perbaikan taraf hidup.

Kenyataan dilapangan yang harus mereka hadapi adalah sebaliknya yaitu di Kota Batam sukar untuk mendapatkan pekerjaan dan untuk bertahan hidup, dengan modal yang terbatas maka dijatuhkanlah pilihannya dengan bekerja sebagai PKL dengan berlokasi pada ruang-ruang publik.

Daerah asal yang terbanyak tersebut kemudian diikuti dengan Sumut yaitu berjumlah 5 responden sebesar 22,7%, Jawa berjumlah 4 responden yaitu 18.2% dan Bengkulu 1 responden yaitu 4,5 %.

4.1.1.2 Tingkat Pendidikan

Analisis ini diperlukan untuk mengetahui pemahaman pedagang terhadap lokasi dan tempat aktivitas berdagang, sehingga akan diketahui pemahaman pedagang tentang peraturan daerah dan kebijakan yang berlaku. Adapun gambaran mengenai tingkat pendidikan PKL dapat dilihat pada tabel IV.2

TABEL IV.2
ANALISIS TINGKAT PENDIDIKAN PKL

No	Tingkat Pendidikan	Frekwensi	Persen
1.	SD	1	4.5
2.	SLTP	4	18.2
3.	SLTA	15	68.2
4.	D3	2	9.1
Jumlah		22	100

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Karakteristik PKL menurut Julius An-naf (dalam Widodo, 2000:31) salah satunya disebutkan bahwa tingkat pendidikan mereka umumnya relatif rendah. Hal tersebut tidak berlaku pada PKL yang berada di Kawasan Panbil.

Dari tabel diatas diketahui bahwa PKL yang berada di Kawasan Panbil Kota Batam memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik dengan tingkat pendidikan terbanyak adalah SLTA berjumlah 15 responden dari 22 reesponden yaitu sebesar 68.2%, diikuti SLTP yaitu 4 responden dari 22 responden sebesar 18.2%, D3 sebanyak 2 responden dari 22 responden yaitu 9,1%, sedangkan tingkat pendidikan SD hanya 1 responden dari 22 responden yaitu hanya 4.5%. Dengan pendidikan yang terbanyak merupakan SLTA diketahui bahwa PKL telah memiliki tingkat pendidikan yang baik, sehingga seharusnya PKL dapat memilih jenis pekerjaan yang lebih baik pada sektor formal dibandingkan sektor informal.

Keadaan tingkat peendidikan PKL yang relatif baik tersebut, tidaklah menyebabkan mereka langsung dapat diserap pada sektor formal. Dengan semakin bertambahnya penduduk pendatang yang akan mencari kerja di Kota Batam menyebabkan semakin sengitnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan disektor formal.

Tenaga kerja pendatang yang cukup banyak kemudian ditambah dengan sistem kontrak kerja yang tidak memihak pekerja yaitu untuk menghindari memiliki pekerja tetap pemilik pabrik/perusahaan memilih untuk mempekerjakan pegawai dengan Sistem Ikatan Kontrak. Kontrak tersebut ada yang berjangka waktu 6 (enam) bulanan, 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun. Setelah masa kontrak habis terkadang mereka dipanggil untuk melakukan test kembali dan membuat ikatan kontrak yang baru bagi yang lulus dan terkadang sedangkan yang tidak lulus tidak akan dikontrak lagi dan harus mencari pekerjaan baru. Hal tersebut tidak jarang setelah masa ikatan kontraknya habis mereka tidak dipanggil lagi.

Bagi pekerja yang tidak dipanggil lagi untuk bekerja setelah masa kontraknya habis oleh perusahaannya bekerja memiliki kecenderungan untuk berusaha pada sektor informal, biasanya adalah pekerja laki-laki. Untuk mencukupi hidupnya karena berasal dari luar Batam tentu saja mereka harus berusaha semampunya melakukan pekerjaan yang mampu dikerjakan untuk hidup. Kesempatan kemudian mereka rasakan pada sektor informal. Keadaan tersebut tidak jarang juga bahwa PKL itu sendiri berasal dari masyarakat pendatang yang berada pada kawasan sekitar yang memang bertujuan langsung untuk bekerja sebagai PKL.

Dapat disimpulkan bahwa pekerja sektor PKL merupakan pekerja dengan tingkat pendidikan yang relatif baik, sedangkan alasan mereka berusaha pada bidang ini dikarenakan sukarnya mendapatkan pekerjaan dibidang industri, telah habisnya masa kontrak kerja mereka pada sektor industri dan keberadaan masyarakat disekitar yang bertujuan menjadi PKL

4.1.1.3 Status Pekerjaan

Analisis ini dipergunakan untuk mengetahui dampak yang akan terjadi jika keberadaan PKL tersebut dihapuskan secara tetap namun tidak diberikan pemecahan dari permasalahan tenaga kerja tersebut, adapun gambaran mengenai status pekerjaan tersebut dapat dilihat pada tabel IV.3.

Dari tabel diatas diketahui bahwa PKL yang berada di Kawasan Panbil Kota Batam menjadikan perdagangan sebagai pekerjaan utama yaitu sebanyak 18 dari 22 responden yang berjumlah 81.8%.

TABEL IV.3
ANALISIS STATUS PEKERJAAN PKL

No	Status Pekerjaan	Frekwensi	Persen
1.	Pekerjaan Utama	18	81.8
2.	Pekerjaan Sampingan	1	4.5
3.	Pekerjaan Sementara	3	13.6
4.	Membantu Orang Tua	0	0.0
Jumlah		22	100

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Menurut Kartini Kartono (dalam Widodo, 2000:28), menyebutkan ciri-ciri PKL yang salah satunya adalah bahwa sebagian dari PKL melaksanakan pekerjaan secara penuh yaitu berupa "full time job", sebagian lagi melakukan setelah jam kerja atau pada waktu senggang dalam rangka usaha mencapai 'additional'. Hal tersebut berlaku juga di Kawasan Panbil Kota Batam, dengan status pekerjaan PKL tersebut yang merupakan pekerjaan utama maka akan sangat sukar bagi pemerintah untuk menghapus kegiatan ini jika tidak dibarengi dengan pencarian pekerjaan baru bagi mereka. Hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan PKL yang walaupun sering ditertibkan, namun pasti mereka akan muncul kembali, sehingga keadaan tersebut menjadikan sangat dilematis bagi pemerintah. Melihat kondisi tersebut sudah seharusnya pemerintah bukan hanya mulai memikirkan lokasi yang tepat bagi PKL untuk berusaha tetapi sudah mulai bertindak tentang keberadaan aktivitas usaha tersebut yang merupakan sumber mata pencarian pokok sebagian penduduk. Sehingga pemerintah perlu menggesa

lokasi tempat beraktivitas PKL yang saling mendukung dengan lingkungan sekitarnya.

4.1.1.4 Lama Bekerja

Dengan mengetahui lamanya PKL telah berusaha pada bidang ini memberikan asumsi bahwa usaha PKL ternyata dapat menopang kehidupan pekerja dengan memberikan penghasilan bagi pekerjanya sehingga mereka mampu bertahan. Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran tentang lamanya mereka berusaha sebagai PKL dapat dilihat pada tabel IV.4.

TABEL IV.4
ANALISIS LAMANYA BEKERJA

No	Lamanya Bekerja	Frekwensi	Persen
1.	Kurang dari 1 Tahun	0	0.0
2.	Lebih dari 1 Tahun	3	13.6
3.	Lebih dari 2 Tahun	8	36.4
4.	Lebih dari 3 Tahun	11	49.6
Jumlah		22	100

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Dari tabel diatas diketahui bahwa kegiatan PKL tersebut telah lama dilakukan pedagang yaitu dengan jawaban terbanyak telah berusaha lebih dari 3 tahun sebesar 49,6 % sebanyak 11 dari 22 responden. Keberadaan PKL yang telah bekerja lebih dari 3 tahun dapat dipastikan bahwa dengan lamanya bekerja

pada lokasi tersebut menjadikan kegiatan PKL merupakan mata pencarian yang pokok bagi PKL. Hal tersebut menurut Julius An-naf (dalam Widodo, 2000:31) menyebutkan bahwa karakteristik PKL salah satunya adalah bahwa mereka mulai berdagang sudah cukup lama. Melihat kondisi diatas akan sangat sukar bagi pedagang untuk pindah kepada kegiatan lain selain berdagang.

Sehingga dari analisis tersebut diperoleh pertanyaan yang ditujukan kepada PKL sehubungan dengan pengetahuan mereka yang melarang berjualan di trotoar dan bahu jalan. Jawaban terbanyak yang disampaikan responden adalah mereka tahu bahwa dilarang untuk berjualan ditrotoar jalan sebanyak 14 responden yaitu 63,6 % dan tidak tahu bahwa mereka dilarang untuk berjualan di trotoar jalan sebanyak 8 responden yaitu 36,4 %.

4.1.2 Karakteristik Aktivitas PKL

Analisis aktivitas PKL terdiri dari golongan pengguna jasa, sifat pelayanan, jenis dagangan dan sarana fisik.

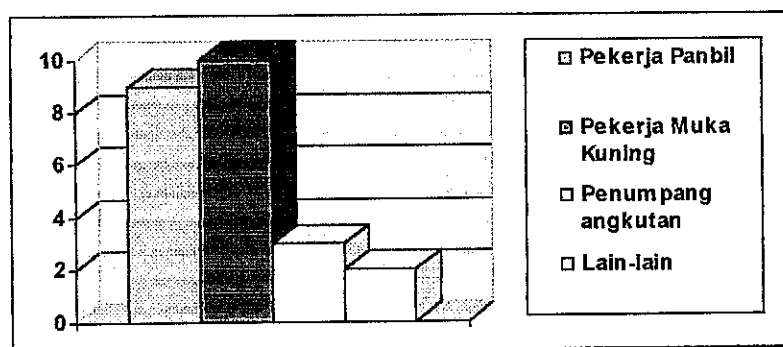
4.1.2.1 Analisis Golongan Pengguna Jasa

Golongan pengguna jasa PKL di Kawasan Panbil terdiri dari empat golongan yaitu pekerja dari Panbil, pekerja Muka Kuning, pembeli dari penumpang angkutan yang singgah dan pembeli yang tidak tentu (bisa dari mana saja). Untuk lebih jelasnya gambaran mengenai golongan pengguna jasa PKL dapat dilihat pada tabel IV.5 dan gambar 4.1.

TABEL IV.5
ANALISIS GOLONGAN PENGGUNA JASA

No	Golongan Pengguna Jasa	Frekwensi	Persen
1.	Pekerja Panbil	9	40.9
2.	Pekerja Muka Kuning	10	45.5
3.	Penumpang angkutan	2	9.1
4.	Lain-lain	1	4.5
Jumlah		22	100

Sumber : Hasil Analisis, 2005



Sumber : Hasil Analisis, 2005

GAMBAR 4.1
GOLONGAN PENGGUNA JASA

Dari hasil penelitian tersebut menurut Rachbini dan Hamid (1994:92), menyatakan bahwa dari sekitar dua juta buruh atau pegawai sektor formal (swasta maupun negeri) di Jakarta kurang lebih satu setengah juta membeli makanan dari sektor formal. Hanya dengan cara ini mereka dapat bertahan dalam kondisi gaji di sektor formal yang rata-rata rendah. Hal tersebut juga terjadi di Kawasan Panbil. Dari tabel diatas diketahui bahwa golongan pengguna jasa PKL terbanyak

merupakan pekerja Muka Kuning 45.5 % yaitu sebanyak 10 dari 22 responden. Melihat pengguna jasa PKL yang terbanyak adalah pekerja Muka Kuning dapat diketahui bahwa walaupun telah disediakan tempat perijinan dan tempat perbelanjaan bagi karyawan, namun kecenderungan untuk memilih dagangan dengan harga yang lebih terjangkau merupakan alternatif bagi pekerja. Sehingga walaupun kegiatannya merupakan kegiatan yang informal namun pengguna jasa ini merupakan mereka yang bekerja pada sektor formal. Walaupun kegiatan ini ilegal dan mengganggu kesan wajah kota namun kegiatan ini juga telah banyak membantu masyarakat lainnya.

Kemudian golongan pengguna jasa tersebut diikuti oleh pekerja Panbil 9 dari 22 responden yaitu sebesar 40.9 %, penumpang angkutan yang akan singgah yaitu 2 dari 22 responden 9.1 % dan lain-lain (bisa dari mana-mana saja) 4.5 % yaitu hanya 1 dari 22 responden.

4.1.2.2 Analisis Sifat Pelayanan

Untuk mengetahui sifat pelayanan PKL dipergunakan dengan cara mengetahui cara mereka melakukan kegiatan setiap hari. Untuk lebih jelasnya mengenai cara mereka melakukan kegiatan dapat dilihat pada tabel IV.6

Dari tabel diatas diketahui sifat pelayanan PKL hampir seluruhnya memberikan sifat pelayanan yang menetap yaitu sebanyak 21 dari 22 responden yaitu 95.5 %.

TABEL IV.6
ANALISIS SIFAT PELAYANAN

No	Sifat pelayanan	Frekwensi	Persen
1.	Menetap	21	95.5
2.	Semi menetap	1	4.5
3.	Berpindah-pindah	0	0.0
4.	Tidak tentu	0	0.0
Jumlah		22	100

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Menurut Mc. Gee dan Yeung (1977:82) sifat pelayanannya PKL dapat dikelompokkan dalam pedagang menetap, pedagang semi menetap dan pedagang keliling. Pedagang menetap mempunyai bentuk layanan dengan cara dan sifat menetap pada suatu lokasi tertentu. Setiap pembeli atau konsumen harus datang sendiri ketempat dimana ia berada.

Dengan pola pelayanan yang menetap memperlihatkan bahwa pada kawasan studi merupakan lokasi yang sangat berpotensi dalam menjaring konsumen. Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakukan diketahui bahwa alasan mereka untuk melakukan pelayanan yang bersifat menetap adalah dikarenakan selain ramainya pengunjung yang berlalu lalang juga dikarenakan PKL tersebut telah memiliki pelanggan tersendiri untuk pedagang makanan, sehingga untuk berpindah-pindah akan menyebabkan mereka kehilangan pelanggannya.

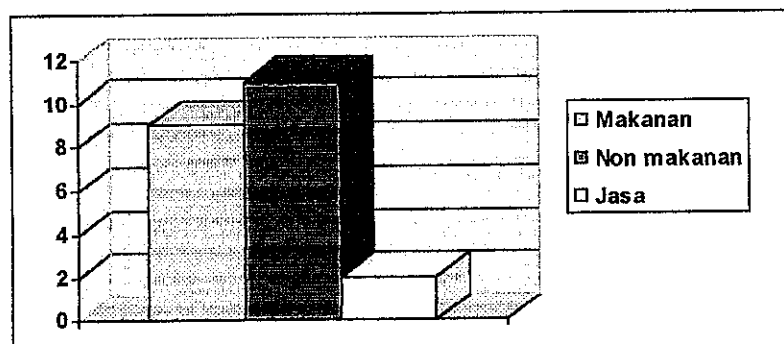
4.1.2.3 Analisis Jenis Dagangan

Jenis dagangan PKL yang terdapat di Kawasan Panbil dikelompokkan dalam dagangan makanan, bukan makanan dan jasa. Untuk lebih jelasnya gambaran mengenai jenis dagangan PKL dapat dilihat pada tabel IV.7 dan gambar 4.2.

TABEL IV.7
ANALISIS JENIS DAGANGAN

No	Jenis dagangan	Frekwensi	Persen
1.	Makanan	9	40.9
2.	Bukan makanan	11	50.0
3.	Jasa	2	9.1
Jumlah		22	100

Sumber : Hasil Analisis, 2005



Sumber : Hasil Analisis, 2005

GAMBAR 4.2
DIAGRAM JENIS DAGANGAN

Menurut Mc Gee dan Yeung (1977:82–83) jenis dagangan PKL sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang ada disekitar kawasan PKL beraktivitas. Misalnya

dikawasan perdagangan maka jenis dagangannya juga beraneka ragam seperti makanan/minuman, kelontong, pakaian dan lain-lain.

Dari tabel diatas diketahui bahwa jenis dagangan PKL terbanyak adalah bukan makanan (meliputi : pakaian, sepatu/sandal, tas, kaos kaki, alat rumah tangga, aksesoris, handphone dan gorden) yaitu 11 dari 22 responden sebesar 50,0%. Hal tersebut dikarenakan kawasan studi memiliki kegiatan dominan antara perindustrian dan perdagangan. Dipilihnya jenis dagangan yang berupa bukan makanan dikarenakan bahwa pekerja terbanyak yang berada dikawasan ini adalah perempuan. Sehingga dalam pemilihan jenis dagangan yang akan dibeli konsumen disesuaikan dengan kebutuhan konsumen perempuan yaitu merupakan konsumen yang terbanyak dikawasan ini. Dalam bekerja kegiatan industri terdiri dari 2 shift yaitu shift pagi dan shift malam, dengan jatah satu hari libur dalam seminggu. Shift pertama yaitu shift pagi hari bekerja dari jam 07.00 pagi sampai dengan jam 15.00 sore, memiliki waktu istirahat sekali dan diberikan jatah makan siang juga satu kali. Sedangkan shift malam yaitu dimulai pada jam 19.00 malam sampai dengan jam 07.00 pagi, dengan waktu istirahat dua kali dan tetap diberikan makan satu kali.

Sesuai dengan kebiasaan perempuan pada umumnya, pada saat tidak bekerja biasanya mereka akan memasak makanan untuk dirinya sendiri. Cara ini selain dirasakan lebih hemat juga mereka dapat menabung untuk dikirim ke kampungnya, karena biasanya para pekerja tersebut memiliki tanggungan di kampungnya masing-masing. Sehingga minat pekerja untuk membeli makanan siap saji dengan harga yang lebih mahal dibandingkan apabila mereka memasak

sendiri akan lebih kecil karena mereka telah mempersiapkan sendiri makanan yang akan mereka makan dirumah.

Sedangkan jenis dagangan PKL yang berupa makanan (meliputi : makanan kecil, minuman, makanan olahan, lauk pauk, mie bakso/ayam, buah-buahan dan sembako) berjumlah 9 dari 22 responden yaitu 40.9 %. Hanya 2 dari 22 responden yaitu sebesar 9.1% yang memilih dagangan jasa (meliputi : tambal ban/isi gas, tukang jahit reparasi dan bengkel) hanya 9,1 %. Berdasarkan observasi lapangan terlihat adanya pengelompokan jenis dagangan. Misalnya saja makanan yang berupa makanan olahan akan mengelompok dengan makanan yang merupakan olahan juga. Sedangkan jenis dagangan yang bukan makanan akan mengelompok dengan dagangan yang bukan makanan pula, walaupun keadaan tersebut dapat juga diselingi dengan penjualan dagangan yang berupa makanan namun berupa dagangan makanan kering terdiri dari kemasan kaleng dan botol. Sedangkan jenis yang meliputi : tambal ban/isi gas, tukang jahit reparasi dan bengkel walaupun memiliki jumlah yang relatif sedikit namun juga mengelompok sesuai dengan jenis dagangannya.

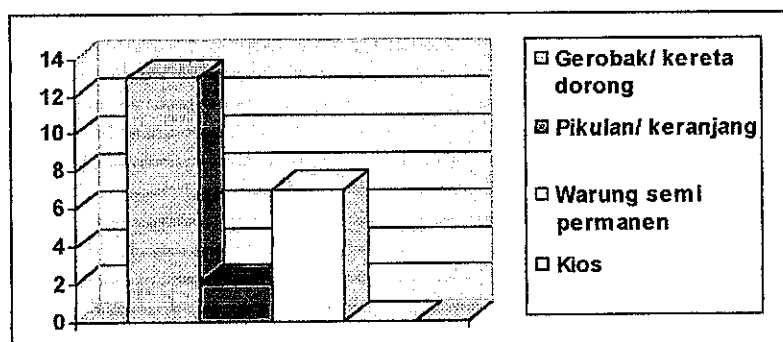
4.1.2.4 Analisis Sarana Fisik

Bentuk sarana dagang yang dipergunakan PKL dalam berjualan dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok. Untuk lebih jelasnya gambaran mengenai sarana fisik yang dipergunakan PKL dapat dilihat pada tabel IV.8 dan gambar 4.3.

TABEL IV.8
ANALISIS SARANA FISIK

No	Sarana Fisik	Frekwensi	Persen
1.	Gerobak/kereta dorong	13	59.1
2.	Pikulan/keranjang	2	9.1
3.	Warung semi permanen	7	31.8
4.	Kios	0	0.0
Jumlah		22	100

Sumber : Hasil Analisis, 2005



Sumber : Hasil Analisis, 2005

GAMBAR 4.3
DIAGRAM SARANA FISIK

Hal tersebut menurut Mc Gee dan Yeung (1977:82) bahwa di kota-kota Asia Tenggara ditemukan bahwa untuk sarana fisik, sarana perdagangan yang dipergunakan oleh PKL dalam menjalankan aktivitasnya sangat bervariasi. Dari hasil penelitian sarana dagangan PKL umumnya sangat sederhana dan biasanya mudah untuk dipindah-pindahkan dan mudah untuk dibawa-bawa dari satu tempat ke tempat lainnya.

Bentuk sarana perdagangan yang dipergunakan oleh PKL menurut Waworoentoe (dalam Widjajanti, 2000:39–40) salah satunya adalah gerobak/kereta dorong, bentuk sarana ini terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu gerobak/kereta dorong tanpa atap dan gerobak/kereta dorong yang beratap untuk melindungi barang dagangan dari pengaruh cuaca. Bentuk ini dapat dikategorikan dalam bentuk aktivitas PKL yang permanen (*static*) atau semi permanen (*semi static*), dan umumnya dijumpai pada PKL yang berjualan makanan, minuman dan rokok. Selain jenis yang didagangkan PKL berupa makanan dan minuman dengan menggunakan sarana tersebut juga penggunaan sarana dipakai untuk penggunaan penjualan bukan makanan seperti pakaian, sepatu/sandal, tas, kaos kaki, alat rumah tangga, aksesoris, handphone dan gorden. Jenis sarana dagang yang dipergunakan PKL sesuai dengan jenis dagangan yang diajakan.

Dari tabel diatas diketahui bahwa jenis sarana dagang PKL yang paling banyak adalah gerobak/kereta dorong yaitu 13 dari 22 responden yaitu sebanyak 59.1%, warung semi permanen 7 dari 22 responden yaitu sebanyak 31.8%, gelaran dan pikulan/keranjang dalah yang terkecil yaitu 2 dari 22 responden yaitu 9.1%. Pemilihan jenis sarana tersebut berdasarkan hasil wawancara memiliki fungsi tersendiri bagi PKL, yaitu dengan sarana yang berbentuk gerobak/kereta dorong akan sangat memudahkan PKL apabila terjadi penertiban yang biasanya selalu dilakukan secara tiba-tiba oleh pemerintah. Sehingga akan mengurangi resiko terjadinya kerugian PKL.

Penggunaan sarana dagang yang berupa warung semi permanen telah mengganggu aktivitas pengguna jalan. Baik sarana yang diletakkan di trotoar jalan

maupun sarana yang diletakkan di bahu jalan. Dengan menjadikan trotoar dan bahu jalan lebih sempit dan harus berdesak-desakan dengan pengunjung yang sedang berbelanja atau pengunjung yang hanya sekedar melihat-lihat dagangan PKL. Hal tersebut kemudian ditambah dengan kebiasaan PKL yang meninggalkan sarana dagangannya di lokasi yang ditempatinya. Ketika tidak sedang berjualan PKL membiarkan sarana dagangnya terbengkalai dan baru keesokan harinya mereka menggunakan sarana dagang itu kembali. Selain beralasan akan sukar jika dibuka dan dipasang kembali keesokan harinya mereka merasa peletakan sarana dagang yang dibiarkan di lokasi tersebut cukup aman karena tidak ada yang akan mencuri atau membersihkan sarana dagangnya. Namun dengan bentuk yang sangat sederhana yang terdiri dari kerangka yang ditutupi dengan terpal adalah sangat mengganggu pemandangan kawasan studi.

Keadaan sarana PKL yang sangat sederhana tersebut juga dijelaskan oleh Julius An-naf (dalam Widodo, 2000:31) tentang karakteristik PKL yang salah satunya adalah permodalan mereka umumnya sangat lemah dan omzet penjualannya juga relatif kecil. Sehingga untuk mengembangkan sarana yang lebih baik PKL khawatir akan menyebabkan penambahan pembiayaan sehingga akan menyebabkan harga dagangan menjadi mahal pula dan tentunya keadaan tersebut dikhawatirkan mereka akan menyebabkan tidak terjangkau oleh pembeli yang mau berbelanja di sana.

4.2 Pola Ruang Pedagang Kaki Lima

4.2.1 Analisis Pola Penyebaran

Berdasarkan pengamatan dilapangan pola penyebaran PKL di Kawasan Panbil Kota Batam merupakan penyebaran yang memanjang disepanjang pinggir jalan. Hal tersebut dapat dilihat dari peletakan sarana fisik dagang PKL yang berjejer disepanjang kedua jalur pinggir jalan utama yang terdapat di jalan Jendral Ahmad Yani, baik yang menuju ke Batam Center, sepanjang median jalan dan jalan Jendral Ahmad Yani yang menuju ke Batu Aji.

Berdasarkan penelitian yang di kemukakan oleh Mc. Gee dan Yeung (1977:36-37) pola ini disebut dengan pola memanjang (*linier agromeration*), yang terjadi disepanjang atau di pinggir jalan utama (*main street*) atau pada jalan yang menghubungkan jalan utama. Pola perdagangan ini ditentukan oleh pola jaringan jalan itu sendiri. Pola kegiatan linier lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan aksesibilitas yang tinggi pada lokasi yang bersangkutan. Dilihat dari segi PKL itu sendiri, hal ini sangat menguntungkan, sebab dengan menempati lokasi yang beraksesibilitas tinggi akan mempunyai kesempatan yang tinggi dalam meraih konsumen.

Alasan yang banyak diberikan PKL mengenai bentuk pola penyebaran linier tersebut adalah bahwa lokasi berjualan yang memanjang di sepanjang jalan merupakan lokasi yang paling ramai pengunjung yang berlalu lalang yaitu berada disekitar trotoar dan bahu jalan. Dengan keadaan tersebut memberikan kesempatan kepada PKL untuk mempertontonkan dagangannya ketika pembeli hendak ketujuan aktivitas utamanya.

Selain memilih pola penyebaran linier yang berada kedua jalur jalan Jendral Ahmad Yani, PKL juga memilih untuk menggunakan median jalan yang berada dikawasan tersebut. Dengan dua jalur dan empat lajur yang dimilikinya menjadikan jalan ini mempunyai median jalan yang cukup besar yaitu sekitar 3 meter. Masih buruknya kebiasaan pengguna jalan yang melakukan penyeberangan bukan pada zebra cross bisa tetapi dimana saja disepanjang jalan membuka kesempatan kepada PKL untuk memilih median jalan sebagai lokasi berjualan.

4.2.2 Analisis Ruang yang Digunakan

Analisis ini dipergunakan untuk mengetahui dimanakah lokasi PKL melakukan aktivitasnya. Berdasarkan hasil penelitian terhadap PKL bahwa lokasi yang paling banyak didiami PKL adalah di trotoar dan bahu jalan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.9

**TABEL IV.9
ANALISIS RUANG AKTIVITAS**

No	Lokasi Aktivitas	Frekwensi	Persen
1.	Trotoar	14	63.6
2.	Bahu jalan	5	22.7
3.	Median jalan	3	13.7
4.	Taman	0	0.0
Jumlah		22	100

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Dari tabel diatas diketahui bahwa PKL yang berada di Kawasan Panbil Kota Batam memilih lokasi berjualan yang terbanyak adalah di trotoar 63.6% dan bahu jalan 22.7% diikuti dengan berjualan di lokasi median jalan 13.7%.

Lokasi trotoar dan bahu jalan yang merupakan lokasi tempat terkonsentrasinya terbanyak PKL merupakan lokasi yang sangat strategis yang berada di kawasan Panbil. Karena lokasi tersebut memiliki pengunjung yang ramai berlalu lalang, sehingga lokasi akan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi PKL dalam hal menarik konsumen. Lokasi yang berada di trotoar dan bahu jalan yang diminati tersebut lebih spesifiknya terdiri dari dua buah pintu masuk yaitu pintu masuk yang akan menuju ke Muka Kuning dan pintu masuk yang akan menuju ke Panbil.

Lokasi pintu masuk yang akan menuju ke Panbil berada pada jalan Jendral Ahmad Yani yang akan menuju ke Batam Center. Letak pintu masuk tersebut karena merupakan pintu masuk yang selalu digunakan pengunjung umumnya dan pekerja Muka Kuning khususnya untuk masuk ke kawasan perdagangan Panbil. Lokasi ini memiliki aktivitas yang cukup padat terutama pada saat jam-jam istirahat kantor dan pada akan mulai ramai pada saat dibukanya sampai dengan ditutupnya Mall Panbil, yaitu mulai dari jam 09.00 Pagi sampai dengan 21.00 Malam.

Lokasi pintu masuk yang akan menuju ke Muka Kuning berada pada jalan Jendral Ahmad Yani yang akan menuju ke Batu Aji. Pintu masuk ini terutama digunakan oleh pekerja yang merupakan pekerja Muka Kuning. Pintu tersebut merupakan tempat berawal dan berakhirnya aktivitas bekerja yang dilakukan oleh pekerja Muka Kuning. Keadaan tersebut menyebabkan waktu berdagang PKL lebih panjang di kawasan ini. Dapat dilihat dari keberadaan PKL yang telah dimulai dari jam 07.00 pagi sampai dengan 24.00 malam.

Diantara kedua lokasi yang paling diminati oleh para pedagang tentu saja adalah pada pintu masuk Muka Kuning karena memiliki rentang waktu yang lebih lama dan pengunjung yang lebih ramai. Semakin jauh lokasi dari kedua pintu masuk tersebut merupakan lokasi yang tidak diminati PKL, karena lokasi yang jauh dari kedua pintu tersebut jarang dilalui oleh pekerja dan pengunjung. Kenyataan ini dapat dilihat dari kedua halte yang berada di kedua sisi jalan tersebut kurang diminati oleh PKL. Hal ini dikarenakan kebiasaan pengguna dan pemilik kendaraan yang selalu menurunkan penumpang kendaraan berdekatan dengan pintu masuk. Selain itu keberadaan halte yang tidak memiliki trotoar dan pedestrian yang memadai menjadikan halte tidak diminati oleh pengguna jalan untuk berhenti.

4.3 Analisis Pola Ruang Berdasarkan Karakteristik Aktivitas PKL

Analisis ini akan mengkaji hubungan antara pola ruang PKL dengan karakteristik pengguna, jenis barang, sarana fisik, dan sifat pelayanan. Analisis pola ruang berdasarkan pengguna akan diketahui hubungan antara pemilihan lokasi oleh PKL dengan keberadaan konsumen

4.3.1 Analisis Ruang Berdasarkan Konsumen

Berdasarkan tabulasi silang antara ruang (jalan) yang digunakan PKL dengan konsumen pengguna jasa PKL ini, dapat dilihat bahwa konsumen pada umumnya adalah pekerja Muka Kuning (45%) dan pekerja Panbil (41%). Hanya 9% konsumen yang merupakan penumpang yang baru turun dari angkutan. Dengan kata lain lebih dari 80% konsumen pengguna jasa PKL di Kawasan

Panbil merupakan pekerja yang lokasi kerjanya di kawasan ini, yaitu pekerja Panbil dan pekerja Muka Kuning, bukan orang dari luar kawasan tersebut yang sengaja datang untuk memanfaatkan keberadaan PKL ini.

TABEL IV.10
TABULASI SILANG RUANG YANG DIGUNAKAN PKL
DENGAN KONSUMEN PENGGUNA

Crosstab

Count

		Konsumen				Total
		pekerja panbil	pekerja muka kuning	Penumpang Trm angt	lainnya	
ruang jln	trotoar	7	7			14
yg	bahu jln	2	3			5
digunakan	median jln			2	1	3
Total		9	10	2	1	22

Sumber: Analisis penulis, 2005

Baik pekerja Muka Kuning maupun pekerja Panbil pada umumnya bertransaksi dengan PKL yang berada di trotoar jalan, yaitu masing-masing 32% yaitu terdiri dari masing-masing 7 dari 22 responden. Hanya 9% pekerja Panbil yaitu 2 dari 22 responden dan 14% pekerja Muka Kuning yaitu 3 dari 22 responden yang memanfaatkan jasa PKL yang berada di badan jalan, dan tidak ada pekerja yang membeli barang dari PKL yang menggunakan median jalan. Hal ini berbeda dengan pembeli yang merupakan penumpang yang baru turun dari angkutan dimana mereka bertransaksi dengan PKL yang berada di median jalan, namun persentase pembeli dari kelompok konsumen ini relatif kecil (hanya 9% dari total responden).

4.3.2 Analisis Ruang Berdasarkan Sarana Fisik

Tabulasi silang antara ruang yang digunakan PKL dengan sarana fisik yang digunakan memperlihatkan bahwa sarana fisik yang digunakan pada umumnya adalah gerobak yang menempati trotoar jalan, yaitu sebesar 54% (13 dari total 22 responden). Warung semi permanen merupakan sarana ke dua yang paling banyak digunakan yaitu sebesar 27% (6 dari 22 responden) dan mayoritas menempati badan jalan.

TABEL IV.11
TABULASI SILANG RUANG YANG DIGUNAKAN PKL
DENGAN SARANA FISIK YANG DIGUNAKAN

Crosstab

Count

		Sarana fisik yg digunakan			Total
		gerobak	Pikulan/ keranjang	Wrg semi permanen	
ruang jln	trotoar	12		2	14
yg	bahu jln	1		4	5
digunakan	median jln		3		3
Total		13	3	6	22

Sumber: Analisis penulis, 2005

4.3.3 Analisis Ruang Berdasarkan Sifat Pelayanan

Lebih dari 90% PKL di Kawasan Panbil merupakan pedagang dengan sifat pelayanan menetap, hanya 5% saja yang melakukan pelayanan semi menetap. Pedagang yang menetap ini mayoritas menempati trotoar, yaitu sebanyak 64% (14 dari 22 pedagang). Badan jalan merupakan ruang yang digunakan oleh 23% pedagang yang berdagang secara menetap di kawasan ini dan hanya 9% pedagang yang menggunakan median jalan yang berdagang secara menetap. Median jalan

merupakan ruang yang paling sedikit digunakan dan sebagian pedagang yang menggunakan ruang ini (4,5%) adalah pedagang semi menetap.

TABEL IV.12
TABULASI SILANG RUANG YANG DIGUNAKAN PKL DENGAN
SIFAT PELAYANANNYA

Crosstab

Count

		Sifat pelayanan		Total
		menetap	semi menetap	
ruang jln	trotoar	14		14
yg	bahu jln	5		5
digunakan	median jln	2	1	3
Total		21	1	22

Sumber: Analisis penulis, 2005

Ruang berupa media jalan paling sedikit digunakan oleh pada pedagang, meskipun demikian penjual yang menempati ruang tersebut justru ada yang menggunakan sarana berupa warung semi permanen namun ada juga yang menggunakan pikulan atau keranjang. Persentase jumlah pedagang baik yang menggunakan warung semi permanen maupun pikulan (keranjang) dan menempati median jalan relatif kecil, masing-masing 4,5% dan 9% dari total responden sehingga dapat dikatakan tidak signifikan.

4.3.4 Analisis Ruang Berdasarkan Jenis Dagangan

Jenis barang yang dijual oleh PKL di kawasan Panbil dapat dikatakan cukup beragam yaitu makanan, bukan makanan dan jasa. Persentase pedagang yang menjual makanan dan bukan makanan relatif sama besar yaitu masing-

masing 41% (9 dari 22 responden) dan 50% (11 dari 22 responden), hanya 9% pedagang yang menawarkan jasa (2 dari 22 responden). Pedagang penjual makanan maupun bukan makanan pada umumnya menempati trotoar (dengan persentase sebesar 63%) dan bahu jalan (dengan persentase masing-masing 14%). Hanya 3 pedagang yang menawarkan jasa yaitu sebesar 14% dan semuanya menempati bahu jalan.

TABEL IV.13
TABULASI SILANG RUANG YANG DIGUNAKAN PKL
DENGAN JENIS BARANG DAGANGAN

Crosstab

Count

		Jenis barang			Total
		makanan	bkn makanan	jasa	
ruang jln	trotoar	5	9		14
yg	bahu jln	1	2	2	5
digunakan	median jln	3			3
Total		9	11	2	22

Sumber: Analisis penulis, 2005

Berdasarkan keempat tabulasi silang diatas maka dapat disimpulkan bahwa ruang yang paling banyak digunakan oleh PKL di Kawasan Panbil adalah trotoar, yang pembelinya mayoritas adalah pekerja Muka Kuning dan Panbil yang membeli makanan yang dijual dengan gerobak yang menetap di kawasan ini. Sedangkan PKL yang menempati badan jalan pada umumnya berupa warung semi permanen, dengan sifat pelayanan menetap dan menjual barang berupa makanan dan bukan makanan. Hanya 14% pedagang yang menempati median jalan dimana konsumennya bukan pekerja kawasan tersebut (melainkan penumpang yang turun

dari angkutan), barang yang ditawarkan adalah makanan, dan penjualnya tidak ada yang menggunakan gerobak melainkan menggunakan keranjang (pikulan) tidak semuanya melayani secara menetap. Untuk lebih jelasnya pola ruang PKL dapat dilihat pada gambar 4.4.

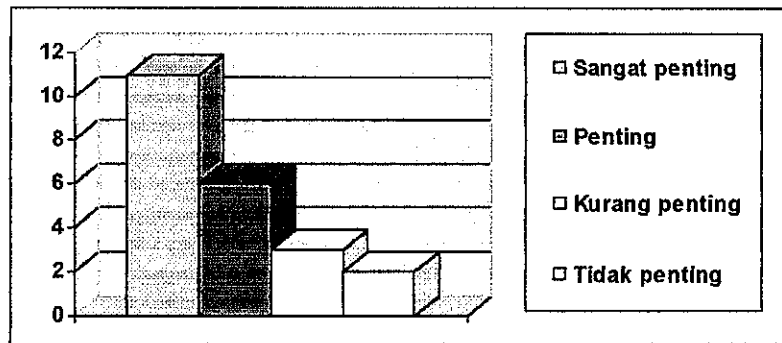
4.4 Analisis Penunjang Lokasi Tempat Aktivitas PKL

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan penertiban terhadap lokasi PKL belum memberikan hasil yang memadai. Keadaan tersebut disebabkan relokasi atau penataan dengan cara penggusuran adalah tidak sesuai dengan karakter atau tuntutan pedagang, keadaan tersebut juga ditambah dengan kurangnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai termasuk sarana transportasi yang selalu tidak mendapatkan respon yang baik. Hal lain yang juga sangat diperhatikan pedagang dalam penempatan lokasinya adalah persepsi konsumen. Untuk lebih jelasnya mengenai persepsi konsumen terhadap lokasi PKL dapat dilihat pada tabel IV.14 dan gambar 4.4.

TABEL IV.14
ANALISIS LOKASI MENURUT PERSEPSI KONSUMEN

No	Lokasi	Frekwensi	Persen
1.	Sangat Penting	11	50.0
2.	Penting	6	27.3
3.	Kurang penting	3	13.6
3.	Tidak Penting	2	9.1
Jumlah		22	100

Sumber : Hasil Analisis, 2005



Sumber : Hasil Analisis, 2005

GAMBAR IV.4
LOKASI MENURUT PERSEPSI KONSUMEN

Dari data diatas dapat diketahui mengenai persepsi konsumen terhadap lokasi PKL adalah sangat penting sebanyak 50,0% sejumlah 11 dari 22 responden, diikuti dengan penting sebanyak 27.3% sejumlah 6 dari 22 responden, kurang penting sebanyak 13.6% sejumlah 3 dari 22 responden dan tidak penting sebanyak 9.1% sejumlah 1 dari 22 responden. Persepsi konsumen terhadap lokasi PKL ini memberikan pengertian bahwa dalam perjalanannya konsumen akan sangat berperan penting dalam penempatan lokasi PKL. Lokasi yang tertata dengan baik merupakan hal yang sangat penting bagi konsumen sehingga akan terbentuk pasar yang baik pula bagi kegiatan sektor ini.

4.5 Aspek Normatif

Analisis normatif terdiri dari persepsi konsumen PKL, persepsi pengelola kawasan, persepsi instansi/dinas, dan perencanaan ruang.

4.5.1 Analisis Persepsi Konsumen PKL

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan diketahui bahwa lokasi yang paling baik menurut konsumen dalam peletakan aktivitas PKL adalah sama dengan persepsi PKL yaitu disekitar pintu masuk ke Kawasan Panbil dan pintu masuk ke Kawasan Muka Kuning karena merupakan lokasi yang paling sering mereka gunakan untuk berlalu lalang dengan jenis dagangan yang mereka inginkan adalah makanan dan bukan makanan.

Penggunaan sarana fisik menurut konsumen yang lebih baik dipergunakan PKL adalah berupa warung semi permanen. Hal tersebut dikarenakan dengan penggunaan sarana seperti tersebut akan lebih memudahkan konsumen untuk dapat melihat langsung jenis dagangan yang diperdagangkan PKL, selain itu dengan penggunaan sarana dagang yang terlalu bagus menyebabkan konsumen takut jika harga dagangan menjadi lebih mahal. Sedangkan keadaan status lokasi yang dimiliki oleh pedagang bukanlah hal yang penting menurut konsumen, berdasarkan hasil wawancara mereka menjawab bahwa status lokasi PKL tidak pernah terpikirkan oleh mereka.

Menurut persepsi konsumen, fenomena PKL menimbulkan dampak positif bagi mereka, karena dengan keberadaan PKL mereka dapat menekan angka pengeluaran rumah tangga. Hal ini dikarenakan barang kebutuhan yang mereka beli di PKL harganya relatif lebih murah dari harga di toko. Oleh karena itu, keberadaan PKL, baik di trotoar ataupun di bahu jalan, sama sekali tidak menimbulkan pengaruh negatif bagi para konsumen yang sebagian besar adalah

buruh pabrik. Dan keberadaan PKL sudah merupakan suatu kebutuhan bagi konsumen.

4.5.2 Analisis Persepsi Pengelola Kawasan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap pengelola kawasan yang terdapat di kawasan ini yaitu terdiri dari Pengelola Kawasan Panbil dan Pengelola Kawasan Muka Kuning diketahui bahwa pandangan pengelola kawasan terhadap lokasi PKL adalah relatif tidak mengganggu aktivitas kawasan, hanya pada saat-saat tertentu saja keberadaan PKL tersebut dirasakan dapat mengganggu aktivitas kawasan yaitu pada saat pagi dan sore hari. Aktivitas ini biasanya bukan untuk pekerja yang bekerja di pabrik, melainkan lebih kepada staf yang bekerja pada *front office*. Untuk penempatan PKL yang lebih baik adalah ditempatkan pada lokasi yang bukan merupakan daerah penjagaan pengelola kawasan atau lebih tepatnya untuk lokasi PKL tersebut bagi pengelola kawasan dapat dilakukan ditempat yang telah disediakan pemerintah. Karena untuk dialokasikan pada kawasan pengelola, sudah tidak dapat dilakukan lagi mengingat kawasan mereka telah menyediakan fasilitas perijinan dan fasilitas perbelanjaan sendiri.

Jenis dagangan dan sarana fisik yang dipergunakan PKL menurut pengelola kawasan adalah lebih baik jika disesuaikan dengan keinginan PKL dengan catatan jenis dagangan dan sarana fisik tersebut tidak mengganggu lingkungan sekitarnya seperti kebiasaan PKL yang membuang sampah hasil pengolahan makanan sembarangan dan penampilan sarana fisik yang ditata dengan baik. Sedangkan status lokasi PKL adalah lebih baik jika mereka memiliki

status yang legal sehingga keberadaannya dapat termonitor dengan jelas dan tidak akan bertambah secara terus menerus.

Pada dasarnya pengelola kawasan tidak menolak keberadaan PKL, karena pada dasarnya aktivitas PKL tidak memasuki kawasan yang harus dijaga oleh pengelola kawasan. Namun pihak pengelola kawasan cenderung lebih menyoroti masalah kebersihan yang secara umum tidak dihiraukan oleh para PKL. Dimana minimnya kesadaran para pedagang terhadap pemeliharaan lingkungan menjadi salah satu alasan untuk merelokasi PKL ke tempat peruntukannya.

4.5.3 Analisis Persepsi Instansi/Dinas

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap instansi pemerintah yaitu terdiri dari Bappedako, Dinas Pasar Kebersihan, dan Dinas Perhubungan diketahui bahwa pandangan instansi/dinas terhadap PKL adalah dapat mengganggu aktivitas kota. Karena keberadaan lokasi PKL yang menempati ruang publik, oleh karena hal tersebut instansi terkait terutama Dinas Pasar dan Kebersihan merencanakan akan melakukan pemindahan lokasi PKL ke kawasan terminal Tanjung Piayu. Lokasi tersebut dirasakan pemerintah merupakan lokasi yang sangat sesuai bagi PKL sehingga akan mengurangi kesan wajah kota yang kotor dan semrawut.

Pengaturan jenis dagangan PKL pada kawasan tersebut diharapkan dapat berupa jenis dagangan yang sudah dilakukan PKL saat ini, dengan kata lain bahwa PKL dapat memiliki jenis dagangan sesuai dengan keinginannya baik berupa makanan, bukan makanan dan jasa.

Untuk penggunaan sarana fisik pedagang dalam hal ini pemerintah lebih menyenangi penggunaan kios, sehingga keberadaan PKL tersebut lebih mudah termonitor dan tidak merusak lingkungan sekitar dengan kebiasaan PKL yang selalu meninggalkan sarana fisik ketika sedang tidak berjualan. Kebiasaan pedagang yang selalu meninggalkan sarana dagangannya tersebut dirasakan merupakan salah satu alasan pemerintah dalam melakukan penertiban terhadap aktivitas tersebut.

Dengan peletakan kegiatan PKL pada lahan yang diinginkan pemerintah, keadaan tersebut juga akan lebih menguntungkan bagi PKL, karena status lokasi yang sekarang ditempati PKL akan menjadi status yang diizinkan untuk berjualan. Sehingga kekhawatiran dan rasa was-was PKL tidak akan ada lagi.

4.5.4 Analisis Perencanaan Ruang

Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Batam, Lokasi Kecamatan Sei Beduk dalam rencana struktur ruang kota dialokasikan sebagai pusat orientasi yang memberikan pelayanan bagi penduduk dan sebagai pengikat lingkungan untuk berinteraksi dan bersosialisasi antar masyarakat, yang dialokasikan sejumlah lokasi kegiatan perdagangan dan jasa serta fasilitas umum. Sedangkan pada kawasan Muka Kuning dan Panbil pengalokasiannya lebih ditekankan pada pengembangan industri (kawasan-kawasan industri) dengan jenis komoditi yang berorientasi ekspor.

Melihat hal tersebut lokasi yang menjadi wilayah studi bukan merupakan tempat terkonsentrasinya kegiatan PKL. Namun dengan adanya kegiatan yang

dikembangkan di sub pusat ini yang disesuaikan dengan kebudayaan dan daya dukung lahannya maka penataan PKL berupa Pujasera yang merupakan pusat penampungan para pedagang informal (PKL) yang direncanakan akan dikembangkan di Batu Aji yang berada di Kecamatan Sei Beduk akan memberikan alternatif ruang bagi kegiatan tersebut.

Jenis kegiatan perdagangan yang dialokasikan berupa pengelompokan perdagangan dengan jenis dagangan makanan, bukan makanan dan jasa. Dengan adanya Pujasera ini, diharapkan para pedagang informal yang ada atau diperkirakan berkembang dapat terakomodir dan menempati lokasi yang strategis, sehingga dapat melayani kebutuhan penduduk.

Sedangkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kota Batam menyebutkan bahwa untuk kenyamanan dalam beraktivitas pemerintah telah merencanakan untuk melakukan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana bagi usaha kecil seperti pembangunan pasar dan penataan kawasan sektor informal. Hal tersebut dilakukan dengan mendesain ruang dan sarana yang sebaiknya dipergunakan PKL untuk beraktivitas. Sarana tersebut akan menjadi salah satu daya tarik dalam kegiatan perekonomian Batam. Namun yang perlu diperhatikan pemerintah adalah dalam mendesain sarana fisik PKL tidak perlu dibuatkan sarana yang megah karena akan menyulitkan dalam pemeliharaan dan berakibat pada ongkos tambahan bagi PKL dan kenaikan harga pada konsumen.

4.6 Pola Ruang Aktivitas Pedagang Kaki Lima berdasarkan karakteristik dan aspek normatif

Berdasarkan hasil analisis pola ruang diketahui bahwa lokasi yang paling dominan diinginkan baik oleh PKL maupun konsumen adalah berada pada trotoar dan bahu jalan. Terutama lokasi yang berada didepan pintu-pintu masuk, baik pintu masuk yang akan menuju ke Kawasan Perdagangan Panbil maupun pintu masuk yang akan menuju Kawasan Industri Muka Kuning. Pintu-pintu masuk merupakan akses pejalan kaki yang dipergunakan PKL untuk berjualan. Lokasi pintu-pintu masuk tersebut lebih banyak diminati PKL dikarenakan merupakan tempat berhentinya kendaraan umum yang akan mengangkut penumpang untuk menuju atau keluar dari Kawasan Perdagangan Panbil maupun Kawasan Industri Muka Kuning. Keadaan tersebut menimbulkan konsentrasi pengunjung berlalu lalang yang tinggi jika dibandingkan lokasi lainnya.

Dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditempuh pemerintah, pada dasarnya pemerintah telah berupaya dan telah memasukkan unsur PKL dalam perencanaan kota. Namun hal tersebut masih dalam skala yang sangat luas dan belum menjurus kearah penentuan lokasi dan tempat aktivitas yang lebih jelas. Keterbatasan pemerintah dalam menjabarkan peraturan-peraturan terkait mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Saat ini Peraturan Daerah Kota Batam mengenai tata ruang terbatas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan langsung menuju ke Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Sehingga Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) dapat mencantumkan unsur arahan kebijakan pemanfaatan ruang sektor informal/PKL pada ruang-ruang kota, yang langsung menuju Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota (RTBL) dengan aturan-aturan yang lebih spesifik mengenai PKL.

Trotoar merupakan tempat berjalan kaki yang dipergunakan oleh manusia dan tidak boleh terganggu oleh aktivitas lainnya. Sehingga lokasi trotoar yang menjadi incaran dalam penempatan lokasi oleh PKL adalah sangat tidak layak dijadikan lokasi oleh PKL dalam beraktivitas. Sarana fisik tampilan PKL menjadikan lokasi studi yaitu jalan Jendral Ahmad Yani yang merupakan jalan dengan klasifikasi sebagai jalan arteri tidak cocok untuk dijadikan sebagai tempat menyeberang jalan, karena berdasarkan Petunjuk Perencanaan Kawasan Perkotaan, Departemen PU, 1987 : 5 disebutkan bahwa jalan arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien. Peletakan sarana fisik PKL akan menjadikan jalan dengan penggunaan kendaraan yang memiliki kecepatan relatif tinggi tidak optimal karena sering terjadi pemberhentian kendaraan sehingga terjadi tundaan lalu lintas yang berakibat pada kemacetan terutama pada saat-saat jam sibuk.

Status Lokasi kawasan studi merupakan trotoar yang masih merupakan badan jalan, sehingga pemberian izin untuk penggunaan trotoar jalan tidak dapat dilakukan. Selain trotoar memiliki fungsi untuk pengguna jalan, trotoar juga merupakan milik bersama-sama untuk kepentingan bersama pula.

4.7 Temuan-Temuan Studi

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, pengolahan data dan hasil analisis, maka terungkap pola ruang PKL dan karakteristik aktivitasnya di Kawasan Panbil Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Karakteristik PKL di Kawasan Panbil.

- Berdasarkan karakteristik sosial ekonominya asal daerah PKL terbanyak berasal dari Sumbar, dengan tingkat pendidikan pedagang terbanyak adalah SLTA, PKL sebagai pekerjaan utama dan bekerja sebagai PKL telah lama yaitu lebih dari 3 tahun.
- Berdasarkan karakteristik aktivitas PKL, terdiri dari golongan pengguna jasa adalah pekerja Muka Kuning, dengan sifat pelayanan yaitu menetap, jenis dagangan terbanyak adalah bukan makanan dan sarana fisik yang digunakan adalah gerobak/kereta dorong.

2. Pola ruang aktivitas PKL di Kawasan Panbil.

- Pola ruang PKL terdiri dari pola penyebaran penyebaran yang memanjang disepanjang pinggir jalan (*linier agglomeration*) dengan alasan pertimbangan aksesibilitas yang tinggi sehingga akan mempunyai kesempatan yang besar dalam meraih konsumen. Sedangkan ruang yang digunakan yaitu berada di lokasi di trotoar karena memiliki pengunjung yang ramai berlalu lalang lebih spesifiknya adalah di pintu masuk Kawasan Muka Kuning dan pintu masuk Kawasan Panbil.

- Pola ruang berdasarkan karakteristik aktivitas konsumen pada umumnya adalah pekerja Muka Kuning; pola ruang berdasarkan sarana fisik yang digunakan terbanyak adalah gerobak. pola ruang berdasarkan sifat pelayanan terbanyak adalah pedagang dengan sifat pelayanan menetap, pola ruang berdasarkan jenis barang yang dijual terbanyak adalah menjual bukan makanan dan kesemua pola ruang tersebut terbanyak adalah menempati lokasi trotoar.
 - Dalam melakukan pertimbangan untuk merelokasikan PKL dan penempatan lokasi baru harus mempertimbangkan persepsi konsumen.
3. Fungsi ruang berdasarkan aspek normatif berupa kebijakan dan persepsi konsumen, instansi, dan pengelola kawasan.
- Berdasarkan persepsi konsumen lokasi yang paling baik adalah disekitar pintu masuk ke Kawasan Muka Kuning dan pintu masuk ke Kawasan Panbil, jenis dagangan yang mereka inginkan adalah makanan dan bukan makanan, penggunaan sarana fisik berupa warung semi permanen dan keberadaan PKL tidak menimbulkan pengaruh negatif bagi para konsumen.
 - Berdasarkan persepsi pengelola kawasan keberadaan PKL asalkan tidak memasuki daerah yang menjadi penjuragan pengelola kawasan dan dapat menjaga lingkungan adalah relatif tidak mengganggu aktivitas kawasan.
 - Berdasarkan persepsi Instansi/Dinas merencanakan akan melakukan relokasi PKL ke kawasan terminal Tanjung Piayu sehingga akan

mengurangi kesan wajah kota yang kotor dan semrawut dengan pengaturan sarana fisik berupa kios.

- Berdasarkan perencanaan ruang Kawasan Panbil ditekankan pada pengembangan industri (kawasan-kawasan industri) dengan jenis komoditi yang berorientasi ekspor sedangkan keberadaan PKL akan ditampung berupa Pujasera.

4. Pola ruang aktivitas berdasarkan karakteristik PKL dan pertimbangan aspek normatif

- Status Lokasi kawasan studi merupakan trotoar yang masih merupakan badan jalan, sehingga pemberian izin untuk penggunaan trotoar jalan tidak dapat dilakukan. Selain trotoar memiliki fungsi untuk pengguna jalan, trotoar juga merupakan milik bersama-sama untuk kepentingan bersama pula.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Keberadaan PKL selalu menjadi dilema dalam perkembangan suatu kota, disatu sisi keberadaan mereka sangat dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah, dan menjadi mata pencarian utama bagi pedagang, sedangkan disisi lain keberadaan mereka mengganggu pengguna ruang publik dan mengakibatkan kumuhnya suatu kawasan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dihasilkan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan temuan-temuan pola ruang PKL di Kawasan Panbil Kota Batam dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam melakukan aktivitasnya PKL selalu memilih ruang publik terutama yang berada di trotoar jalan dan lebih spesifiknya adalah pintu masuk, hal tersebut dikarenakan pintu masuk jalan memiliki aksesibilitas pengunjung yang tinggi dan kemudahan bagi konsumen untuk sekedar melihat-lihat dagangan. PKL tidak mempertimbangkan fungsi ruang tempat mereka beraktivitas dan tidak mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan pengguna aktivitas lain.

2. Sifat pelayanan PKL adalah menetap, karena dengan menetap selain telah memiliki pelanggan tersendiri mereka juga dapat meletakkan sarana dagangannya tanpa dibongkar pasang.
3. Golongan pengguna jasa PKL terbanyak adalah pekerja yang berada disekitar PKL, sehingga jika diadakan relokasi PKL harus mempertimbangkan aspek konsumen sebagai pengguna jasa PKL.
4. Adanya rencana pemerintah yang akan melakukan relokasi PKL ke kawasan terminal Tanjung Piayu untuk mengurangi kesan wajah kota yang kotor dan semrawut dengan pengaturan sarana fisik berupa kios harus lebih mempertimbangkan persepsi PKL dan konsumen penggunaannya.
5. Penggunaan trotoar dan bahu jalan sebagai tempat PKL beraktivitas dengan sarana fisiknya adalah tidak layak dijadikan lokasi karena dapat mengganggu pejalan kaki dan juga penggunaan kendaraan dengan terjadi pemberhentian kendaraan sehingga terjadi tundaan lalu lintas yang berakibat pada kemacetan terutama pada saat-saat jam sibuk.

5.2 Rekomendasi

Beberapa hal yang dapat dikemukakan sebagai rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Kota Batam sehubungan dengan aktivitas PKL di Kawasan Panbil Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah membuat kebijakan-kebijakan berupa insentif-insentif tertentu yang dapat menarik pihak pengelola kawasan dalam penempatan PKL di kawasan yang dikelolanya, yang mana insentif tersebut dapat berupa

pengurangan beban pajak kepada pengelola kawasan, walaupun tidak sepenuhnya dapat diimpaskan melalui penarikan retribusi dari PKL namun akan mengurangi permasalahan yang ditimbulkannya.

2. Memberikan sanksi bagi kendaraan yang melakukan pemberhentian sembarangan, sedangkan bagi pejalan kaki pemerintah dapat membangunkan jembatan penyeberangan yang mana di jembatan penyeberangan tersebut dapat dimasukkan unsur PKL, sehingga akan mengurangi kemacetan lalu lintas dan dapat menghentikan aktivitas PKL yang berada di median jalan.
3. Sektor informal merupakan kegiatan pendukung (*support activity*) dari kegiatan sektor formal sehingga dalam relokasinya harus mempertimbangkan keberadaan sektor formal sebagai kegiatan utama. Misalnya saja pemerintah dapat menentukan standar ruang umum yang dapat dipergunakan PKL untuk beraktivitas dalam suatu kawasan.
4. Perlu mengatur pola perdagangan PKL sehingga akan mengurangi terjadinya kemacetan lalu lintas, misalnya PKL diijinkan berdagang hanya pada jam-jam tertentu.
5. Perlu tersedianya peraturan daerah yang merupakan produk hukum tertinggi di daerah yang mengatur PKL dengan mengakomodir semua karakteristik dan kriteria-kriteria yang perlu diatur, perijinan dan retribusi serta sanksinya. Sehingga dapat dijadikan landasan hukum bagi penataan PKL di Kota Batam Umumnya dan Kawasan Panbil khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- An Naf, Jullisar. 1983. *Pedagang Kaki Lima dengan Berbagai Segi Permasalahan*, Jakarta: Galan
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Catanese, Anthony J. 1979. *Introducing To urban planning*. New York : Mc. Grawhill, Inc.: 83)
- Budihardjo, Eko. dkk. 1993. *Kota Berwawasan Lingkungan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Budihardjo, Eko. 1999. *Kota Berkelanjutan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Budihardjo, Eko. 1995. *Pendekatan Sistem dalam Tata Ruang dan Pembangunan Daerah untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Burke, Edmund M. 2004. *Sebuah Pendekatan Partisipasi dalam Perencanaan Kota* (Terjemahan A Participatory Approach to Urban Planning oleh Puji Lestari) Bandung: Yayasan Sugijanto Soegijoko
- Chaniago, Adrinof A. 2001. *Gagalnya Pembangunan: Kajian Ekonomi Politik Terhadap Krisis Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka LP3S
- Dimara, Daan, 1979. *Pedagang Kaki Lima di Jakarta*. Jakarta: PDSM
- Djojodipura, Marsudi. 1992. *Teori Lokasi*. Penerbit: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Daldjoeni, N. 1998. *Geografi Kota dan Desa*. Bandung: Alumni
- Hadi, Sudharto P. 2001. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Hidayat. 1976. *Saran-saran Pengembangan Kesempatan Kerja Golongan Ekonomi Kecil Khususnya Pedagang Kaki Lima dan Tukang Becak di Jakarta*. Bandung: Unpad
- Jayadinata, Johara T. 1999. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*. Bandung: Penerbit ITB.
- Kaiser, Edward John et all. 1979. *Urban Land Use Planning*. University of Illionis Press.
- Kodoatie, Robert J. 2003. *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maharadja, Apul D. 2003. *Membangun Indonesia: Studi Kasus Batam*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Manning, Chris dan Effendi, Tajudin Noer (Penyunting). 1985. *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- McGee, T.G dan Y.M. Yeung. 1977. *Hawkers In Southeast Asia Cities, Panning For The Bazar Economy*. Ottawa
- Miles, Matthew B, 1992. *Analisis Data Kualitatif (Terjemahan Qualitative Data Analysis oleh Tjetjep Rohendi Rohidi)*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Octarevia, David, 2003. *Tinjauan Suatu Model FTZ di Indonesia: Free Trade Zone Khas Batam: berpendudukan dan Berpemerintah Kota*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)
- Ramli, Rusli. 1992. *Sektor Informal Perkotaan Pedagang Kaki Lim*. Jakarta: Ind-Hill Co
- Rachbini, Didik J, Hamid, Abdul, 1994. *Ekonomi Informal Perkotaan*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Sinulingga. Budi D, 1999. *Pembangunan Kota Tinjauan Regional dan Lokal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

- Sudidyo, D Priyono, 2001. *Respon Pelaku Sektor Informal Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota*. JPP Volume I No. 1
- Shirvani, Hamid, 1985. *The Urban Design Process*. New York: Van Nonstrand reinhold Company.
- Soehartono, Irawan, 2000. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Pustaka LP3S
- Suryabroto, Sumardi. 1997. *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Widodo, Erna. 2000. *Konstruksi kearah Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta: Adipura
- Zahnd, Markus, 1999, *Perancangan Kota Secara Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius.

BUKU DATA/ LAPORAN RENCANA :

- Pemerintah Daerah Kota Batam. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam Tahun 2004 – 2014.
- Pemerintah Daerah Kota Batam, Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Kota Batam Tahun 2001-2005

PERATURAN/PERUNDANG-UNDANGAN :

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1971 tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1974 tentang Penunjukan dan Penetapan Pulau Batam sebagai Wilayah Usaha kawasan Berikat(Bonded warehouse)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1978 tentang Penetapan Seluruh Daerah Industri Pulau Batam sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat (Bonded warehouse) Hingga ke Pulau Janda Berhias, Tanjung Sauh, Ngenan, Moi-moi dan Kasem.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam.